



Kementerian PPN/
Bappenas



Laporan Evaluasi RKP TA 2022

Dukungan Kebijakan Luar Negeri Pada Pembangunan Nasional Pasca Pandemi

Direktorat Politik Luar Negeri dan
Kerjasama Pembangunan Internasional
Kementerian PPN/Bappenas

2023

Dukungan Kebijakan Luar Negeri Pada Pembangunan Nasional Pasca Pandemi

Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional

Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan YME, berkat ridho-Nya maka laporan evaluasi ini dapat diselesaikan.

Laporan evaluasi ini disusun sebagai pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian & Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 3 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi Tata Kelola Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan dilaksanakannya evaluasi RKP periode sebelumnya berdasarkan laporan hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga untuk dijadikan salah satu acuan penyusunan rancangan RKP untuk periode dua tahun berikutnya.

Serangkaian kegiatan telah dilaksanakan dalam rangka penyusunan laporan evaluasi. Studi referensi dilakukan untuk menentukan/mencari pisau analisis dalam melakukan evaluasi. Kunjungan lapangan ke KBRI Berlin, ITPC Hamburg, dan KBRI Prague dilakukan untuk melihat secara langsung hasil kegiatan serta menggali permasalahan dan menemukenali kendala dalam pelaksanaan kegiatan. Adapun Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terpumpun) dilakukan dalam rangka mempertajam pisau analisis serta mempelajari perkembangan lingkungan strategis guna merumuskan strategi kebijakan dalam upaya mencapai tujuan dan target yang telah direncanakan.

Laporan evaluasi ini disajikan dalam format semi-ilmiah dengan maksud kiranya laporan ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan serta referensi dalam penyusunan kebijakan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada narasumber dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam persiapan, pelaksanaan, hingga selesainya penyusunan laporan evaluasi ini. Kiranya data dan referensi, pendapat, masukan, serta catatan-catatan berharga dan bermakna telah mewarnai laporan ini sehingga menarik ditata, enak dibaca, dan mudah dicerna.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu masukan dan saran perbaikan sangat kami harapkan.

Jakarta, Desember 2023

Penyusun

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Hendra Wahanu Prabandani

Penyusun

Wisnu Utomo

Sri Asfarina Murti

Fika Annisa Nurtrisyanti

M. Shafwan Musyaffa

Desain

Aulia Cahya Islamy

DAFTAR NARASUMBER

Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar, MA
BRIN

Drs. Makmur Keliat, Ph.D
Fisip UI

Broto Wardoyo, Ph.D
Fisip UI

Andrew Wiguna Mantong, M.Sc.
CSIS

Ari Satria, S.E., MA
Sesditjen Perundingan Perdagangan Internasional, Kemenlu

Rio Budi Rahmanto, Ph.D
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Multilateral, Kemenlu

Arif Havas Oegroseno
Duta Besar RI untuk Republik Federal Jerman

Kenssy D. Ekaningsih
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBPP) RI untuk Republik Ceko

Omar Farizi, SIP
Lab '45

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR GRAFIK	ix
DAFTAR BAGAN	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
Bab I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan dan Sasaran	3
3. Ruang Lingkup	4
4. Keluaran dan Hasil yang Diharapkan	4
Bab II METODOLOGI	6
Bab III TELAAH GAGASAN DAN PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS	11
3.1. Telaah Gagasan	11
3.1.1. Perkembangan Kekuatan Negara	11
3.1.2. Dinamika Hubungan Antar negara dalam Sistem Internasional	13
3.2. Lingkungan Strategis 2021 dan 2022	16
3.2.1. Pandemi COVID-19	16
3.2.2. Rivalitas Amerika Serikat-Tiongkok	19
3.2.3. Dinamika Lingkungan Kawasan	23
3.2.4. Tantangan Kerja Sama Pembangunan Internasional untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi Nasional	24
3.2.5. Hambatan Kepemimpinan Indonesia di Fora Internasional	25
3.2.6. Kerentanan Penjagaan Integritas NKRI dan Pelindungan WNI	26
3.2.7. Tantangan Pembangunan Citra Indonesia di tingkat Internasional	27

3.2.8.	Evaluasi Kinerja Program Pembangunan Bidang Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional	28
Bab IV	HASIL EVALUASI	31
4.1.	Evaluasi Pembangunan	31
4.1.	Evaluasi Pembangunan Berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Prioritas Nasional Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	31
4.2.	Evaluasi Pembangunan Berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Program Prioritas Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	32
4.3.	Evaluasi Pembangunan Berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Prioritas Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri	36
4.4.	Evaluasi Pembangunan Berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Prioritas Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional	38
4.5.	Evaluasi Pembangunan Berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Prioritas Peningkatan Citra Positif Indonesia di Dunia Internasional	41
4.6.	Evaluasi Pembangunan Berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Prioritas Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global	42
4.7.	Evaluasi Pembangunan Berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Prioritas Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global	47
Bab V	ANALISIS DAMPAK	50
5.1.	Analisis Dampak terhadap Pembangunan Bidang Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional	50
5.1.1.	Analisis Dampak terhadap Spektrum Politik-Keamanan	54
5.1.2.	Analisis Dampak terhadap Spektrum Ekonomi	56
5.1.3.	Analisis Dampak terhadap Spektrum Sosial-Budaya	58
5.1.4.	Analisis Dampak terhadap Spektrum Kepemimpinan	60
5.2.	Kebutuhan Dukungan Infrastruktur yang Mumpuni	66
5.2.1.	Capaian PP Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri di KBRI Berlin	68
5.2.2.	Capaian PP Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri di KBRI Praha	72

Bab VI PENUTUP	75
6.1. Kesimpulan	75
6.2. Rekomendasi Perbaikan	78
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Kategori Kriteria Capaian Kinerja	8
Tabel 2.	Indikator Kinerja Bidang Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional TA 2022	29
Tabel 3.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Prioritas Nasional Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik TA 2022	31
Tabel 4.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Prioritas Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri TA 2022	33
Tabel 5.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Prioritas Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri TA 2022	36
Tabel 6.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Prioritas Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional TA 2022	39
Tabel 7.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Prioritas Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional TA 2022	41
Tabel 8.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Prioritas Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global TA 2022	43
Tabel 9.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Diplomasi Ekonomi Indonesia TA 2022	48
Tabel 10.	Penyetaraan Variabel Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional dengan Indonesia Foreign Policy Index dan Asia Power Index	51
Tabel 11.	Analisis Tingkat Dampak Kebijakan Pembangunan Bidang Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tren Restriksi Mobilitas Global 2021-2022	17
Gambar 2. Tren Distribusi Vaksin COVID-19	18
Gambar 3. Kejahatan Maritim di Dunia dan Tingkat Ancaman Intrusi di Teritori Indonesia	56
Gambar 4. Persebaran Ekspor Impor Indonesia 2021 dan 2022	57
Gambar 5. Perubahan Postur Perwakilan Diplomatik dan Konsulat Republik Indonesia 2017 & 2022	66
Gambar 6. Persebaran Pejabat Perbantuan pada Perwakilan RI di Luar Negeri	67
Gambar 7. Posisi Relatif KBRI Berlin terhadap Indeks Perwakilan RI 2022	70
Gambar 8. Posisi Relatif KBRI Praha terhadap Indeks Perwakilan RI 2022	72

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Tren Kebijakan Moneter dan Fiskal Global 2018-2019	17
Grafik 2.	Tren Target dan Realisasi Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional 2020-2023	32
Grafik 3.	Tren Target dan Realisasi Jumlah Forum yang Dipimpin oleh Indonesia pada Tingkat Regional dan Multilateral 2020-2023	33
Grafik 4.	Tren Target dan Realisasi Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional	34
Grafik 5.	Tren Target dan Realisasi Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri 2020-2023	35
Grafik 6.	Tren Target dan Realisasi Persentase Penyelesaian Kasus WNI dan BHI di Luar Negeri 2020-2023	37
Grafik 7.	Target dan Realisasi Indeks Kemajuan Perundingan Penyelesaian Perbatasan Maritim 2020-2023	38
Grafik 8.	Tren Target dan Realisasi Jumlah program/kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan Triangular 2020-2023	40
Grafik 9.	Tren Target dan Realisasi Persentase Prakarsa dan Rekomendasi Indonesia yang Diterima Dalam Pertemuan Tingkat Tinggi dan Tingkat Menteri Multilateral 2020-2023	44
Grafik 10.	Tren Target dan Realisasi Persentase Rekomendasi dan Prakarsa Indonesia yang Diterima dalam Pertemuan Tingkat Tinggi dan Tingkat Menteri ASEAN 2020-2023	45
Grafik 11.	Tren Target dan Realisasi Persentase Kesepakatan Kerja Sama Bilateral di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder Dalam Negeri 2020-2023	46
Grafik 12.	Tren Target dan Realisasi Persentase Kesepakatan Kerja Sama Bilateral di Kawasan Amerika dan Eropa yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder Dalam Negeri 2020-2023	47
Grafik 12.	Tren Nilai Indonesia Foreign Policy Index dan Asia Power Index 2018-2022	52
Grafik 13.	Tren Variabel Politik-Keamanan Indonesia Foreign Policy Index dan Asia Power Indonesia 2018-2022	54
Grafik 14.	Tren Variabel Ekonomi Indonesia Foreign Policy Index dan Asia Power Index 2018-2022	56
Grafik 15.	Pertumbuhan Pariwisata Indonesia 2020-2022	58
Grafik 16.	Tren Variabel Sosial-budaya Indonesia Foreign Policy Index dan Asia Power Index 2018-2022	59

Grafik 17.	Tren Skor Soft Power Indonesia 2020-2023	59
Grafik 18.	Tren Pemberitaan Emerging Power 2020-2022	60
Grafik 19.	Tren Variabel Kepemimpinan Indonesia Foreign Policy Index dan Asia Power Index 2018-2022	61
Grafik 20.	Tren Kontribusi Ekonomi Internasional terhadap PDB Indonesia	64
Grafik 21.	Tren Usulan dan Alokasi Anggaran Perwakilan RI (BBNO) 2019-2022	68

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.	Lini Pelaksanaan Evaluasi	6
Bagan 2.	Analisis Celah Target dan Capaian Kinerja	7
Bagan 3.	Spektrum Penilaian Dampak Capaian Kinerja	10
Bagan 4.	Pemetaan Kekuatan Negara Berdasar Kapasitas dan Adopsi Kebijakan	14
Bagan 5.	Spektrum Diplomasi Ekonomi dan Economic Statecraft	15
Bagan 6.	Tren Hubungan Rivalitas Amerika Serikat - Tiongkok	23

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Capaian Perencanaan Pembangunan Kebijakan Luar Negeri Indonesia.	85
Lampiran 2. Matriks Indeks Perwakilan Republik Indonesia Tahun 2022.	90
Lampiran 3. Matriks Indeks Perwakilan Republik Indonesia Tahun 2023.	98
Lampiran 4. Perkembangan Nilai Ekspor Indonesia 2018-2022 (ribu USD)	105
Lampiran 5. Perkembangan Nilai Impor Indonesia 2018-2022 (ribu USD)	117
Lampiran 6. Perkembangan Neraca Dagang Indonesia 2018-2022 (ribu USD)	127
Lampiran 7. Perkembangan Investasi Asing di Indonesia 2018-2022 (USD)	137

Bab I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tahun 2022 merupakan momentum awal dalam pemulihan ekonomi dan sosial Indonesia pasca Pandemi COVID-19. Akibat pandemi yang merebak di tahun 2020 hingga 2021 maka terdapat sejumlah penyesuaian terhadap perencanaan dan pembangunan nasional. Namun demikian, pemerintah memastikan penyesuaian yang dilakukan masih dalam koridor target perencanaan pembangunan. Pembangunan bidang politik luar negeri dan kerja sama pembangunan internasional akan menjadi salah satu titik tumpu utama dalam menjamin trajektori pembangunan nasional walaupun menghadapi berbagai fluktuasi dinamika geopolitik ataupun lingkungan strategis lainnya.

Visi politik luar negeri “Indonesia sebagai negara berpengaruh dan mandiri di Indo-Pasifik” mengisyaratkan bahwa Indonesia sebagai negara berkekuatan menengah memerlukan kebijakan luar negeri yang tangguh untuk menghadapi dinamika internasional dan memanfaatkan sumber dayanya secara efektif dan efisien. Hal tersebut sebagaimana Indonesia 2045 yang diarahkan untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara nusantara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan serta keluar dari jebakan yang dialami oleh negara-negara berpendapatan menengah (*middle income trap*). Sebagai fondasi yang akan menopang pengembangan pembangunan politik luar negeri dan kerja sama pembangunan internasional, pemerintah telah merumuskan dan tengah menjalankan proses transisi tersebut melalui Perpres No. 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang di dalamnya termuat berbagai arah kebijakan, salah satunya Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri dalam Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik yang mencakup:

1. Memperkuat integritas wilayah NKRI dan perlindungan WNI di luar negeri melalui: 1) Peningkatan dan intensifikasi efektivitas penyelesaian perbatasan dan percepatan pemetaan batas negara; 2) Penegakan norma dan hukum internasional dalam melindungi kedaulatan Indonesia; 3) Peningkatan kerja sama internasional dalam pencegahan dan penanganan kejahatan transnasional; 4) Penguatan perlindungan WNI dan BHI di tingkat bilateral, regional, dan multilateral serta meningkatkan upaya pencegahan terjadinya

masalah WNI di luar negeri; 5) Penguatan peran-serta aktor non-pemerintah dalam melakukan perlindungan kepada WNI.

2. Memperkuat kerja sama pembangunan internasional melalui: 1) Peningkatan penggunaan sumber-sumber dan mekanisme pendanaan baru; 2) Penciptaan lingkungan yang mendukung peningkatan partisipasi swasta dalam kerja sama pembangunan internasional; 3) Penguatan KSST untuk mendukung perdagangan dan investasi; 4) Penguatan lembaga pemberi bantuan dan kerja sama pembangunan internasional.
3. Meningkatkan citra positif Indonesia di dunia internasional melalui: 1) Penyusunan kebijakan diplomasi publik Indonesia untuk meningkatkan koordinasi di tingkat nasional; 2) Peningkatan peran-serta aktor non-pemerintah dalam diplomasi publik yang inklusif
4. Memperkuat kerja sama pembangunan internasional melalui: 1) Peningkatan penggunaan sumber-sumber dan mekanisme pendanaan baru; 2) Penciptaan lingkungan yang mendukung peningkatan partisipasi swasta dalam kerja sama pembangunan internasional; 3) Penguatan KSST untuk mendukung perdagangan dan investasi; 4) Penguatan lembaga pemberi bantuan dan kerja sama pembangunan internasional.
5. Meningkatkan peran Indonesia di tingkat regional dan global melalui: 1) Peningkatan inisiasi/posisi Indonesia yang diterima di tingkat regional dan global; 2) Peningkatan peran aktif Indonesia dalam perdamaian dunia; 3) Peningkatan harmonisasi dan koordinasi di dalam negeri untuk melaksanakan komitmen internasional; 4) Penataan peran, struktur, SDM, dan fungsi K/L dalam melaksanakan kebijakan luar negeri Indonesia.

Dalam pengimplementasiannya, arah kebijakan dan strategi di atas diejawantahkan dalam setiap Rencana Kerja Pemerintah setiap tahunnya. Pada RKP 2022, bidang politik luar negeri dan kerja sama pembangunan internasional diarahkan untuk mendukung pelaksanaan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang meliputi:

1. Penguatan Integritas NKRI dan Pelindungan WNI di Luar Negeri dengan: 1) Peningkatan dan Intensifikasi Efektivitas Penyelesaian Perbatasan dan Percepatan Pemetaan Batas Negara; dan 2) Penguatan Pelindungan WNI dan BHI di Tingkat Bilateral, Regional, Multilateral;
2. Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional dengan: 1) Peningkatan Penggunaan Sumber-Sumber dan Mekanisme Pendanaan Baru Kerja Sama Pembangunan Internasional; 2) Penciptaan Lingkungan yang Mendukung

(*Enabling Environment*) Peningkatan Keterlibatan Swasta dalam Kerja Sama Pembangunan Internasional;

3. Peningkatan Citra Positif di Dunia Internasional dengan: Penyusunan Kebijakan Diplomasi Publik dan Turunannya;
4. Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global dengan: 1) Peningkatan Inisiatif/Posisi Indonesia yang Diterima; dan 2) Optimalisasi Kontribusi Indonesia dalam Jajaran 10 Besar Negara Kontributor MPP PBB.

Untuk mengukur keberhasilan perencanaan dan pembangunan dari arah kebijakan dan strategi yang telah disusun pada bidang politik luar negeri dan kerja sama pembangunan internasional, maka dibutuhkan serangkaian indikator yang bisa menjadi patokan utama mencakup lima elemen evaluasi yakni spesifik, terukur, dapat tercapai, relevan dan batas waktu (*specific, measurable, attainable, relevant, dan timetable/SMART*). Jadi, evaluasi dilakukan untuk menangkap capaian suatu arah kebijakan dan strategi pada suatu waktu tertentu, sehingga terefleksikan kinerja perencanaan dan pengimplementasian yang ingin dicapai. Oleh karena itu, evaluasi dapat menjadi instrumen verifikasi dan validasi keselarasan antara perencanaan pembangunan yang dilakukan antara perencanaan jangka menengah (RPJMN) dan jangka pendek (RKP).

1.2. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa evaluasi merupakan salah satu tahapan dari perencanaan pembangunan nasional dan Menteri PPN/Kepala Bappenas serta Kepala Bappeda diamanatkan untuk menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan dan evaluasi kinerja rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian & Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 3 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi Tata Kelola Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan pelaksanaan evaluasi RKP periode sebelumnya berdasarkan laporan hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga untuk dijadikan salah satu acuan penyusunan rancangan RKP untuk periode dua tahun berikutnya. Dalam hal ini Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional ditugaskan untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor

perencanaan pembangunan nasional bidang politik luar negeri dan kerja sama pembangunan internasional dalam siklus perencanaan pembangunan nasional.

Berkaca pada amanat yang telah tertuang dalam berbagai regulasi tersebut, maka laporan evaluasi yang disusun ditujukan untuk memperoleh data dan informasi untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap implementasi RKP 2022 dan RPJMN 2020-2024 serta acuan pertimbangan dalam menyusun RKP berikutnya di bidang politik luar negeri dan kerja sama pembangunan internasional. Selain itu, evaluasi juga ditujukan sebagai upaya kontrol dan mitigasi lebih cepat untuk dilakukan intervensi kebijakan ketika terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara target dan capaian dari sebuah kebijakan. Oleh karena itu, beberapa sasaran utama yang ingin dicapai dalam laporan ini adalah 1) memastikan implementasi kebijakan melalui serangkaian pemantauan yang dilakukan secara triwulan; 2) meninjau dampak dari kebijakan yang telah diimplementasikan; dan 3) memproyeksikan situasi dan kebutuhan akan datang dari situasi terkini.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan evaluasi ini meliputi pada indikator capaian Prioritas Nasional 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, utamanya pada Program Prioritas Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri dan turunannya yang tertuang pada RPJMN 2020-2024 dan RKP 2022. Selain itu, terdapat pula beberapa isu tematik yang akan turut dievaluasi mempertimbangkan pengaruhnya terhadap progres pembangunan nasional secara umum, seperti diplomasi ekonomi, dan infrastruktur diplomasi.

1.4. Keluaran dan Hasil yang Diharapkan

Laporan evaluasi terhadap prioritas nasional bidang politik luar negeri dan kerja sama pembangunan internasional pada tingkat indikator kinerja utama diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap capaian kebijakan yang terefleksikan dari data dan informasi terkait indikator kinerja masing-masing arah kebijakan dan strategi. Terlebih, laporan evaluasi yang tersusun dapat memberikan masukan atas perkembangan lingkungan strategis, baik yang berdampak langsung ataupun tidak, kepada para pemangku kepentingan. Laporan akhir evaluasi ini tentu, sebagaimana sasaran utama di atas, akan bermanfaat bagi Bappenas, utamanya Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional, dalam menyusun, menyempurnakan, dan mengawal lebih lanjut perencanaan

pembangunan nasional di sektor politik luar negeri dan kerja sama pembangunan internasional pada setiap dokumen perencanaan pemerintah mendatang.

Bab II

METODOLOGI

Penyusunan laporan evaluasi ini akan menggunakan dua metode analisis, yaitu analisis celah (*gap analysis*) dan analisis dampak (*policy impact analysis*). Penggunaan kedua metode analisis ditujukan untuk menggali relasi antara indikator kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan dampak yang diharapkan dari pelaksanaan kebijakan tersebut, apakah mengubah status quo atau tidak, serta lebih dalam melihat perubahan yang terjadi apakah berdampak negatif atau positif. Adapun alur pelaksanaan evaluasi akan dilakukan sebagaimana Bagan 1.

Bagan 1. Lini Pelaksanaan Evaluasi

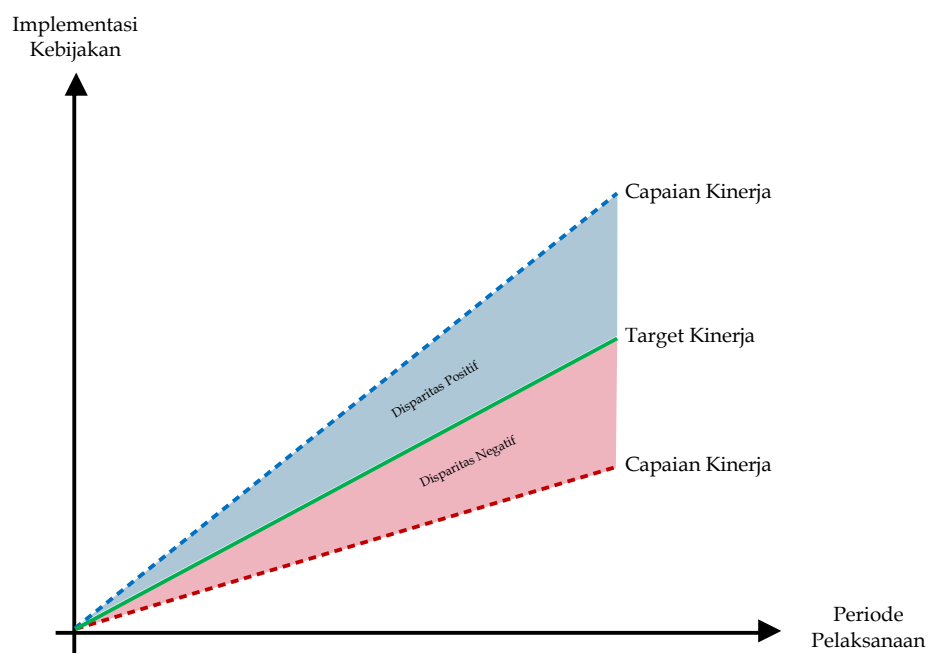


Penggunaan analisis celah dalam pelaksanaan evaluasi ditujukan untuk melakukan komparasi antara target dan capaian kinerja yang direalisasikan oleh unit instansi terkait, dan kemudian mengidentifikasi perbedaan atau disparitas di antara keduanya.¹ Metode ini berguna dan dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang. Dengan melakukan komparasi maka dapat terpetakan selisih dari capaian kinerja apakah telah sesuai target atau terdapat jarak yang positif ataupun negatif terhadap target awal perencanaan. Metode ini bermanfaat dalam aspek evaluasi

¹ ESCWA, "Policy Gap Analysis: An Examination of the Policy-based Gaps Hindering Syrian Arab Republic's Peacebuilding Process," (Beirut: UN, 2020).

utamanya 1) memahami perbedaan antara capaian saat ini dan tujuan yang diinginkan; 2) mengidentifikasi target-target yang dinilai menghadapi tantangan yang cukup tinggi dalam pengerjaannya; 3) merumuskan sejumlah strategi alternatif pembangunan sebagai upaya adaptasi terhadap perkembangan situasi dan kondisi lingkungan strategis yang semakin dinamis.

Bagan 2. Analisis Celah Target dan Capaian Kinerja



Umumnya dalam menjalankan analisis celah akan dimulai dengan memetakan dan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target yang direncanakan. Pemetaan tersebut ditelaah lebih dalam untuk mengidentifikasi masalah yang timbul dari disparitas yang mengemuka dan merumuskan serangkaian alternatif solusi dan rekomendasi sebagai langkah perbaikan untuk perencanaan target pembangunan². Berikut adalah langkah-langkah umum dalam menjalankan analisis celah:




1. **Penentuan Tujuan Evaluasi:** Langkah pertama adalah menentukan apa yang ingin dicapai atau kondisi yang ditargetkan. Hal ini bisa berupa tujuan ekonomi, kebijakan, rencana strategis, atau indikator kinerja tertentu.
2. **Identifikasi Capaian Kinerja:** Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi dan mendokumentasikan capaian ataupun situasi yang ada. Deskripsi yang ditangkap dapat mencakup proses bisnis yang berjalan, infrastruktur

² Andreja Pucihar, et al., "Gap Analysis Methodology for Identifying Future Ict Related eGovernment Research Topics - Case of "Ontology and Semantic Web" in the Context of eGovernment," (Bled: Conference, 2007).

penunjang, sumber daya manusia, ataupun kebijakan yang berlaku yang merefleksikan terhadap capaian tersebut.

3. **Identifikasi Target Kinerja:** Setelah kondisi saat ini telah teridentifikasi dan dipahami, penentuan kondisi atau target ideal yang diinginkan atau tujuan yang ingin dicapai sebagai parameter perbandingan kinerja yang akan dilakukan.
4. **Analisis Celah:** Perbandingan antara target dan capaian dilakukan melalui identifikasi perbedaan yang muncul di antara keduanya. Analisis yang dihasilkan dapat berupa perbedaan antara target dan capaian dalam aspek proses, pengetahuan, kebijakan, hingga sumber daya.
5. **Identifikasi Faktor Penyebab:** Setelah perbedaan telah diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menentukan faktor utama penyebab celah tersebut. Apa faktor yang menghambat atau menstimulasi sehingga terdapat perbedaan dari yang ditargetkan.
6. **Tindak Lanjut dan Mitigasi:** Setelah variabel intervensi telah teridentifikasi, tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah penyusunan mekanisme alternatif dalam mencapai target ataupun mitigasi skenario apabila target yang ditetapkan terlalu tinggi dengan kondisi saat ini. Sedangkan, jika diskrepansi positif yang timbul maka dapat dirumuskan skenario perencanaan lebih luas untuk mengembangkan kebijakan secara komprehensif.
7. **Implementasi dan Pemantauan:** Implementasi tindak lanjut sebagai tindakan perbaikan harus diterapkan dan terus dipantau perkembangannya. Perlu dipastikan untuk mengukur kemajuan target sesuai dengan perencanaan dan menyiapkan mitigasi ataupun skenario cadangan sebagai tindakan korektif apabila terdapat kendala yang kembali muncul.

Tabel 1. Kategori Kriteria Capaian Kinerja

Simbol	Warna	Kriteria	Kategori
	Hijau	Tingkat realisasi > 90%	Baik
	Kuning	Tingkat realisasi 60 - 90%	Cukup Baik
	Merah	Tingkat realisasi < 60%	Kurang Baik

Untuk memudahkan penilaian pelaksanaan sebuah program dan kegiatan maka akan digunakan kriteria tingkat ketercapaian secara umum yang disandingkan dengan masing-masing indikator program dan kegiatan. Adapun kategorisasi kriteria yang dimaksud adalah sebagaimana Tabel 1.

Untuk mempertajam analisis revidisparitas yang dilakukan akan ditambahkan pula penggunaan analisis dampak yang berguna dalam memperlihatkan situasi secara komprehensif sebelum dan setelah diimplementasikannya sebuah kebijakan. Metode Analisis Dampak adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk mengevaluasi dampak dari kebijakan pemerintah terhadap berbagai aspek dalam masyarakat, ekonomi, lingkungan, atau sektor lainnya.³ Tujuan utama metode ini adalah untuk mengidentifikasi konsekuensi dan dampak kebijakan yang diusulkan ataupun yang telah diterapkan, baik yang diharapkan maupun yang tidak diinginkan. Berikut adalah langkah-langkah lebih lanjut yang akan dilalui dalam mengimplementasikan analisis dampak:

1. **Penentuan Kebijakan:** Mengidentifikasi dan mendefinisikan kebijakan yang akan dievaluasi merupakan langkah awal dalam pelaksanaan analisis dampak. Kebijakan yang dimaksud dapat berupa kebijakan pemerintah seperti undang-undang, peraturan, atau program-program sosial, atau kebijakan internal dalam sebuah instansi.
2. **Identifikasi Dampak:** Pasca penentuan kebijakan, diidentifikasi potensi ataupun kondisi riil dari implikasi yang tercipta sebagai akibat dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Dampak bisa bersifat positif (peningkatan pertumbuhan ekonomi) atau negatif (degradasi lingkungan).
3. **Penentuan Indikator:** Dampak-dampak yang telah teridentifikasi akan diturunkan dalam bentuk indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur dampak tersebut secara kuantitatif.
4. **Pengumpulan Data:** Penjarangan data yang diperlukan untuk melakukan analisis dampak dikumpulkan melalui berbagai metode apakah melalui data primer ataupun sekunder yang dapat merepresentasikan implikasi dari sebuah kebijakan. Umumnya data ini mencakup data historis, data teritorial, dan lain sebagainya yang dapat membantu memberikan gambaran situasi sebelum dan setelah pelaksanaan kebijakan.
5. **Analisis Dampak:** Dalam langkah ini, pembangunan analisis dan hipotesis terhadap data yang telah dikumpulkan dan dampak kebijakan pada indikator yang telah ditentukan.

³ NONIE, "Impact Evaluations and Development: NONIE Guidance on Impact Evaluation," (Washington DC: World Bank, 2009)

6. **Evaluasi Dampak:** Hasil analisis kemudian dievaluasi untuk menentukan apakah dampak kebijakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan atau sejalan dengan rencana kebijakan. Dampak-dampak yang tidak diinginkan atau yang tidak sesuai dengan tujuan kebijakan akan menjadi catatan untuk ditindaklanjuti dan dimitigasi secara cepat.
7. **Rekomendasi:** Berdasarkan hasil analisis dampak akan dipersiapkan rekomendasi kebijakan, baik perbaikan, perubahan ataupun tindakan korektif lainnya. Rekomendasi ini dapat digunakan untuk membantu pembuat kebijakan membuat keputusan dengan hasil evaluasi empiris.

Guna menyederhanakan analisis dampak atas kebijakan yang dilakukan, utamanya pada langkah nomor 2 dan 3, maka digunakan spektrum penilaian terhadap pelaksanaan sebuah program dan kegiatan. Penilaian yang dilakukan menggunakan pertimbangan sejumlah indikator relevan. Ukuran spektrum tersebar dari angka 1 (sangat rendah) hingga angka 5 (sangat tinggi) sehingga analisis dampak yang dihasilkan dapat mengidentifikasi sejauh apa efektivitas kebijakan yang diimplementasikan, apakah diperlukan intensifikasi strategi, diversifikasi kebijakan, ataupun pengubahan arah strategi dan kebijakan dalam mencapai hasil yang ditargetkan. Adapun spektrum yang dimaksud sebagaimana terlihat pada Bagan 3.

Bagan 3. Spektrum Penilaian Dampak Capaian Kinerja



Lebih lanjut, pelaksanaan evaluasi yang dilakukan juga akan mengelaborasi variabel-variabel penentu yang mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan dari kebijakan ataupun program dan kegiatan yang dijalankan. Hal tersebut penting dilakukan melalui kedua metode tersebut untuk membantu memitigasi risiko dan memastikan bahwa kebijakan, program hingga strategi yang diterapkan sesuai dengan tujuan yang diinginkan serta penetapan target yang diusulkan cukup rasional untuk berhasil.

Bab III

TELAAH GAGASAN DAN PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

3.1. Telaah Gagasan

Bagian ini menggali perkembangan kerangka pikir relasi antara kapasitas *power* dan hubungan antarnegara dalam menentukan pembangunan kebijakan luar negeri yang diimplementasikan sebagai panduan dalam membangun studi evaluasi. Dengan melihat kapasitas *power* diharapkan dapat melihat apakah pembangunan kebijakan luar negeri memiliki dampak terhadap upaya memperkuat pembangunan kekuatan. Sementara hubungan antarnegara akan memperlihatkan posisi Indonesia di fora internasional dan bagaimana Indonesia berinteraksi dengan negara lain untuk memenuhi kepentingan nasional.

3.1.1. Perkembangan Kekuatan Negara

Konsep *power* menjadi elemen kunci yang menentukan dinamika antarnegara dalam hubungan internasional atau kebijakan luar negeri yang akan diambil oleh sebuah negara. Spektrum *power* itu sendiri umumnya terbagi dalam tiga jenis, spektrum psikologis, spektrum relatif, dan spektrum spasial.⁴ Pada spektrum psikologis, *power* didefinisikan sebagai kemampuan sebuah entitas dalam mengontrol perilaku dan cara pikir objek lainnya. Secara psikologis, hal tersebut dapat dimaknai sebagai kemampuan pemengaruh untuk mengikuti keinginan entitas yang memiliki *power*. Di sisi lain, *power* tersebut juga dapat dimaknai secara negatif sejauh mana entitas tersebut membatasi objek lain dalam menentukan ruang gerak yang diinginkannya. Lebih jauh, *power* dipandang dalam aspek bagaimana hasil akhir (*outcome*) dapat dikontrol.

Sementara itu, pada spektrum relative, *power* merupakan salah satu kriteria dari sebuah entitas menentukan/ditentukan posisi relatifnya dalam sebuah hubungan ataupun sistem. Dengan kata lain, *power* sebuah entitas hanya dapat ditentukan dengan hubungan yang terjalin dengan objek lainnya. Apabila tidak terdapat interaksi antarentitas maka eksistensi *power* tidak akan muncul. Di lain sisi, *power* dapat meningkat atau menurun secara relatif dan absolut. Hal tersebut diakibatkan

⁴ Insu Choi, "Small States and The Balance of Power," (California: Naval Postgraduate School, 1995)

adanya penurunan ataupun kesenjangan yang muncul pada suatu aspek secara relatif walaupun pertumbuhan absolut tersebut tetap terjadi. Oleh karena itu, *power* tidak bersifat statis tetapi dinamis menyesuaikan kapasitas antarentitas.

Secara spasial, *power* menyebar dari wilayah *core* ke wilayah *periphery* melalui beragam bentuk seperti perdagangan, penanaman modal asing, dan transfer teknologi sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi baru di luar wilayah *core*. Hal yang sama juga terjadi pada aspek pertahanan di mana penyebaran teknologi modern akan meningkatkan kapasitas kekuatan entitas di wilayah *periphery*.

Secara tradisional komponen dari *power* mencakup berbagai elemen seperti kekuatan militer, ekonomi, politik, hingga kapasitas organisasional.⁵ Kepemilikan komponen tersebut, baik kualitatif ataupun kuantitatif, akan menentukan hierarki kekuatan dalam hubungan internasional. Dengan terbaginya negara dalam kelas-kelas tertentu maka akan memproyeksikan interaksi sejauh mana suatu negara dapat memengaruhi peristiwa dan keputusan di tingkat global.

Hierarki karakterisasi tersebut terbagi dalam empat tingkatan. Pertama, Negara atau Kekuatan Adidaya (*Great Power*) adalah negara yang memiliki pengaruh signifikan dalam skala global. Mereka memiliki kekuatan ekonomi yang besar, kekuatan militer yang kuat, dan sering kali memainkan peran sentral dalam kebijakan internasional.

Kedua, Negara Menengah atau Kekuatan Bakalan Baru (*Emerging Middle Power*) negara-negara yang memiliki tingkat kekuatan yang lebih rendah dibandingkan dengan negara adidaya, tetapi masih memiliki pengaruh yang cukup besar di tingkat regional atau bahkan global. Umumnya mereka dapat memainkan peran mediasi, mengambil inisiatif diplomatik, dan mempengaruhi kebijakan global dalam kapasitas tertentu.

Ketiga, Negara Pengaruh Kawasan atau Kekuatan Kawasan (*Regional Power*) negara-negara yang memiliki pengaruh terbesar di dalam suatu wilayah geografis. Mereka mungkin memiliki kekuatan ekonomi, militer, dan politik yang signifikan dalam lingkup regional, tetapi pada saat yang sama kurang memiliki dampak di tingkat global.

Terakhir, keempat, Negara Kecil atau Kekuatan Lemah (*Small Power*) adalah negara-negara yang memiliki pengaruh terbatas baik di tingkat regional maupun global. Mereka mungkin memiliki kekuatan ekonomi yang relatif kecil dan sering

⁵ Hans J. Morgenthau, "Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace," (New York: Knopf, 1985)

kali bergantung pada kerja sama internasional untuk mempengaruhi keputusan dan peristiwa.

Hierarki kekuatan ini tidak bersifat statis dan dapat berubah seiring waktu berdasarkan perubahan dalam kekuatan ekonomi, politik, atau militer suatu negara. Selain itu, konsep *power* dalam hubungan internasional juga melibatkan *soft power* (pengaruh budaya dan diplomasi) serta *smart power* (kombinasi antara *hard power* dan *soft power*) sebagai elemen penting dalam pengukuran pengaruh suatu negara di dunia.

3.1.2. Dinamika Hubungan Antarnegara dalam Sistem Internasional

Setelah mendefinisikan *power* yang melekat dalam setiap negara dan sifatnya, selanjutnya perlu dipahami interaksi yang akan timbul antarnegara yang memiliki kapasitas *power* beragam. Dinamika hubungan antarnegara dalam sistem internasional dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah perkembangan geopolitik dan geoekonomi. Geopolitik, yang merupakan interaksi politik internasional di ruang geografi tertentu, melibatkan persaingan antara negara-negara, terutama negara hegemonik dengan revisionis, untuk menetapkan pengaruhnya pada kawasan ataupun sistem internasional secara menyeluruh.⁶ Sementara itu, geoekonomi menggunakan kekuatan ekonomi sebagai alat proyeksi kekuatan internasional dengan fokus pada perdagangan bebas, investasi, dan keuangan.⁷

Dalam konteks analisis dinamika geopolitik dan geoekonomi, perhatian utama tertuju pada sejumlah anggota G20 dan anggota ASEAN yang menjadi mitra utama Indonesia. Adanya variabel-variabel geopolitik yang menjadi acuan melibatkan pola relasi antarnegara, polaritas kekuatan global, karakter rezim pemerintahan, tren demografi dunia, dan kemampuan proyeksi pengaruh. Pola relasi antarnegara akan menentukan status quo dan potensi friksi antara negara hegemon dan pesaingnya, yang mungkin menghasilkan transisi kekuatan global. Polaritas kekuatan mencerminkan cakupan pengaruh kedua negara dalam membentuk kubu di tatanan internasional.

Pola relasi dan polaritas kekuatan merupakan dua hal yang paling utama dalam melihat tatanan dunia internasional apakah akan tetap stabil atau akan terdapat

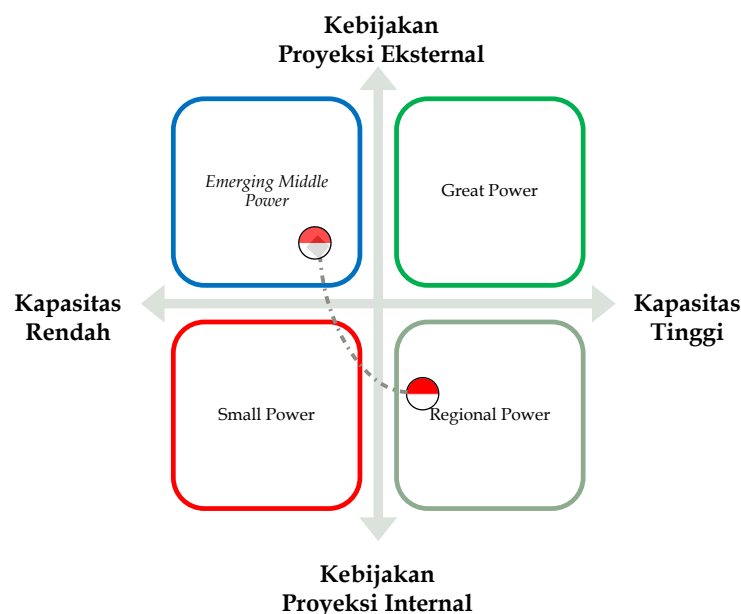
⁶ David Crikemans, "Geopolitics and International Relations: Grounding World Politics A New," (Leiden: Brill Nijhoff, 2022).

⁷ Joachim Klement, "Geo-Economics: The Interplay between Geopolitics, Economics, and Investments," (CFA Institute Research Foundation, 2021).

friksi berujung perang hegemoni yang menciptakan transisi kekuasaan.⁸ Status quo akan terjaga apabila pembangunan kekuatan negara-negara di dunia, utamanya *great power* dan *emerging-middle power*, mengarah kepada perimbangan kekuatan (*balance of power*). Negara-negara besar melakukan modernisasi hanya ditujukan untuk memperbarui teknologi pengamanannya teritorinya dan perbandingan jumlah kepemilikannya cukup proporsional antara satu sama lain dengan kebijakan berfokus pada internal.

Sementara itu, transisi kekuasaan akan terjadi dengan pembangunan kekuatan yang mengarah kepada perlombaan penguasaan senjata. Negara revisionis mempercepat penguasaan senjata teknologi tinggi secara masif sehingga dapat menyamai dan membalikkan perimbangan kekuatan yang mendasari tatanan global akibat kebijakan yang cenderung berfokus pada eksternal. Momentum tersebut akan menciptakan perang hegemoni, selayaknya Jerman menginvasi Prancis dan Rusia pada Perang Dunia I ataupun Jepang menyerang Amerika Serikat pada Perang Dunia II. Apabila disandingkan dengan hierarki kekuatan dari penjelasan sebelumnya maka Indonesia tergolong sebagai *regional power* yang sewaktu-waktu dapat bergeser menjadi *emerging-middle power* sebagaimana terlihat pada Bagan 4.

Bagan 4. Pemetaan Kekuatan Negara berdasar Kapasitas dan Adopsi Kebijakan



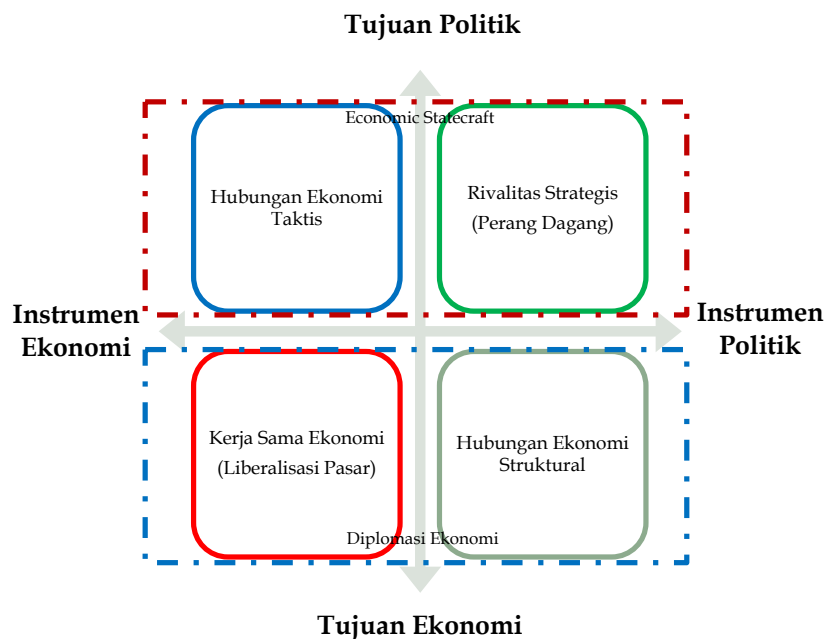
Sedangkan, variabel geoekonomi terdiri dari komoditas strategis, rezim perdagangan, rantai pasok, rezim fiskal dan moneter, serta karakter pendapatan

⁸ Adrian Pop, "Power Transition and Balance of Power: Comprehending the Power Dynamics of the 21st Century," *Public Administration & Regional Studies* 19, No. 1 (2017), Galati University Press

negara. Fokus pada komoditas pangan dan energi menjadi penting, karena diprediksi akan mengalami gejolak akibat perkembangan geopolitik. Analisis rezim perdagangan melibatkan pengamatan terhadap kebijakan proteksionisme atau interdependensi global yang dapat mempengaruhi stabilitas rantai pasok dunia. Rezim fiskal dan moneter menjadi pertimbangan untuk memproyeksikan potensi krisis ekonomi, sementara karakter pendapatan negara memberikan referensi mengenai pengaruh ekonomi dan hasil dari kebijakan yang diambil.

Lebih dalam lagi pada dinamika geoekonomi, diplomasi ekonomi cukup kental dipergunakan oleh negara besar dalam mengejar kepentingan nasionalnya sebagaimana terlihat pada Bagan 5. Diplomasi Ekonomi merupakan kebijakan yang digunakan seluruh negara dalam memanfaatkan instrumen ekonomi dalam memaksimalkan keuntungan ekonomi yang akan diperoleh.⁹ Upaya ini umumnya berupa negosiasi terhadap pembukaan akses pasar serta liberalisasi perdagangan yang terwujud dalam kesepakatan internasional, contohnya Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement ataupun Indonesia-EFTA Free Trade Agreement.

Bagan 5. Spektrum Diplomasi Ekonomi dan Economic Statecraft



Sementara itu, *economic statecraft* adalah sisi lain dari koin diplomasi ekonomi. Kebijakan *economic statecraft* ditujukan kepada penggunaan ekonomi sebagai instrumen untuk memaksimalkan kepentingan nasional, baik ekonomi ataupun

⁹ Okano-Heijmans, M., "Conceptualizing Economic Diplomacy: The Crossroads of International Relations, Economics, IPE and Diplomatic Studies," *The Hague journal of Diplomacy* 6 (2011): 23-28.

politik-keamanan. Penggunaannya dapat dibedakan menjadi dua, persuasi ekonomi dan koersi ekonomi.¹⁰ Persuasi ekonomi berfokus pada strategi pemberian insentif yang menciptakan *quid pro quo* terhadap dua negara/entitas. Di sisi lain, koersi ekonomi merupakan strategi ancaman yang dipergunakan untuk mendisrupsi postur ekonomi sebuah negara/entitas lain sampai pemenuhan kepentingan nasional negara/entitas terkait terpenuhi.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, analisis dinamika geopolitik dan geoekonomi menjadi krusial dalam mengidentifikasi interaksi antara variabel eksternal dan internal suatu negara terhadap wilayah tertentu. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap dinamika ini menjadi kunci bagi negara-negara G20 dan ASEAN serta pentingnya untuk mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat guna menjaga kestabilan dan kesejahteraan dalam sistem internasional yang selalu berubah.

3.2. Lingkungan Strategis 2021 dan 2022

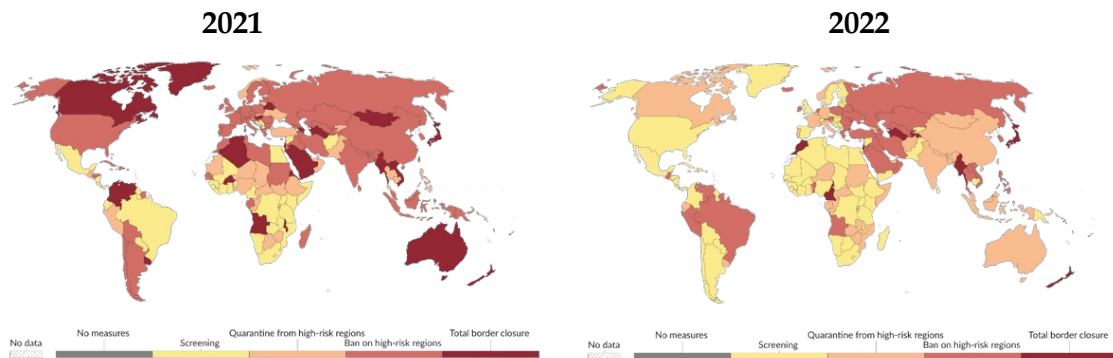
3.2.1. Pandemi COVID-19

Sepanjang tahun 2021, pandemi Covid-19 masih melanda seluruh dunia. Dua varian baru muncul dengan tingkat penyebaran yang cukup tinggi yaitu varian Delta dan Omicron. Pandemi telah menggerus berbagai aspek kehidupan mulai dari interaksi sosial hingga aktivitas ekonomi pembangunan. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak tahun 2019 terus berlanjut hingga tahun 2021, meninggalkan dampak serius pada berbagai aspek kehidupan global. Salah satu dampak paling signifikan adalah terhadap ekonomi global. *Lockdown* dan pembatasan mobilitas yang diberlakukan oleh banyak negara untuk mengendalikan penyebaran virus telah menyebabkan resesi ekonomi di berbagai belahan dunia sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.¹¹ Banyak perusahaan gulung tikar, jutaan orang kehilangan pekerjaan, dan sektor-sektor seperti pariwisata dan hiburan hampir lumpuh karena pembatasan tersebut.

¹⁰ Michael Mastanduno, "Economics and Security in Statecraft and Scholarship," *International Organization* 52, No. 4 (1998).

¹¹ The Conversation, "What we learned from tracking every COVID policy in the world," diakses 14 November 2023 <https://theconversation.com/what-we-learned-from-tracking-every-covid-policy-in-the-world-157721>

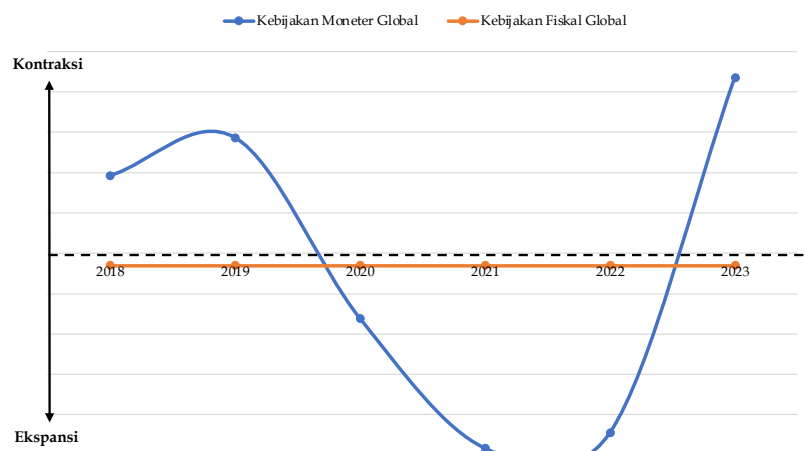
Gambar 1. Tren Restriksi Mobilitas Global 2021-2022



Sumber: OurWorldinData, 2023

Penerapan kebijakan restriksi mobilitas lintas negara menjadi kunci dalam upaya penanggulangan pandemi. Negara-negara menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan antara melindungi kesehatan masyarakat dan menjaga kelangsungan ekonomi. Beberapa negara menerapkan *lockdown* total, sementara yang lain memilih pendekatan yang lebih fleksibel dengan pembatasan yang lebih ringan. Terlepas dari perbedaan pendekatan ini, kolaborasi internasional menjadi esensial untuk menghadapi pandemi, dengan negara-negara bekerja sama dalam pertukaran informasi dan sumber daya seperti pembentukan Travel Corridor lintas negara.¹²

Grafik 1. Tren Kebijakan Moneter dan Fiskal Global 2018-2019

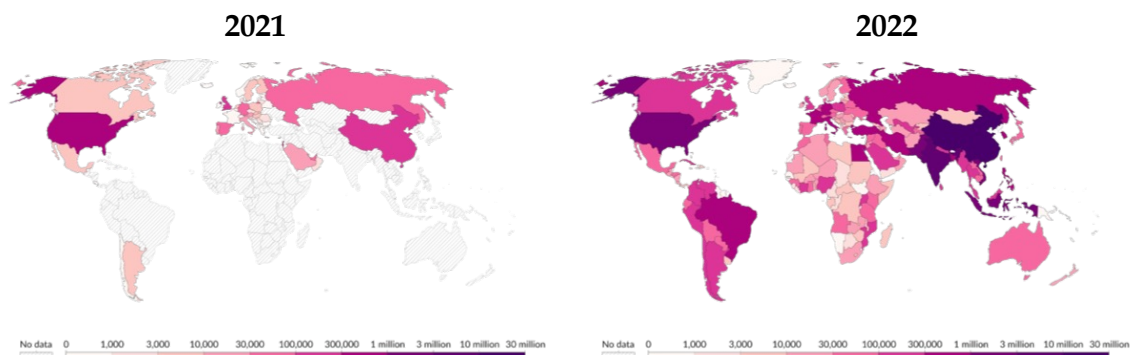


¹² TTR Weekly, "Indonesia mulls travel corridor to Bali," diakses pada 14 November 2023 <https://www.ttrweekly.com/site/2021/02/indonesia-mulls-travel-corridor-to-bali/>

Kebijakan moneter pada masa pandemi didominasi oleh kebijakan ekspansif untuk merespons deflasi dan turunnya daya beli masyarakat. Kebijakan tersebut dilakukan dengan memangkas suku bunga agar perekonomian nasional dapat terpacu kembali. Sementara itu, kebijakan fiskal dunia bekerja cukup keras sebagai stabilisator menghadapi tingginya angka inflasi pada fase pemulihan pasca pandemi COVID-19 sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 1.

Sementara itu, penguasaan vaksin oleh negara maju menjadi sorotan utama dalam pertarungan melawan COVID-19. Beberapa negara mampu mengamankan pasokan vaksin dalam jumlah besar, sementara negara-negara berkembang berjuang untuk mendapatkan akses yang memadai.¹³ Ketidaksetaraan ini menyebabkan pergeseran kekuatan geopolitik, di mana negara-negara maju yang memiliki lebih banyak akses terkadang menggunakan keuntungan tersebut dalam diplomasi vaksin. Hal ini menimbulkan pertanyaan etika dan keadilan terkait distribusi vaksin secara global sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.

Gambar 2. Tren Distribusi Vaksin COVID-19



Sumber: OurWorldinData, 2023

Upaya distribusi vaksin ke negara-negara berkembang menjadi fokus upaya global untuk mengakhiri pandemi. Berbagai inisiatif internasional, seperti COVAX, berusaha memastikan bahwa negara-negara yang memiliki keterbatasan akses dapat memperoleh vaksin secara merata. Meskipun demikian, tantangan logistik, distribusi, dan infrastruktur kesehatan di negara-negara berkembang membuat proses ini menjadi lebih kompleks. Dengan demikian, ketidaksetaraan akses vaksin tetap menjadi tantangan krusial dalam upaya global untuk mengatasi pandemi COVID-19.

¹³ Al-Jazeera, "Rich nations 'hoarding' a billion doses of excess COVID vaccine." diakses pada 14 November 2023 <https://www.aljazeera.com/news/2021/2/19/covid-vaccine>

Secara keseluruhan, tahun 2021 adalah tahun di mana dunia berjuang untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19. Terlepas dari tantangan ekonomi, restriksi mobilitas, dan ketidaksetaraan akses vaksin, kolaborasi internasional dan komitmen bersama menjadi kunci untuk melawan pandemi ini. Kesadaran akan pentingnya solidaritas global dan distribusi yang adil dari sumber daya kesehatan menjadi pelajaran berharga untuk masa depan, dengan harapan bahwa upaya bersama ini akan membantu dunia pulih dan membangun ketahanan terhadap tantangan kesehatan global di masa yang akan datang.

3.2.2. Rivalitas Amerika Serikat - Tiongkok

Pada tahun 2021, hubungan AS - Tiongkok mengalami perkembangan yang signifikan, dengan pemerintahan Biden yang mengadopsi pendekatan berbeda yang menekankan persaingan dan kerja sama.¹⁴ Pelantikan Presiden Joe Biden menandai perubahan dari kebijakan pemerintahan sebelumnya, dengan fokus baru dalam mengatasi tantangan global secara kolaboratif, khususnya di bidang-bidang seperti perubahan iklim.

Ketegangan perdagangan antara kedua raksasa ekonomi ini terus berlanjut, dengan AS dan Tiongkok mempertahankan tarif yang ditetapkan selama perang dagang sebelumnya. Pembicaraan dilakukan untuk mengatasi masalah perdagangan dan implementasi perjanjian perdagangan Fase Satu yang ditandatangani pada tahun 2020, yang mencerminkan saling ketergantungan ekonomi yang kompleks antara kedua negara.

Meningkatnya persaingan teknologi dan kekhawatiran terhadap ancaman keamanan siber menegaskan persaingan strategis di bidang teknologi maju. AS mengambil tindakan untuk membatasi akses Tiongkok terhadap teknologi penting, yang mencerminkan upaya yang lebih luas untuk melindungi kepentingan keamanan nasional.

Masalah hak asasi manusia, khususnya terkait perlakuan terhadap Muslim Uighur di Xinjiang, masih menjadi isu kontroversial. AS dan sekutunya menjatuhkan sanksi terhadap pejabat dan entitas Tiongkok yang diduga terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, dengan menekankan pentingnya menangani pertimbangan etis dalam hubungan diplomatik.

¹⁴ Andrew Mullen, "US-China trade war: timeline of key dates and events since July 2018," diakses pada 14 November 2023 <https://www.scmp.com/economy/global-economy/article/3177652/us-china-trade-war-timeline-key-dates-and-events-july-2018>

Ketegangan di Selat Taiwan meningkat, dengan Tiongkok meningkatkan aktivitas militer di dekat Taiwan. AS menegaskan kembali komitmennya terhadap keamanan Taiwan, dan diskusi pun berkembang mengenai potensi penguatan hubungan antara AS dan Taiwan, yang berkontribusi terhadap kompleksitas geopolitik kawasan secara keseluruhan.

Terlepas dari perselisihan ini, pertemuan bilateral tingkat tinggi tetap dilakukan, terutama pembicaraan antara Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan, dan rekan-rekan mereka dari Tiongkok di Alaska. Diskusi-diskusi ini membahas berbagai isu dan menentukan arah hubungan diplomatik di masa depan.

Rantai pasokan dan teknologi global muncul sebagai titik fokus penting, dimana kedua negara berupaya mengamankan rantai pasokan mereka, khususnya di bidang-bidang seperti semikonduktor dan mineral tanah jarang. Tujuan A.S. untuk mengurangi ketergantungan pada rantai pasokan Tiongkok, menyoroti kekhawatiran mengenai kerentanan ekonomi.

Selain persaingan perdagangan dan ekonomi, AS dan Tiongkok terlibat dalam persaingan strategis yang lebih luas, mencakup bidang inovasi dan teknologi. Kedua negara berupaya meningkatkan daya saing dan kapasitas inovasi mereka, dengan menyadari pentingnya kepemimpinan teknologi di abad ke-21.

Menariknya, meskipun ada ketegangan geopolitik, AS dan Tiongkok memiliki kesamaan dalam hal perubahan iklim. Kedua negara terlibat dalam diskusi dan mengumumkan kerja sama dalam inisiatif tertentu terkait iklim, mengakui tanggung jawab bersama negara-negara besar dalam mengatasi tantangan lingkungan hidup global.

Pada tahun 2022 ketegangan yang terus meningkat antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok, tercermin dari serangkaian peristiwa signifikan.¹⁵ Kedatangan Speaker Nancy Pelosi di Taiwan, yang diikuti oleh latihan militer, menjadi pemicu ketegangan baru dalam hubungan bilateral kedua negara. Tindakan tersebut memicu respons dari pihak Tiongkok yang membatalkan dan menanggukkan beberapa pembicaraan serta kerja sama dengan AS, sementara memberlakukan sanksi terhadap Pelosi. Ketegangan semakin memuncak ketika Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (USTR) menguatkan persaingan dengan Tiongkok dalam laporannya, menandakan fokus yang terus meningkat pada aspek ekonomi dalam rivalitas kedua negara.

¹⁵ Mullen, "US-China."

Namun, dalam konteks ini, terdapat beberapa momen yang mencerminkan upaya untuk menjaga dialog dan mencegah eskalasi lebih lanjut. Presiden AS Joe Biden, meskipun telah menghapus bahasa kunci mengenai sikap terhadap Taiwan, secara tegas menunjukkan kesiapannya untuk membela Taiwan secara militer. Langkah-langkah ini menunjukkan dinamika kompleks dalam pendekatan AS terhadap isu-isu regional yang sensitif.

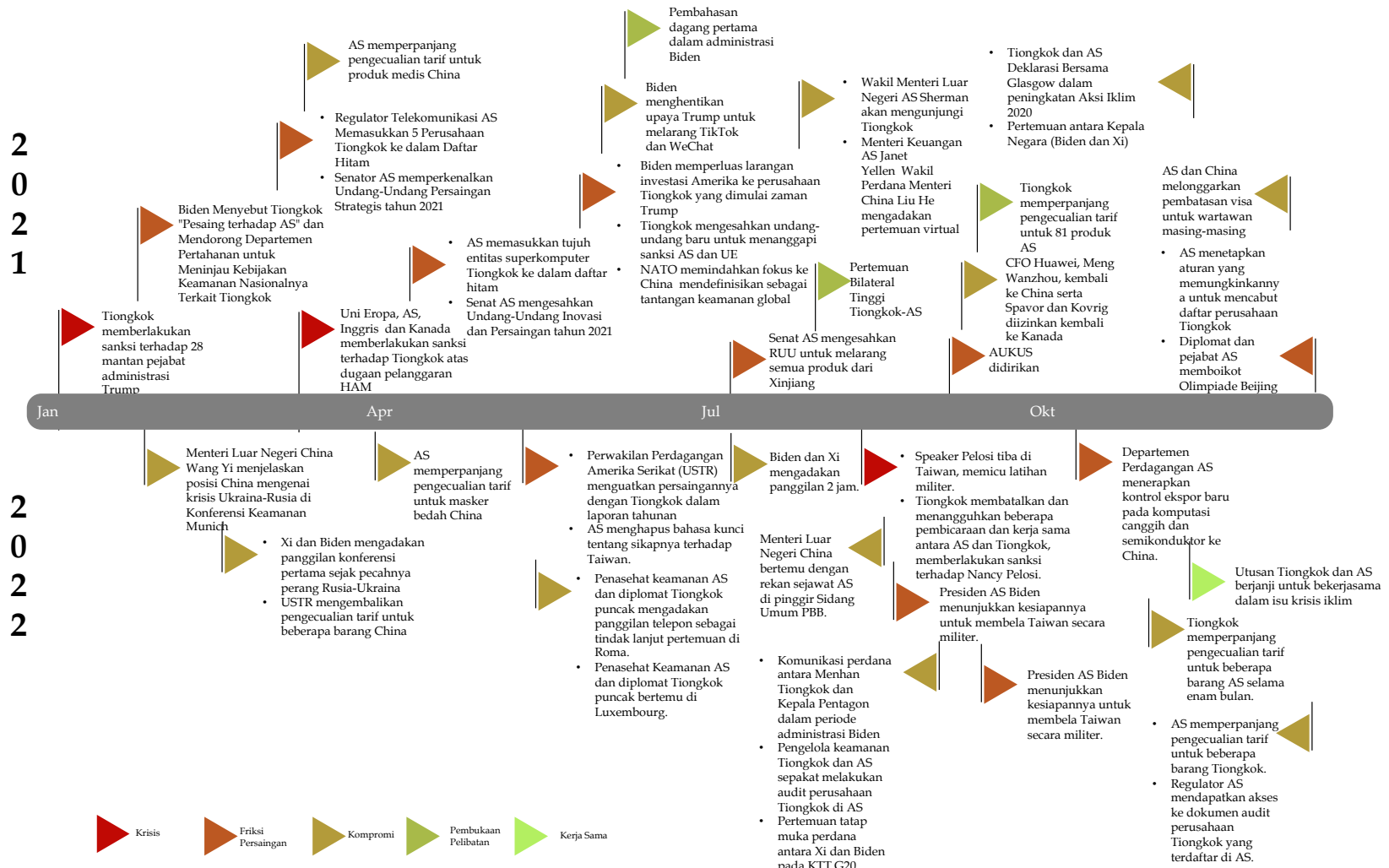
Dalam ranah kebijakan luar negeri dan hak asasi manusia, Undang-Undang Pencegahan Tenaga Kerja Paksa Uygur AS mulai berlaku, menunjukkan perhatian terus-menerus terhadap isu pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang, Tiongkok. Langkah-langkah lainnya termasuk penambahan entitas Tiongkok ke dalam daftar kontrol ekspor AS dan penerapan kontrol ekspor baru pada komputasi canggih dan semikonduktor ke Tiongkok oleh Departemen Perdagangan AS, menunjukkan upaya untuk mengendalikan transfer teknologi ke Tiongkok.

Sementara itu, hubungan diplomatik tetap aktif dengan pertemuan antara Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dan rekan sejawat AS di Sidang Umum PBB. Penjelasan Wang Yi mengenai posisi Tiongkok terkait krisis Ukraina-Rusia di Konferensi Keamanan Munich menunjukkan upaya untuk menjelaskan pandangan Tiongkok di tingkat internasional.

Pertemuan tatap muka perdana antara Presiden Xi Jinping dan Presiden Joe Biden pada KTT G20 menciptakan momen penting dalam hubungan bilateral. Meskipun terjadi dalam konteks pertemuan multilateral, dialog langsung ini memberikan kesempatan bagi kedua pemimpin untuk membahas isu-isu krusial dan mencari titik temu.

Pada akhirnya, pertemuan utusan Tiongkok dan AS yang berjanji untuk bekerja sama dalam mengatasi krisis iklim menunjukkan adanya area di mana kedua negara dapat mencapai kesepakatan bersama di tengah rivalitas mereka. Namun, ketegangan yang terus-menerus dan berbagai momentum tersebut menandai dinamika kompleks dalam hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok pada tahun 2022, menegaskan kompleksitas dan tantangan di antara dua kekuatan global ini.

Bagan 6. Tren Hubungan Rivalitas Amerika Serikat - Tiongkok



3.2.3. Dinamika Lingkungan Kawasan

Kawasan Asia-Pasifik dan Asia Tenggara menjadi salah satu titik utama dinamika geopolitik yang signifikan selama tahun 2021, menyoroti sejumlah tantangan dan peluang yang mempengaruhi stabilitas dan perkembangan regional.

Tantangan utama terletak pada persaingan ketat antara dua kekuatan besar, Amerika Serikat dan Tiongkok. Kedua negara ini bersaing dalam berbagai bidang, menciptakan ketegangan yang berpotensi merugikan stabilitas kawasan Asia-Pasifik.¹⁶ Laut China Selatan menjadi pusat perselisihan yang memerlukan solusi diplomatik. Perundingan multilateral dan penghormatan terhadap hukum internasional, seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS), dapat menjadi langkah positif dalam menangani sengketa wilayah. Meski demikian, kebijakan asertif Tiongkok tidak menurun bahkan cenderung meningkat dan membuat beberapa negara di Asia Tenggara untuk bergerak di luar arsitektur kawasan, seperti halnya yang dilakukan oleh Filipina.¹⁷

Sementara itu, keamanan di Semenanjung Korea dan permasalahan nuklir Korea Utara tetap menjadi keprihatinan utama. Upaya diplomasi perlu terus didorong, dengan komitmen dari negara-negara besar seperti RRT dan Amerika Serikat untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Namun, Amerika Serikat memandang kebutuhan untuk membendung tidak hanya Korea Utara tetapi juga Tiongkok sehingga meningkatkan kerja sama tiga negara antara Korea Selatan dan Jepang untuk memastikan keamanan aliansinya.

Di sisi lain, Kudeta militer di Myanmar pada awal tahun 2021 menjadi pukulan tambahan bagi dinamika geopolitik Asia Tenggara.¹⁸ Reaksi internasional dan perbedaan pendapat di antara negara-negara ASEAN mencerminkan kompleksitas diplomasi kawasan ini. ASEAN menunjukkan batas atas kapasitas dan kapabilitasnya dalam menyelesaikan permasalahan internal negara anggota ASEAN. Hal tersebut terbukti dengan durasi dua bulan yang dibutuhkan untuk menyamakan perspektif negara anggota ASEAN terhadap isu Myanmar dan mengeluarkan pernyataan bersama sebagai upaya penghentian kekerasan yang terjadi.

¹⁶ Aristyo Rizka Darmawan, "AUKUS adds fuel to the South China Sea dispute," diakses pada 20 November 2023 <https://eastasiaforum.org/2021/11/01/aucus-adds-fuel-to-the-south-china-sea-dispute/>

¹⁷ Al Jazeera, "Philippines tells China to 'back off' after South China Sea clash," diakses pada 20 November 2023 <https://www.aljazeera.com/news/2021/11/18/philippines-tells-china-to-back-off-after-south-china-sea-clash>

¹⁸ Rodion Ebigghausen, "Myanmar coup: ASEAN split over the way forward," diakses pada 20 November 2023 <https://www.dw.com/en/myanmar-coup-asean-ties/a-57042503>

3.2.4. Tantangan Kerja Sama Pembangunan Internasional untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Meskipun pencapaian kinerja IKU cukup signifikan, masih terdapat beberapa kendala dan tantangan dalam pelaksanaannya, terutama terkait dengan dampak yang ditimbulkan akibat masih merebaknya pandemi Covid-19 di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia yang disebabkan restriksi mobilitas dan berbagai kebijakan kesehatan masyarakat untuk meminimalisir dampak pandemi.

Dari sisi teknis, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Perwakilan RI menghadapi sejumlah tantangan yang berasal dari faktor geopolitik dan geoekonomi dunia.¹⁹ Disrupsi akibat pandemi, persaingan Amerika Serikat - RRT, dan lambatnya pemulihan sistem ekonomi dunia menciptakan hambatan dalam pelaksanaan promosi dagang dan perundingan dagang. Perubahan metode pelaksanaan, seperti transformasi promosi dagang menjadi format daring, memerlukan inovasi dan strategi untuk menjaring pengusaha Indonesia dan penguasa di wilayah Asia Pasifik dan Amerika Eropa.

Hambatan perdagangan dan regulasi, seperti penerapan hambatan tarif dan non-tarif, serta tingginya biaya logistik perdagangan, juga menjadi kendala serius. Infrastruktur yang terbatas di pelabuhan dan jalan perbatasan mempersulit kelancaran rantai pasok. Selain itu, skema pembiayaan yang belum efektif dan kerja sama korespondensi antarbank di kawasan Asia Pasifik dan Amerika Eropa menjadi tantangan dalam penyelesaian transaksi perdagangan.

Dampak pandemi global Covid-19 membuat investor lebih berhati-hati, prioritas investor bergeser, dan iklim investasi di daerah belum kondusif. Tidak hanya itu, pemberlakuan kebijakan pembatasan mobilitas juga berdampak pada kegiatan pendukung IKU, seperti kunjungan kepala negara. Para investor cenderung memberlakukan strategi menunggu akibat ketidakpastian yang terus meroket.

Sementara itu, pada sektor pariwisata Kemenlu juga berfokus pada peningkatan jumlah wisatawan asing ke Indonesia. Namun, munculnya varian Delta Covid-19 memperketat pembatasan akses masuk.²⁰ Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) lain, kevakuman SDM, dan logistik di sektor pariwisata menjadi hambatan utama. Kondisi ini mempersulit upaya memberikan pelayanan maksimal kepada wisatawan asing. Meskipun demikian terdapat beberapa kebijakan khusus

¹⁹ Kementerian Luar Negeri, "Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri 2021" (Jakarta: Kemenlu, 2022)

²⁰ Kementerian Luar Negeri, "Laporan Kinerja"

yang diberlakukan, seperti pemberian akses terhadap WNA dengan Pemegang visa diplomatik dan visa dinas, visa kunjungan, visa tinggal terbatas, pemegang izin Tinggal dinas, pemegang Izin Tinggal diplomatik, pemegang izin tinggal terbatas (KITAS) dan kartu izin tinggal tetap (KITAP), serta pemegang Kartu Perjalanan Pebisnis Asia-Pacific Economic Cooperation (KPP APEC) dan pelintas batas tradisional.

3.2.5. Hambatan Kepemimpinan Indonesia di Fora Internasional

Dalam menjalankan peran aktifnya di pergaulan internasional, Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Kendala utama terletak pada pelaksanaan program dan perencanaan anggaran kegiatan. Pertemuan dan kegiatan diplomatik harus beralih ke format virtual, mengingat dinamika penyebaran virus yang tidak menentu di dalam dan luar negeri.

Tantangan terbesar dalam negosiasi dan pencalonan posisi Indonesia adalah keterbatasan metode virtual yang dianggap kurang maksimal dibandingkan dengan pendekatan fisik. Pendekatan personal serta pelaksanaan lobi yang biasa dilakukan pada waktu-waktu informal saat bernegosiasi tidak dapat dilakukan dalam pertemuan virtual. Oleh karena itu, potensi dukungan dan suara untuk Indonesia sebagai pemimpin pertemuan internasional menjadi berkurang.

Selain itu, administrasi penyelenggaraan kegiatan juga terdampak oleh perkembangan Covid-19 dan pembatasan pergerakan masyarakat. Anggaran untuk kegiatan internasional dan kunjungan di luar negeri direncanakan untuk dilakukan secara *online*, namun aturan pembatasan pergerakan membuat realisasi anggaran rendah dari yang direncanakan.

Dalam konteks diplomasi di kawasan, rivalitas antara kekuatan besar turut mempengaruhi diskusi di forum regional, mendominasi negara atau anggota tertentu. Hal ini menjadi hambatan dalam mencapai kesepakatan dan harmonisasi peraturan nasional di tingkat regional.²¹

Pandemi Covid-19 juga memengaruhi pencapaian target dari rencana awal akibat kendala dalam penyelenggaraan pertemuan dan konferensi tingkat tinggi secara virtual. Pembatasan pergerakan global menyebabkan ketidakpastian jadwal dan

²¹ Kementerian Luar Negeri, "Laporan Kinerja 2021"

pelaksanaan kegiatan, sementara kendala teknis dalam penggunaan platform virtual dapat merusak momentum pertemuan.

Dari sisi substansi, persaingan antarnegara adidaya semakin kompleks di kawasan, membuat sulitnya mencapai kesepakatan proposal baru. Pada pertemuan tingkat tinggi ASEAN, perbedaan kepentingan dan pembahasan topik sensitif, seperti reviu Piagam ASEAN dan legitimasi delegasi Myanmar, menuntut Indonesia untuk mencari jalan tengah di tengah ketidakpastian.

Tantangan terakhir terletak pada penyampaian rekomendasi dan prakarsa Indonesia dalam forum multilateral. Dengan keberagaman kepentingan di antara partisipan, Indonesia dihadapkan pada kesulitan meyakinkan banyak pihak, termasuk aktor non-negara, untuk menerima inisiatif yang disampaikan.

3.2.6. Kerentanan Penjagaan Integritas NKRI dan Pelindungan WNI

Penetapan batas maritim antara Indonesia dengan negara tetangga telah menjadi isu yang kompleks dan menantang, memerlukan diplomasi yang cermat dan koordinasi yang intensif. Sejumlah tantangan kembali bermunculan dalam proses menetapkan batas maritim ini, menciptakan dinamika yang membutuhkan penanganan khusus.

Salah satu tantangan utama adalah persaingan klaim wilayah maritim di Laut Cina Selatan. Sengketa teritorial dengan Tiongkok, Vietnam, Filipina, dan Malaysia menambah kompleksitas dalam penetapan batas maritim di wilayah ini. Tiongkok, dengan klaim yang luas, sering kali memunculkan ketegangan di perairan yang seharusnya menjadi bagian dari yurisdiksi Indonesia. Selain itu, intrusi dari Kapal ikan asing pada wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia juga menjadi permasalahan lain yang memerlukan penyelesaian secara cepat.²²

Perubahan kebijakan pemerintah di beberapa negara tetangga juga dapat memengaruhi dinamika penetapan batas maritim. Pergeseran dalam kebijakan luar negeri, pergantian pemerintahan, atau isu-isu internal dapat membawa perubahan dalam pendekatan terhadap pembicaraan batas maritim. Terlebih, pembatasan mobilitas lintas negara memperburuk kondisi yang sudah ada. Adaptasi teknologi dalam bernegosiasi kurang memberikan nilai diplomasi seutuhnya. Oleh karena itu, selain Indonesia perlu memahami dan merespons dinamika politik di negara-

²² Yogi Eka Sahputra, "Kapal Asing Tetap Marak di Laut Natuna Utara," diakses pada 22 November 2023 <https://www.mongabay.co.id/2021/11/21/kapal-asing-tetap-marak-di-laut-natuna-utara/>

negara tetangga perlu juga menyepakati untuk melakukan pertemuan langsung secara terbatas agar dapat menjaga keberlanjutan proses penetapan batas maritim.

Sementara itu, pada perlindungan WNI di luar negeri Indonesia dihadapkan oleh evolusi permasalahan lintas batas yang meningkatkan kerentanan WNI saat bepergian di luar negeri. Dinamika global, terutama dipengaruhi oleh pandemi Covid-19, geopolitik, dan perubahan kebijakan di beberapa negara menjadi beberapa tantangan yang kerap mengemuka.²³

Salah satu tantangan utama adalah dampak pandemi Covid-19 yang terus berlanjut. Pembatasan pergerakan, penutupan perbatasan, serta perubahan kebijakan pemerintah di berbagai negara menjadi kendala dalam memberikan perlindungan optimal. Warga negara Indonesia di luar negeri terkadang menghadapi kesulitan mendapatkan bantuan, terutama ketika terjadi penutupan konsulat atau kantor perwakilan diplomatik. Selain itu, perubahan kebijakan imigrasi di beberapa negara tujuan dapat memberikan tekanan tambahan. Peningkatan kasus deportasi, penangkapan, atau penolakan masuk menjadi risiko yang harus dihadapi warga negara Indonesia yang tinggal atau berkunjung ke negara tertentu.

Tantangan lainnya datang dari situasi politik dan keamanan di beberapa wilayah. Konflik atau ketidakstabilan politik dapat membahayakan keamanan warga negara Indonesia di sekitarnya. Pemerintah harus mengantisipasi kemungkinan evakuasi dan memberikan informasi yang akurat kepada warga negara yang mungkin terdampak.

Pentingnya diplomasi dan hubungan luar negeri juga menjadi bagian integral dalam mengatasi tantangan ini. Koordinasi yang efektif antara Kementerian Luar Negeri dan perwakilan diplomatik Indonesia di berbagai negara menjadi kunci dalam memberikan perlindungan maksimal kepada warga negara di luar negeri. Kolaborasi dengan negara-negara tujuan untuk memahami dan mengatasi berbagai tantangan bersama juga menjadi strategi yang esensial.

3.2.7. Tantangan Pembangunan Citra Indonesia di tingkat Internasional

Pembangunan citra positif suatu negara di tingkat global menjadi sebuah tantangan yang semakin kompleks dan krusial dalam era globalisasi saat ini. Indonesia, sebagai negara dengan keberagaman budaya dan potensi ekonomi yang besar, tidak terlepas dari upaya membangun citra positifnya di mata dunia. Namun,

²³ Direktorat Pelindungan WNI, "Laporan Kinerja 2021," (Jakarta: Kemenlu, 2022)

pelaksanaan diplomasi publik terpadu sebagai salah satu instrumen untuk mencapai tujuan ini, menghadapi sejumlah hambatan yang perlu diatasi.²⁴

Salah satu tantangan utama adalah fluktuasi opini publik internasional terhadap Indonesia. Berbagai isu seperti hak asasi manusia, keberlanjutan lingkungan, dan permasalahan kebijakan dalam negeri dapat memengaruhi pandangan global terhadap Indonesia. Tantangan ini memerlukan upaya komunikasi yang efektif untuk memahami dunia mengenai langkah-langkah positif yang diambil oleh Indonesia, serta untuk merespons kritik dan permasalahan dengan transparansi.

Hambatan lainnya adalah keberagaman budaya dan bahasa di dalam negeri, yang bisa menjadi tantangan dalam menyusun pesan-pesan yang kohesif dan efektif dalam konteks diplomasi publik. Memahami beragamnya latar belakang masyarakat global menjadi esensial untuk menghasilkan pesan yang dapat diterima oleh berbagai kelompok sosial dan budaya di berbagai belahan dunia.

Pemanfaatan media sosial dan teknologi informasi memunculkan tantangan baru. Meskipun dapat menjadi alat efektif untuk menyebarkan informasi positif, penggunaan media sosial juga dapat menyebabkan penyebaran berita palsu atau citra negatif. Oleh karena itu, upaya harus difokuskan pada peningkatan literasi digital dan kontrol terhadap konten yang dibagikan, agar pesan positif Indonesia tetap mendominasi ruang digital.

Selain itu, pembangunan citra positif Indonesia di tingkat global juga terkait erat dengan pelaksanaan diplomasi publik yang terpadu. Koordinasi antara lembaga-lembaga pemerintah, swasta, dan non-pemerintah menjadi esensial, namun hal ini dapat dihadapi oleh hambatan struktural dan budaya di dalam sistem birokrasi.

Keterbatasan anggaran dan sumber daya menjadi kendala serius. Diplomasi publik yang efektif memerlukan investasi waktu, tenaga, dan dana yang cukup untuk menciptakan kampanye-kampanye yang memadai. Keterbatasan anggaran dapat menjadi hambatan dalam menciptakan inisiatif yang kuat dan berkelanjutan dalam membangun citra positif Indonesia.

3.2.8. Evaluasi Kinerja Program Pembangunan Bidang Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional

Pelaksanaan perencanaan pembangunan dilakukan dengan penyusunan dokumen perencanaan bertingkat, dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang

²⁴ Direktorat Diplomasi Publik, "Laporan Kinerja 2021," (Jakarta: Kemenlu, 2022)

Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), hingga Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang diimplementasi setiap tahun yang kemudian disinkronkan dengan perencanaan dan pembangunan di tingkat daerah. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional guna memastikan pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai rencana, terstruktur, dan sinkron antar tingkatan pemerintah.

Untuk mengawal pelaksanaan pembangunan sesuai rencana dengan target realisasi yang diharapkan disusun sejumlah indikator kinerja yang menjadi acuan. Dalam penjabarannya indikator tersebut akan digunakan baik untuk perencanaan jangka menengah ataupun jangka pendek untuk menghindari perubahan sewaktu-waktu dan menjamin benang merah yang terpintal pada keduanya. Adapun untuk Bidang Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional tahun 2022 ditujukan untuk Mengoptimalkan Kebijakan Luar Negeri Indonesia untuk pemenuhan kepentingan nasional diejawantahkan dalam beberapa indikator berikut:

Tabel 2. Indikator Kinerja Bidang Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional TA 2022

NO.	INDIKATOR	SUMBER DATA
PN Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		
1.	Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional	Kemenlu
PP Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri		
1.	Jumlah forum yang dipimpin oleh Indonesia pada tingkat regional dan multilateral	Kemenlu
2.	Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional	Kemenlu
3.	Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri	Kemenlu
KP Penguatan Integritas NKRI dan Pelindungan WNI di Luar Negeri		
1.	Persentase penyelesaian kasus WNI dan BHI di luar negeri	Kemenlu
2.	Indeks Kemajuan Perundingan Penyelesaian Perbatasan Maritim	Kemenlu

NO.	INDIKATOR	SUMBER DATA
KP Penguatan Kerja sama Pembangunan Internasional		
1.	Jumlah program/kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan Triangular	Bappenas
KP Peningkatan Citra Positif di Dunia Internasional		
1.	Persentase pemberitaan positif media massa internasional terhadap kebijakan hubungan luar negeri RI	Kemenlu
KP Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global		
1.	Persentase prakarsa dan rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat menteri multilateral	Kemenlu
2.	Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat menteri ASEAN	Kemenlu
3.	Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang ditindak lanjuti oleh stakeholder dalam negeri	Kemenlu
4.	Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di kawasan Amerika dan Eropa yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dalam negeri	Kemenlu

Bab IV


HASIL EVALUASI

4.1. Evaluasi Pembangunan

4.1. Evaluasi Pembangunan Berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Prioritas Nasional Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Pada tahun 2022, capaian Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional sebagai indikator Prioritas Nasional Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik sebesar 99,43%. Hal tersebut menunjukkan Indonesia telah secara aktif berperan pada tingkat internasional, termasuk pengamanan kepentingan nasional.

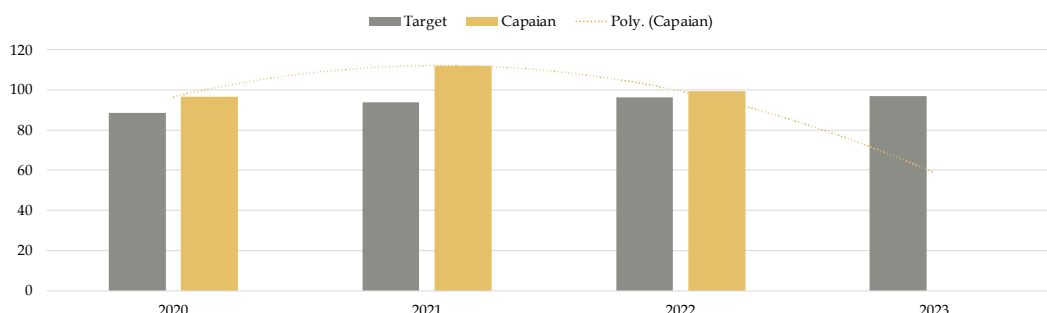
Tabel 3. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Prioritas Nasional Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik TA 2022

Indikator	TA 2022		Persentase Capaian	Notifikasi Capaian	Sumber Data
	Target	Capaian			
Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional	96%	99,43%	103%		Kementerian Luar Negeri

Adapun realisasi tersebut berada diatas target awal yang direncanakan sehingga menciptakan disparitas positif walaupun tidak setinggi tahun sebelumnya. Selama tahun 2022, Indonesia berhasil memimpin 112 pertemuan yang disepakati untuk dipimpin oleh Indonesia, 10 pertemuan di Asia Pasifik dan Afrika, 3 pertemuan di Amerika dan Eropa, dan 99 pertemuan forum multilateral. Selain itu, terdapat 8 pencalonan yang berhasil dari target 9 pencalonan (4 pencalonan negara dan 5 pencalonan individu) yang diusulkan di forum multilateral. Ketidakberhasilan 1

(satu) pencalonan tersebut disebabkan oleh kurang optimalnya penggalangan dukungan.²⁵

Grafik 2. Tren Target dan Realisasi Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional 2020-2023



Secara umum realisasi Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional selama kurun waktu tiga tahun terakhir selalu menciptakan disparitas positif di atas target walaupun di tahun 2022 tidak setinggi tahun sebelumnya. Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam memajukan kebijakan luar negeri dan diplomasi Indonesia pada tahun 2022, yakni 1) Dinamika koordinasi dan kebijakan politik domestik (kebijakan pembatasan perjalanan; persepsi negatif masyarakat terhadap perjanjian internasional; hingga partisipasi instansi atau individu penjuror belum optimal); 2) Pandemi COVID-19 berlarut; 3) Konflik geopolitik Perang Rusia-Ukraina; 4) Perbedaan interpretasi antarpihak akibat pelaksanaan secara virtual dan gangguan keamanan digital.




4.2. Evaluasi Pembangunan Berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Program Prioritas Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri

Pada tingkat Program Prioritas pengukuran capaian menggunakan tiga indikator kinerja utama, yakni jumlah forum yang dipimpin oleh Indonesia pada tingkat regional dan multilateral, Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional, dan Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri. Ketiga indikator tersebut mencapai, bahkan melewati, target yang telah direncanakan.²⁶

²⁵ Kementerian Luar Negeri, "Laporan Kinerja 2022," (Jakarta: Kemenlu, 2023)

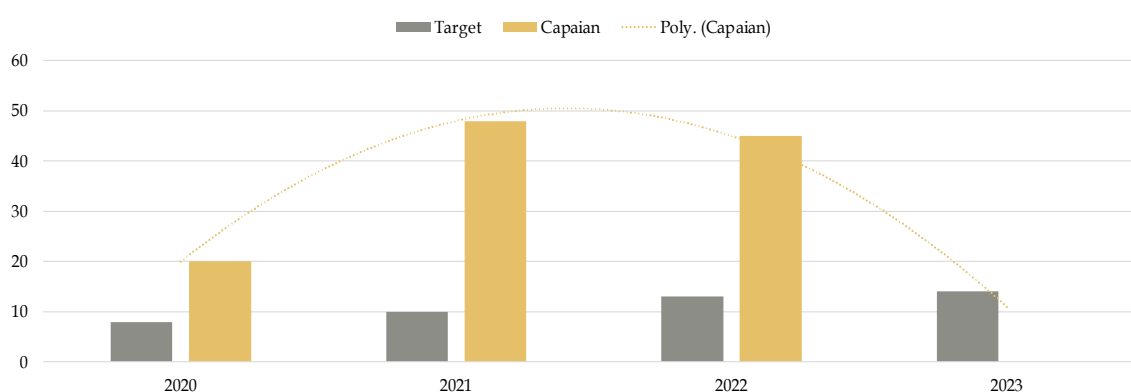
²⁶ Kementerian Luar Negeri, "Laporan Kinerja 2022," (Jakarta: Kemenlu, 2023)

Tabel 4. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Prioritas Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri TA 2022

Indikator	TA 2022		Persentase Capaian	Notifikasi Capaian	Sumber Data
	Target	Capaian			
Jumlah forum yang dipimpin oleh Indonesia pada tingkat regional dan multilateral	13	45	120%		Kementerian Luar Negeri
Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional	3,9	4,05	104%		Kementerian Luar Negeri
Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri	88%	94,86%	110%		Kementerian Luar Negeri

Realisasi pada indikator jumlah forum yang dipimpin oleh Indonesia pada Tingkat Regional dan Multilateral berhasil menciptakan disparitas positif walaupun tidak setinggi tahun sebelumnya. Indonesia berhasil memimpin 45 forum strategis, diantaranya: 1. Sidang Dewan HAM PBB Sesi ke-49 dan ke-51; 2) KTT G20 serta pertemuan tingkat Menteri lainnya; dan 3) KTT MIKTA serta pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri.

Grafik 3. Tren Target dan Realisasi Jumlah Forum yang Dipimpin oleh Indonesia pada Tingkat Regional dan Multilateral 2020 - 2023



Kepemimpinan Indonesia pada forum dan organisasi strategis membawa dampak positif terhadap kepentingan nasional. G20 menjadi salah satu forum yang berhasil dimanfaatkan oleh Indonesia pada tahun 2022. Adapun inisiatif yang diusulkan

Indonesia untuk menanggulangi isu transnasional dan di saat yang bersamaan mengamankan kepentingan nasional adalah 1) Komitmen Financial Intermediary Fund (FIF) atau Pandemic Fund sebesar USD 1,4 miliar untuk pandemic prevention, preparedness, and response (PPR); 2) Pembentukan Resilience and Sustainability Trust (RST); 3) Pembentukan Global Blended Finance Alliance (GBFA) untuk mendukung percepatan investasi dan pendanaan dalam *climate actions* dan SDGs; 4) Mendorong komitmen negara maju untuk mobilisasi USD 100 miliar per tahun

Sumber: Suara.com, 2022

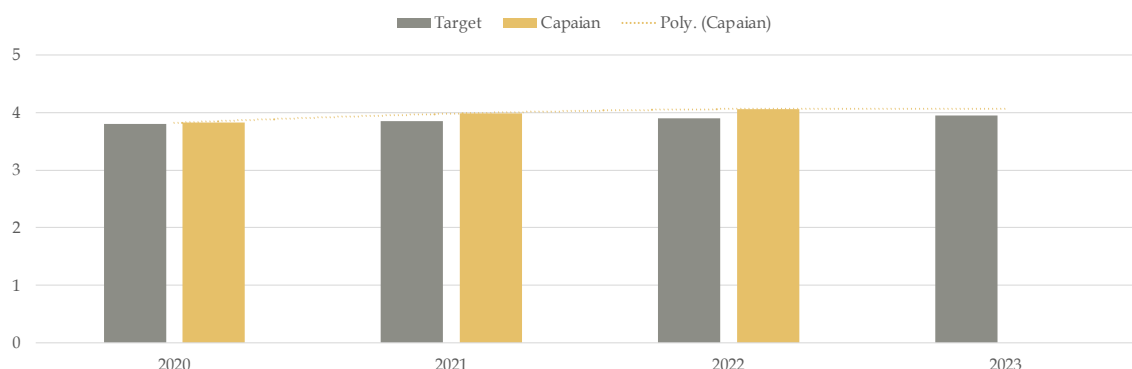


G20 Indonesia, 2022

hingga 2025 untuk pendanaan iklim bagi negara berkembang; dan 5) Mendukung semua negara rentan dengan komitmen USD 81,6 miliar melalui Special Drawing Rights (SDR) atau kontribusi selaras untuk pemulihan ekonomi. Inisiatif tersebut membuahkan komitmen proyek sebanyak 139 senilai 69,39 miliar USD.

Sementara itu, pada indikator Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional terdapat sedikit disparitas positif antara target dan capaian pada tahun 2022 dengan perolehan nilai indeks sebesar 4,06 dari 3,9. Tren tiga tahun terakhir Indeks Citra selalu menghasilkan disparitas positif kecil dan memiliki tren yang cukup progresif.

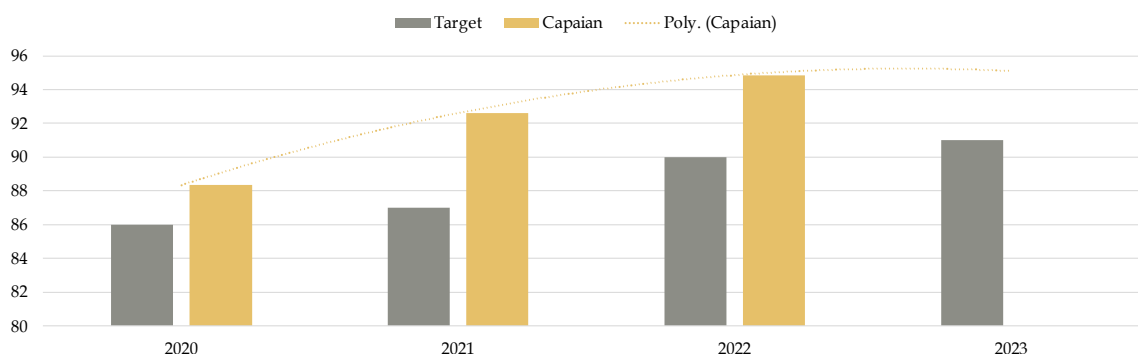
Grafik 4. Tren Target dan Realisasi Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional



Menilik lebih dalam, rata-rata indeks citra tertinggi adalah pada dimensi pariwisata dan sosial budaya dengan nilai 4,43 dan rata-rata indeks citra terendah adalah ekonomi dengan nilai 3,81. Selain itu, rata-rata indeks pemerintahan dan penegakan hukum adalah 3,95. Tingginya nilai tersebut dipengaruhi oleh optimalnya performa pemulihan ekonomi dan pengelolaan mobilitas pasca

pandemi, peningkatan kinerja promosi mengenai Indonesia oleh Kemenlu dan berbagai pemangku kepentingan, serta iklim politik domestik Indonesia yang cenderung stabil.

Grafik 5. Tren Target dan Realisasi Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri 2020-2023



Kemudian pada indikator Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri berhasil mencapai target dan menciptakan disparitas positif cukup tinggi bahkan dibandingkan tahun sebelumnya. Di tengah situasi yang cukup dinamis, berlarutnya Pandemi COVID-19 dan konflik bersenjata di Ukraina, mesin diplomasi berhasil melakukan perlindungan terhadap seluruh WNI yang berada di luar negeri. Keberhasilan tersebut berkat pemetaan WNI di luar negeri berdasarkan jumlah, titik penyebaran, profil WNI, pola dan tujuan migrasi. Informasi tersebut mutlak dibutuhkan untuk membangun kebijakan di bidang tata Kelola migrasi sekaligus kebijakan perlindungan yang tepat sasaran.

Meskipun pencapaian ketiga indikator dapat memenuhi target, bahkan melampaui target, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang muncul di lapangan. Dinamika koordinasi dan kebijakan politik domestik kembali menjadi tantangan utama. Beberapa aspek, seperti kebijakan pembatasan perjalanan, persepsi negatif masyarakat terhadap perjanjian internasional, hingga partisipasi instansi atau individu penjurur belum optimal mengakibatkan roda diplomasi perlu mencari langkah alternatif dan solusi secara cepat. Kemudian, pandemi COVID-19 berlarut masih menyeret perlambatan kinerja dari diplomasi Indonesia. Fenomena konflik geopolitik dan persaingan negara adidaya yang mengemuka diluar perencanaan juga menjadi kendala yang dihadapi. Perang Rusia-Ukraina, serta ketidakamanan di Afghanistan, Suriah, Libya, bahkan di Taiwan merupakan sekian fenomena utama yang mempengaruhi capaian indikator secara signifikan. Di sisi lain, kebutuhan kelembagaan yang belum terbangun, termasuk penyusunan pedoman hingga belum adanya perjanjian kerja sama bilateral perlindungan WNI

di luar negeri dengan negara mitra strategis merupakan beberapa isu pada aspek perlindungan WNI.

4.3. Evaluasi Pembangunan Berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Prioritas Penguatan Integritas NKRI dan Pelindungan WNI di Luar Negeri

Pada KP Penguatan Integritas NKRI dan Pelindungan WNI di Luar Negeri Tahun 2022 terdapat disparitas positif antara target dan capaian. Pada isu perlindungan WNI, pemerintah berhasil menyelesaikan 30.894 kasus dari 35.149 kasus yang ditangani. Secara khusus, pemerintah berhasil mengevakuasi WNI dari Ukraina yang tengah menjadi medan pertempuran. Sementara itu, pemerintah juga berhasil melakukan penandatanganan Persetujuan Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) RI-Vietnam dan Principles and Guidelines RI-Filipina.²⁷



Sumber: CNBC Indonesia

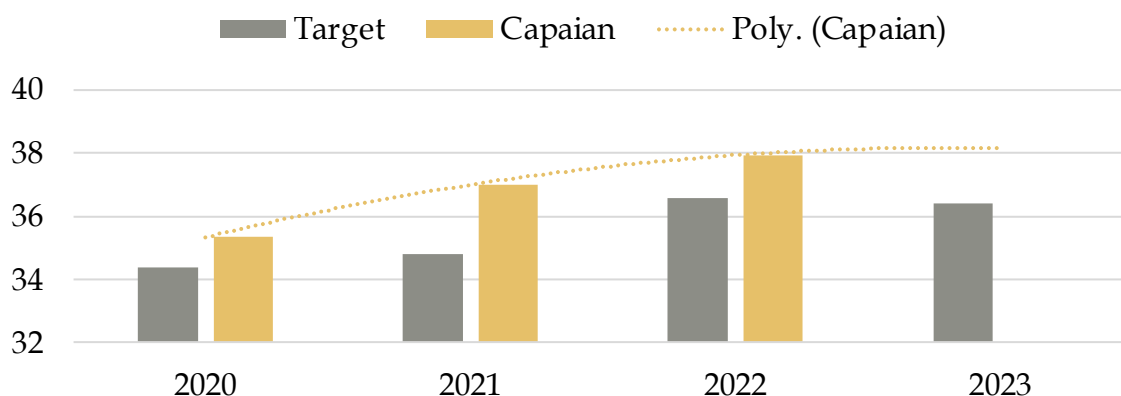
Tabel 5. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Prioritas Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri TA 2022

Indikator	TA 2022		Persentase Capaian	Notifikasi Capaian	Sumber Data
	Target	Capaian			
Persentase penyelesaian kasus WNI dan BHI di luar negeri	35,02%	36,6%	104%	●	Kementerian Luar Negeri
Indeks Kemajuan Perundingan Penyelesaian Perbatasan Maritim	46,32	46,84	101%	●	Kementerian Luar Negeri

²⁷ Kementerian Luar Negeri, "Laporan Kinerja 2022,"

Sepanjang tahun 2022, terdapat 4.687 kasus khusus yang diselesaikan dari total 4.910 kasus khusus dan terdapat 26.207 kasus umum yang diselesaikan dari total 30.239 kasus umum. Jenis kasus-kasus WNI di luar negeri yang ditangani, antara lain mencakup isu keimigrasian, ketenagakerjaan, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), penyanderaan WNI, evakuasi dari daerah konflik, WNI terancam hukuman mati, WNI sakit dan meninggal dunia, COVID-19, serta pidana dan perdata pada umumnya. PMI sektor domestik dan ABK kapal ikan menjadi golongan PMI dengan jumlah permasalahan di luar negeri terbesar. Sementara jumlah kasus terbanyak adalah keimigrasian, ketenagakerjaan, pidana, dan COVID-19.

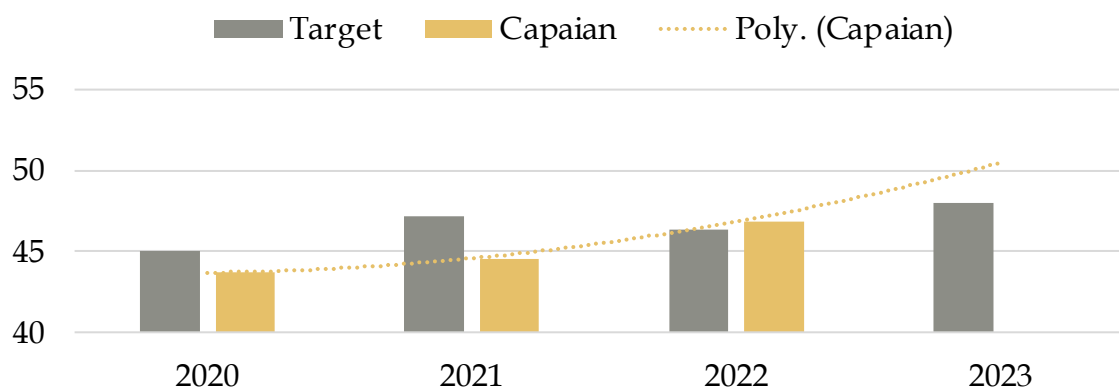
Grafik 6. Tren Target dan Realisasi Persentase Penyelesaian Kasus WNI dan BHI di Luar Negeri 2020 – 2023



Sepanjang tahun 2022 terdapat dua insiden utama yang menjadi fokus utama penanganan perlindungan WNI di luar negeri. Pertama, evakuasi WNI dari Ukraina akibat operasi militer khusus Rusia (invasi teritori) yang ikut mengancam kemaslahatan WNI di yang bermukim di Ukraina dan sekitarnya. Menyikapi konflik bersenjata yang terjadi antara Rusia dan Ukraina sejak awal tahun 2022 dan dampaknya terhadap keamanan WNI, Kemenlu telah melakukan evakuasi WNI dari Ukraina. Proses evakuasi berlangsung sejak 28 Februari hingga 18 Maret 2022. Proses evakuasi berhasil dilaksanakan atas kerja sama lintas K/L di Pusat, serta lintas Perwakilan RI, yakni KBRI Kyiv, KBRI Bucharest, KBRI Bratislava, KBRI Budapest, KBRI Moskow, dan KBRI Warsawa. Evakuasi berhasil menyelamatkan 133 WNI dan 6 WN Ukraina. Hingga proses evakuasi selesai dilakukan terdapat 32 orang WNI yang memutuskan untuk tetap berada di Ukraina. Kasus lainnya adalah pembebasan WNI dari Hukuman Mati. Selama periode bulan Januari-Desember 2022, Pemerintah Indonesia berhasil memfasilitasi pembebasan hukuman mati, yaitu 22 orang WNI di Malaysia dan Uni Emirat Arab sehingga terbebas dari

tuntutan hukum. Pada tahun 2022, terdapat 223 kasus hukuman mati yang ditangani Kemenlu. Sebagian besar 210 kasus berada di Malaysia. Adapun kasus di negara lain tersebar di Singapura, Vietnam, Laos, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Tiongkok.

Grafik 7. Target dan Realisasi Indeks Kemajuan Perundingan Penyelesaian Perbatasan Maritim 2020 – 2023



Sementara itu, pada Indeks Kemajuan Perundingan Penyelesaian Perbatasan Maritim terdapat revisi target dari yang sebelumnya 49,01 menjadi 46,32. Revisi target ini dilakukan karena adanya penyesuaian perubahan target negara yang semula Filipina, Vietnam, dan Timor Leste menjadi Malaysia, Filipina, Palau, dan Vietnam. Perubahan prioritas negara ditetapkan karena adanya berbagai perkembangan dari berbagai aspek di negara-negara tersebut. Adapun salah satu faktor yang menyebabkan capaian melampaui target adalah ditandatanganinya Persetujuan Batas Zona Ekonomi Eksklusif RI-Vietnam pada Desember 2022, yang sebelumnya diproyeksikan akan rampung pada tahun berikutnya.


Adapun beberapa tantangan utama yang dihadapi pada tahun berjalan adalah 1) Dinamika koordinasi dan kebijakan politik domestik; 2) Pandemi COVID-19 berlarut; 3) Pemberitaan pada media asing; 4) Perbedaan interpretasi antarpihak; 5) Jumlah SDM pendukung perundingan yang rendah; 6) Gangguan keamanan digital; dan 7) Perkembangan modus kejahatan.

4.4. Evaluasi Pembangunan Berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Prioritas Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional

Pada KP Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional 2022 terdapat disparitas negatif antara target dan capaian. Kemampuan dan kapasitas Indonesia

dan negara mitra masih belum pulih sepenuhnya pasca Pandemi COVID-19 sehingga capaian kinerja masih belum memenuhi angka yang target yang telah ditetapkan. Adapun Indonesia teridentifikasi telah memberikan 28 bantuan kapasitas (*capacity building*) kepada negara berkembang dalam kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST). Area kerja sama meliputi bidang pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, pendidikan (beasiswa), keluarga berencana, kearsipan, perdagangan, industri dan energi.²⁸

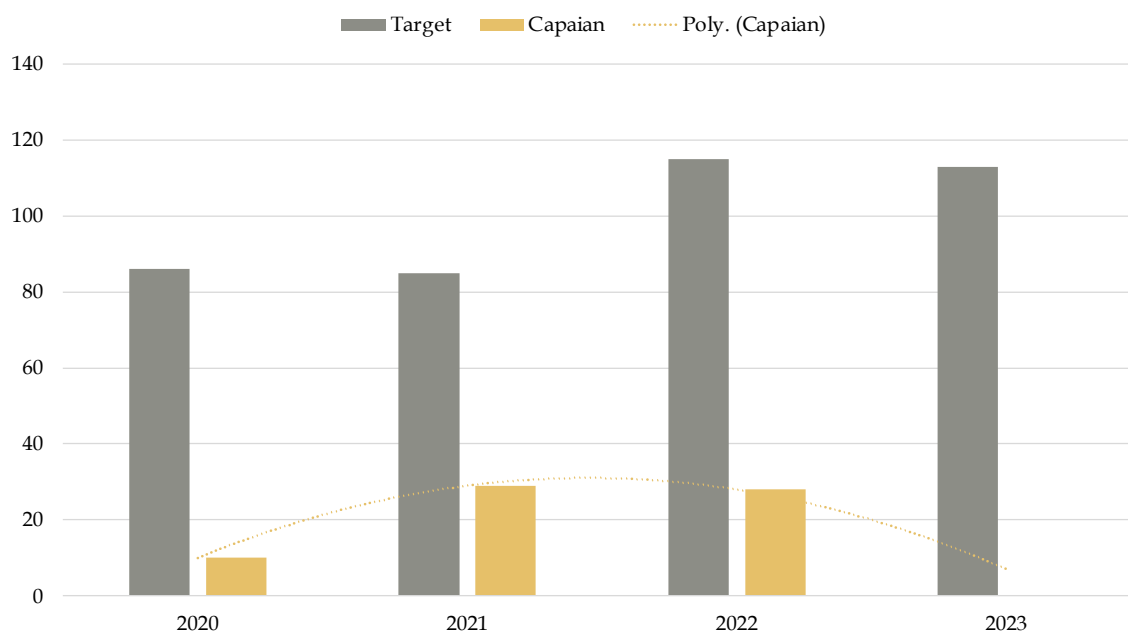
Tabel 6. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Prioritas Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional TA 2022

Indikator	TA 2022		Persentase Capaian	Notifikasi Capaian	Sumber Data
	Target	Capaian			
Jumlah program/kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan Triangular	115	28	24,3%		Bappenas

Rendahnya capaian tersebut tidak dapat dihindarkan dengan melihat tren tiga tahun terakhir akibat pandemi COVID-19 kondisi Indonesia masih belum pulih sepenuhnya. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi alternatif dalam memperbaiki indikator kinerja terkait. Meski demikian, Indonesia tetap menyelenggarakan kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular untuk pembangunan dan pemajuan kesejahteraan bersama, salah satunya dukungan terhadap sektor perdagangan dan investasi nasional. Dua program/kegiatan utama dari kerja sama Selatan-Selatan yang diselenggarakan pada tahun 2022, yakni 1) Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular Bidang Perikanan Indonesia-Libya, dan 2) Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular Bidang Veteriner Indonesia – Timor Leste.

²⁸ Kementerian Luar Negeri, "Laporan Kinerja 2022,"

Grafik 8. Tren Target dan Realisasi Jumlah Program/Kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan Triangular 2020 - 2023



Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular Bidang Perikanan Indonesia-Libya ditujukan untuk melakukan *business matching* melalui kunjungan terhadap fasilitas dan sumber daya perikanan di Indonesia, menemukan mitra strategis dan menjajaki potensi bisnis serta kerja sama di bidang perikanan Indonesia - Libya. Adapun tindak lanjut yang perlu dikawal dari hasil kegiatan ini adalah 1) Penerapan pembangunan kapasitas Bidang Perikanan dan Keamanan Laut; 2) Kerja sama lingkup bisnis kedua pihak; 3) Kerjasama bidang pendidikan termasuk dukungan untuk pembentukan dan pengembangan Pusat Studi Perikanan di Libyan Academy untuk Pendidikan Tinggi; dan 4) Dukungan Pembentukan Indonesia Vocational Unit (IVU).

Sumber: Direktorat Polugri KPI, Bappenas



Delegasi Lybia mengunjungi BBPBAP Jebara, 2022

Kemudian, Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular Bidang Veteriner Indonesia-Timor Leste ditujukan untuk menemukenali potensi kerja sama melalui *knowledge sharing* dan kunjungan lapangan di bidang veteriner antara Indonesia dan Timor Leste. Beberapa tindak lanjut yang akan menjadi program-kegiatan berikutnya adalah 1) Pemberian pembangunan kapasitas berupa bimbingan teknis peningkatan kemampuan sumber daya manusia pada petugas kesehatan hewan dan memberikan pengetahuan tentang pedoman dalam pelaksanaan *surveilans* dan vaksinasi PHMS di tahun 2023; 2) Pelaksanaan kegiatan *surveilans* dan vaksinasi

Brucellosis pada 3 Municipal di Timor Leste yang berbatasan langsung dengan Indonesia di tahun 2024-2025; dan 3) Melakukan pertemuan berkala antar pemerintah dan antarpelaku usaha bidang veteriner.

4.5. Evaluasi Pembangunan Berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Prioritas Peningkatan Citra Positif Indonesia di Dunia Internasional

Sumber: Kemenlu, 2022




JFOI Tahun 2022 di Kraton, Yogyakarta

Pada KP Peningkatan Citra Positif di Dunia Internasional terdapat sedikit disparitas positif antara target dan capaian pada tahun 2022 dengan perolehan nilai sebesar 89,42% dari target 86%. Capaian tersebut diperoleh dengan 3,678 pemberitaan tentang kebijakan hubungan luar negeri RI yang dipantau sepanjang tahun 2022

pada media massa internasional, terdapat 3,289 pemberitaan yang memiliki sentimen berita yang positif ataupun netral. Kegiatan yang mendukung peningkatan sentimen positif tentang Indonesia adalah program Journalist Visit Program (JVP)/Journalist Friends of Indonesia (JFOI) dan Follow Up ICDD.²⁹

Tabel 7. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Prioritas Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional TA 2022

Indikator	TA 2022		Persentase Capaian	Notifikasi Capaian	Sumber Data
	Target	Capaian			
Persentase pemberitaan positif media massa internasional terhadap kebijakan hubungan luar negeri RI	86%	89,45%	104%		Kementerian Luar Negeri

JFOI 2022 merupakan sinergi dari program Friends of Indonesia dan Journalist Visit Program. Program ini melibatkan para jurnalis dari negara-negara sahabat dengan

²⁹ Kementerian Luar Negeri, "Laporan Kinerja 2022,"

tujuan dapat mengembangkan jejaring yang lebih erat dan bermanfaat bagi kepentingan Indonesia di masa mendatang. *Outcome* dari program JFOI yaitu meningkatnya citra positif Indonesia di luar negeri melalui pemahaman tentang kemajuan dan pembangunan Indonesia, promosi wisata, budaya, dan kearifan lokal yang ada di Indonesia melalui liputan dan publikasi yang dibuat oleh para jurnalis selama mengikuti program tersebut. Pada tahun 2022, JFOI dilaksanakan pada tanggal 12-18 September 2022 di beberapa kota Jakarta, Yogyakarta, dan Bali. Kegiatan ini diikuti oleh 8 jurnalis dari Malaysia, Singapura, Vietnam, Laos, Filipina, Myanmar, dan Timor Leste.





Sementara itu, pelaksanaan tindak lanjut dari International Conference on Digital Diplomacy menjadi upaya peningkatan pemberitaan positif Indonesia di media massa internasional. Di kawasan, Indonesia merupakan salah satu pelopor dalam pemanfaatan media digital untuk tujuan diplomasi. Sebagai tindak lanjut dari International Conference on Digital Diplomacy (ICDD), Kemenlu dan BPPTIK Kemkominfo telah melaksanakan Workshop on Digital Diplomacy: the Essence of Information and Communication Technology for Government Leaders. Workshop on Digital Diplomacy dilaksanakan dalam rangka pengembangan kapasitas negara-negara dan teritori di kawasan Pasifik serta untuk mendukung Program Prioritas Nasional (Pro PN 2022) yaitu Indonesia Pacific Forum for Development (IPFD).

4.6. Evaluasi Pembangunan Berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Prioritas Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global

Pada KP Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global keempat indikator menghasilkan disparitas positif antara target dan capaian pada tahun 2022. Perolehan tersebut tercapai dengan 1) Penerimaan seluruh prakarsa dan rekomendasi yang diajukan di forum multilateral dan forum ASEAN; dan 2) Pelaksanaan semua tindak lanjut yang direncanakan dari kesepakatan kerja sama bilateral di kawasan Asia Pasifik dan Afrika serta kawasan Amerika dan Eropa.³⁰

³⁰ Kementerian Luar Negeri, "Laporan Kinerja 2022,"

Tabel 8. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Prioritas Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global TA 2022

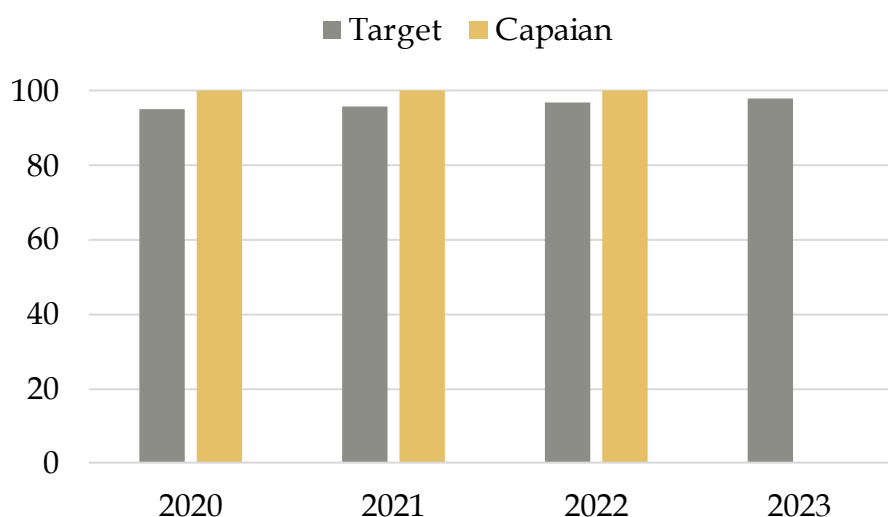
Indikator	TA 2022		Persentase Capaian	Notifikasi Capaian	Sumber Data
	Target	Capaian			
Persentase prakarsa dan rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat menteri multilateral	97%	100%	107%		Kementerian Luar Negeri
Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat menteri ASEAN	97%	100%	107%		Kementerian Luar Negeri
Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang ditindak lanjuti oleh stakeholder dalam negeri	82,22%	100%	120%		Kementerian Luar Negeri
Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di kawasan Amerika dan Eropa yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dalam negeri	82,76%	100%	120%		Kementerian Luar Negeri

Pada indikator persentase prakarsa dan rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat menteri multilateral terdapat 149 prakarsa dan rekomendasi yang diterima dari 149 prakarsa dan rekomendasi yang disampaikan. Faktor keberhasilan dari pencapaian indikator ini adalah: Pelibatan pemangku kepentingan dalam perumusan prakarsa/rekomendasi yang diusulkan di forum regional dan multilateral melalui koordinasi dan komunikasi yang intensif serta Indonesia dalam kapasitasnya sebagai Presidensi G20 telah berhasil menyatukan berbagai kepentingan dan posisi dari tiap negara anggota di berbagai level (*working group* maupun *ministerial meeting*) sehingga rekomendasi dan

prakarsa yang diajukan oleh Indonesia pada setiap pertemuan mendapatkan dukungan dari seluruh negara peserta.

Dua program/kegiatan yang mendukung capaian indikator secara khusus yakni Konferensi Tingkat Menteri (KTM) pada World Trade Organizations (WTO) dan partisipasi Indonesia pada Challenges Forum Partners Meeting. Pelaksanaan KTM berhasil mengadopsi sejumlah *outcome* yang disebut sebagai “Geneva Package”. Indonesia telah memberikan rekomendasi yang masuk ke dalam dokumen hasil KTM antara lain terkait Batasan Moratorium Transmisi Elektronik, aspek *affordability* dalam isu ketahanan pangan, dan lainnya. Sedangkan pada Challenges Forum, terdapat empat rekomendasi Indonesia yang diterima pada forum tersebut untuk memajukan kualitas dan pengembangan MPP PBB lebih lanjut. Indonesia merekomendasikan untuk 1) Mendorong peningkatan pelatihan dan pembangunan kapasitas personel; 2) Penguatan peran *peacekeepers* perempuan; 3) Peningkatan peran *civilian capacities*; dan 4) Implementasi *pledge* United Nations Peacekeeping Ministerial 2021.

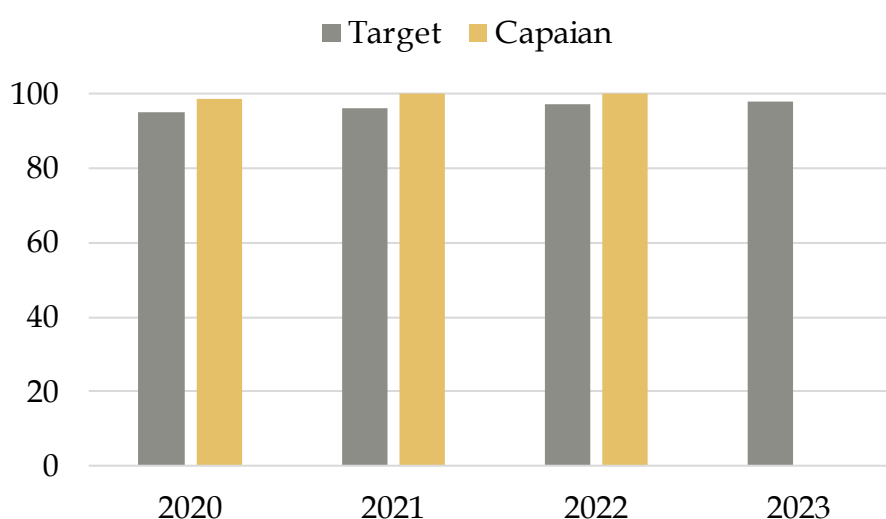
Grafik 9. Tren Target dan Realisasi Persentase Prakarsa dan Rekomendasi Indonesia yang Diterima dalam Pertemuan Tingkat Tinggi dan Tingkat Menteri Multilateral 2020 - 2023



Hal serupa juga terjadi pada indikator persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat menteri ASEAN di mana seluruh 76 prakarsa dan rekomendasi yang diusulkan Indonesia diterima dalam forum. Beberapa faktor keberhasilan dari pencapaian indikator ini adalah: Kesamaan pandangan, kepentingan dan fokus negara-negara anggota ASEAN dalam hal penanganan dampak pandemi dan memperkuat kerja sama

dalam upaya pemulihan ekonomi di kawasan, suksesnya *chairmanship* Indonesia di badan sektoral ASEAN seperti kesehatan dan ketenagakerjaan, Koordinasi dan sinergitas antara Setnas ASEAN dengan K/L teknis meningkatkan kesiapan Delegasi RI dalam memformulasikan dan mengajukan prakarsa dan rekomendasi dalam berbagai pertemuan ASEAN.

Grafik 10. Tren Target dan Realisasi Persentase Rekomendasi dan Prakarsa Indonesia yang Diterima dalam Pertemuan Tingkat Tinggi dan Tingkat Menteri ASEAN 2020 - 2023

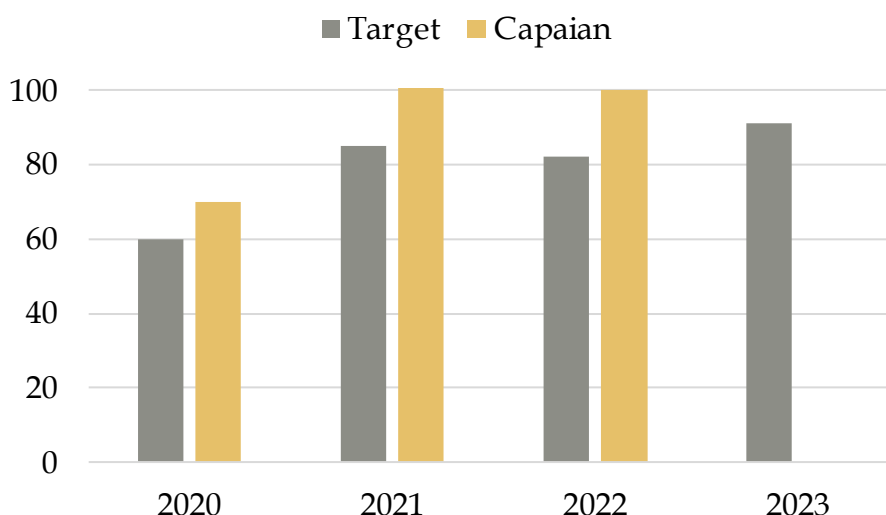


Adapun capaian utama yang menonjol adalah pelaksanaan KTT ASEAN di Phnom Penh dimana Presiden Joko Widodo menyampaikan 3 (tiga) hal fundamental yang perlu dilakukan dalam konteks pemulihan pembangunan, yaitu: 1) Membangkitkan sektor pariwisata sub-kawasan; 2) Mempercepat pembangunan *hard* dan *soft infrastructure*; dan 3) Mewujudkan ekonomi sub-kawasan yang hijau dan berkelanjutan. Para pemimpin lainnya sepakat dengan pesan yang disampaikan sehingga hal tersebut direfleksikan dalam Joint Statement Fourteenth Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle Summit (14th IMT-GT Summit).

Sementara itu, indikator persentase kesepakatan kerja sama bilateral di kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder* dalam negeri memperoleh capaian sempurna dengan total realisasi 88 kesepakatan kerja sama bilateral di kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder* dari yang direncanakan. Faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan indikator adalah: Adanya tanggapan positif dan antusiasme dari para pemangku kepentingan atas prakarsa/inisiatif yang disampaikan kepada *stakeholders*, ditunjukkannya penjurur/*focal point* di beberapa K/L dalam memfasilitasi kerja sama

bilateral yang telah disepakati, serta tingginya komitmen Kementerian/Lembaga teknis terkait, Pemerintah Daerah serta *stakeholders* lainnya dalam menindaklanjuti kesepakatan kerja sama yang telah dicapai secara bilateral maupun regional.

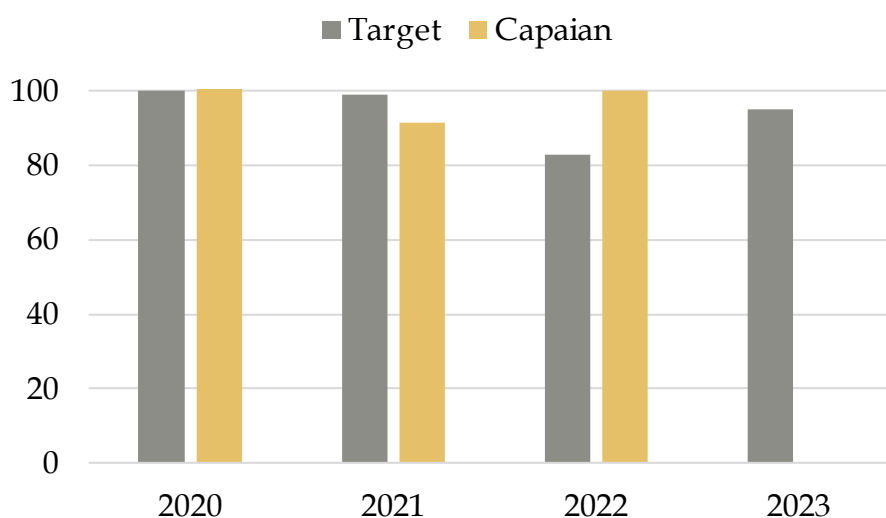
Grafik 11. Tren Target dan Realisasi Persentase Kesepakatan Kerja Sama Bilateral di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder Dalam Negeri 2020 - 2023



Realisasi yang sama juga terjadi pada indikator persentase kesepakatan kerja sama bilateral di kawasan Amerika dan Eropa yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder* dalam negeri dengan total realisasi 33 kesepakatan kerja sama bilateral di kawasan Amerika dan Eropa yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder* dari yang direncanakan. Capaian atas target kinerja tahun 2022 merupakan hasil dari upaya Kemenlu untuk terus menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan berbagai pihak, yaitu Perwakilan RI di Kawasan, Kedubes negara mitra, serta K/L terkait. Dalam hal ini prioritas kesepakatan adalah untuk mendukung: (1) Upaya penanggulangan COVID-19, seperti kesepakatan dukungan vaksin dari Belanda, Prancis dan Italia serta (2) Pemulihan ekonomi nasional.

Selain pelaksanaan evaluasi terhadap arah kebijakan dan strategi yang telah tercantum pada RPJMN 2020-2024 dan RKP 2022, evaluasi juga dilakukan terhadap arah kebijakan diplomasi ekonomi yang diimplementasikan oleh Indonesia. Hal tersebut sedikit banyak berhubungan dengan beberapa arah kebijakan dan strategi yang telah dijabarkan sebelumnya, seperti KP Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional dan KP Peningkatan Citra Positif Indonesia di Tingkat Internasional.

Grafik 12. Tren Target dan Realisasi Persentase Kesepakatan Kerja Sama Bilateral di Kawasan Amerika dan Eropa yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder Dalam Negeri 2020 - 2023



4.7. Evaluasi Pembangunan Berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Prioritas Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global

Kinerja diplomasi ekonomi pada tahun 2022 menunjukkan disparitas positif yang cukup tinggi. Pada sektor perdagangan pemerintah berhasil memperoleh 347 komitmen dagang dan nilai perdagangan sebesar 243,83 miliar dolar AS. Sektor investasi juga menunjukkan capaian positif dengan berhasil mengamankan 147 komitmen investasi dan merealisasikan nilai investasi sebesar 32 miliar dolar AS. Sedangkan, sektor pariwisata berhasil tumbuh baik dengan kedatangan 3,76 juta wisatawan mancanegara. Sementara itu, pemerintah juga berhasil memproses perjanjian perdagangan pada tahun 2022, antara lain, menandatangani 3 perjanjian, meratifikasi 2 perjanjian, dan mengimplementasikan 4 perjanjian dagang.³¹

Pada sektor perdagangan terdapat 3 komitmen utama yang menjadi *highlight* kesepakatan diplomasi ekonomi yang diselenggarakan. Pertama komitmen terhadap ketahanan sektor kesehatan nasional yang memuat pengamanan impor produk sirup obat batuk dan vaksin cacar monyet serta ekspor alat kesehatan nasional dengan total nilai sekitar 13,3 juta dolar AS. Selanjutnya, diplomasi ekonomi tahun 2022 berhasil mengamankan 6 komitmen terkait ekspor komoditas strategis nasional, yakni sawit, pupuk, kayu, bahan konsumsi, pala, hingga proyek baterai kendaraan listrik dengan total nilai sekitar 8,7 miliar dolar AS. Terakhir,

³¹ Kementerian Luar Negeri, "Laporan Kinerja 2022,"

komitmen peningkatan BUMN Go Global dengan mendorong kesepakatan antara PT Pindad, PT PAL, dan PT PGN untuk memasarkan produknya ke luar negeri dengan total nilai ekspor sekitar 120 juta dolar AS.

Tabel 9. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Diplomasi Ekonomi Indonesia TA 2022

Indikator	TA 2022		Persentase Capaian	Notifikasi Capaian	Sumber Data
	Target	Capaian			
Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor perdagangan	85,52%	149,56%	120%		Kementerian Luar Negeri
Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor investasi	93,34%	131,13%	120%		Kementerian Luar Negeri
Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata	77,88%	147,42%	120%		Kementerian Luar Negeri

Sementara itu, pelaksanaan diplomasi ekonomi juga menjaring investasi yang cukup luas yang tersebar pada empat jenis komitmen. Pertama komitmen investasi pada IKN dan Proyek Strategis Nasional yang dilakukan bersama Tiongkok, Jepang, Korea Selatan dan Inggris. Kemudian, komitmen investasi pada sektor energi hijau yang terfokus pada penguatan kapasitas nasional dalam industri baterai kendaraan listrik dan pengembangan kendaraan listrik. Ketiga, diplomasi ekonomi berhasil mendorong penguatan pada sektor strategis diantaranya pembangunan pusat pemeliharaan dan perawatan Tatra dan peningkatan kapasitas manufaktur produk pertahanan udara serta produksi alat kesehatan. Terakhir, komitmen investasi yang masuk pada tahun 2022 adalah dukungan terhadap konektivitas wilayah perbatasan. Indonesia berhasil mengamankan investasi pembangunan menara telekomunikasi 4G di wilayah terluar Indonesia serta pembangunan jalan tol Trans Sumatera.

Pada sektor pariwisata diplomasi ekonomi telah menyelenggarakan 673 pameran budaya dan pariwisata yang dilengkapi dengan pelaksanaan 50 kunjungan jurnalistik ke destinasi wisata. Terdapat beberapa highlights program sebagai pelaksanaan diplomasi ekonomi pada sektor pariwisata: 1) Penyelenggaraan Bali and Beyond Travel Fair; 2) *Familirization Trip* bersama CEO agent besar travel di

Kolombia; 3) *Familiarization Trip* bersama top 3 *travel vlogger* asal Aljazair; 4) Pameran pada Katara Celebration During the World Cup 2022; 5) Pameran pariwisata internasional, Place2Go Kroasia; dan 6) Promosi pada acara Bay Light Mixer Art Inspired by TRAVEL. Dengan penyelenggaraan kegiatan tersebut diharapkan dapat memacu pemulihan sektor pariwisata nasional pasca pandemi COVID-19 dan kolaborasi lebih dalam dengan negara mitra dalam mendorong mobilitas masyarakat antarnegara.

Bab V

ANALISIS DAMPAK

5.1. Analisis Dampak terhadap Pembangunan Bidang Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional

Dalam melakukan analisis dampak, laporan ini akan menggunakan dua alat ukur yang dapat menginterpretasikan implikasi (*outcome*) pengimplementasi kebijakan luar negeri secara komprehensif, yakni Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia (Indonesia Foreign Policy Index/IFPI) yang diterbitkan oleh Bappenas dan Asia Power Index yang diterbitkan oleh Lowy Institute. Pemilihan kedua indeks didasari kebutuhan untuk melakukan pembuktian lintas instrumen di mana penilaian dari IFPI menekankan aspek karakteristik Indonesia dan penilaian Asia Power Index menggarisbawahi kacamata internasional memersepsikan Indonesia. Dengan demikian, analisis dampak yang disusun memiliki nilai validasi dan akuntabilitas yang tinggi.

IFPI disusun sebagai instrumen praktis dalam melakukan evaluasi terhadap strategi, kebijakan, dan program-program yang telah dilaksanakan dalam periode tertentu oleh Pemerintah Indonesia (tidak hanya oleh Kementerian Luar Negeri).³² Evaluasi yang dilakukan bersifat komprehensif dan berbasis data sehingga strategi, kebijakan dan program-program yang dirancang memiliki bukti yang memadai untuk membuat sumber daya yang digunakan dapat lebih tepat sasaran dan tepat guna. Dalam strukturnya, IFPI tersusun atas empat dimensi utama yaitu Keamanan, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Kepemimpinan dan Tata Kelola di Tingkat Global dan Regional.

Sementara, Asia Power Index merupakan alat analisis yang bertujuan untuk melacak pergeseran distribusi kekuatan di kawasan sehingga diskusi dan diseminasi terkait geopolitik Asia semakin tajam dan berkembang.³³ Pemilihan kawasan Asia didasari oleh pertimbangan kehadiran aktor utama internasional saat ini yang berada di Asia (Tiongkok, Jepang dan India) dan Pasifik (Amerika Serikat). Pada tahun 2025, dua pertiga populasi dunia akan bermukim di Asia, dibandingkan negara-negara Barat. Transformasi ekonomi di Asia mengubah distribusi kekuatan global. Sama pentingnya, ketegangan antar kekuatan di kawasan ini akan

³² Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional, "Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia 2022," (Jakarta: Bappenas, 2022)

³³ Lowy Institute, "Asia Power Index 2023," (Sydney: Lowy Institute, 2023)

menentukan perang dan perdamaian di abad ke-21. Asia Power Index tersusun atas delapan variabel utama, yakni Kapabilitas Ekonomi, Kapabilitas Militer, Ketahanan Nasional, Proyeksi Sumber Daya, Hubungan Ekonomi, Jejaring Pertahanan, Pengaruh Diplomasi, dan Pengaruh Budaya.

Untuk memudahkan perbandingan antara IFPI dan Asia Power Index maka dilakukan penyetaraan terhadap variabel utama penopang indeks. Arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang politik luar negeri dan kerja sama internasional juga disandingkan sehingga menampilkan benang merah antara kebijakan yang diimplementasi terhadap *outcome* yang tercapai. Kategorisasi akan dibuat mengikuti arah kebijakan dan strategi dengan empat kegiatan prioritas sebagai acuan utama. Berikut penyetaraan variabel yang telah ditentukan.

Tabel 10. Penyetaraan Variabel Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional dengan Indonesia Foreign Policy Index dan Asia Power Index

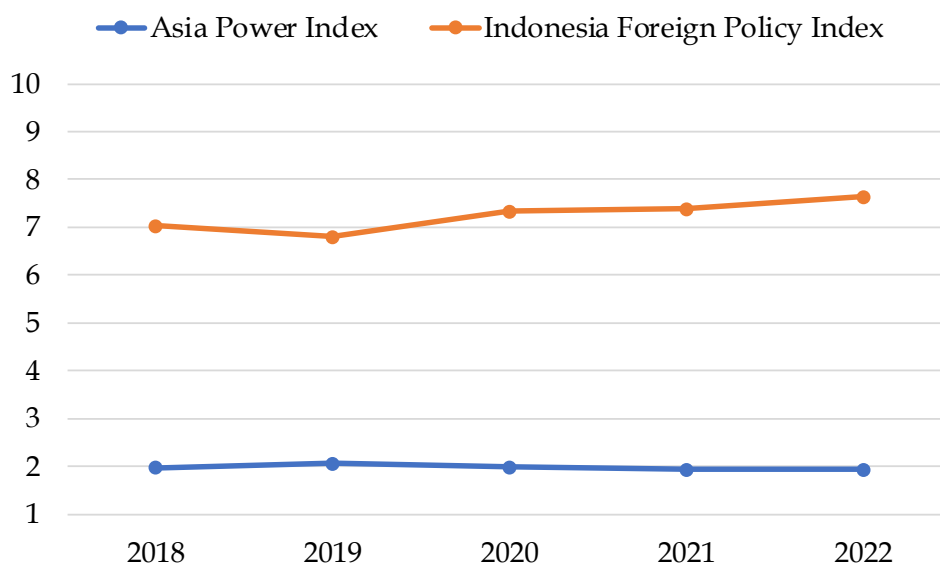
PP Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	Indonesia Foreign Policy Index	Asia Power Index
KP Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri	Politik	Kapabilitas Militer
		Ketahanan Nasional
		Jejaring Pertahanan
KP Penguatan Kerja sama Pembangunan Internasional (termasuk praktik diplomasi ekonomi)	Ekonomi	Kapabilitas Ekonomi
		Hubungan Ekonomi
		Proyeksi Sumber Daya
KP Peningkatan Citra Positif di Dunia Internasional	Sosial-budaya	Pengaruh Budaya
KP Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global	Kepemimpinan	Pengaruh Diplomasi

Variabel politik pada IFPI mencakup diplomasi politik-keamanan terkait penjagaan atas teritori kedaulatan hingga perlindungan WNI di luar negeri. Dengan demikian, variabel tersebut akan disetarakan dengan Kapabilitas Militer, Ketahanan Nasional, serta Jejaring Pertahanan dari Asia Power Index melalui asumsi bahwa diplomasi yang dilakukan menghasilkan penambahan terhadap kekuatan nasional.

Sementara itu, pada variabel ekonomi IFPI mengukur capaian diplomasi ekonomi terkait perdagangan, investasi, pariwisata, hingga harmonisasi regulasi nasional-internasional. Oleh karena itu, variabel ekonomi IFPI akan disetarakan dengan tiga variabel Asia Power Index, yakni Kapabilitas Ekonomi, Hubungan Ekonomi, dan Proyeksi Sumber Daya. Kembali asumsi yang digunakan adalah diplomasi yang diterapkan menjadi instrumen pendorong dari peningkatan kekuatan ekonomi nasional.

Sedangkan untuk variabel sosial-budaya dan kepemimpinan dari IFPI akan disandingkan dengan variabel pengaruh budaya dan pengaruh diplomasi milik Asia Power Index. Penyetaraan variabel sosial-budaya dan proyeksi budaya dilakukan karena keduanya menangkap upaya diplomasi dalam mempromosikan budaya nasional di tataran global. Kondisi serupa juga diterapkan pada variabel kepemimpinan dan variabel pengaruh diplomasi dikarenakan keduanya mengukur kemampuan dan posisi Indonesia di fora internasional.

Grafik 12. Tren Nilai Indonesia Foreign Policy Index dan Asia Power Index 2018–2022³⁴



³⁴ Asia Power Index mengeluarkan laporan tahun 2023 yang menyajikan penilaian lima tahun terakhir sejak penyusunan indeks. Oleh karena itu, hasil penilaian yang diterbitkan tahun 2023 dapat dipergunakan untuk menilai performa tahun 2022. Adapun hasil nilai Asia Power Index dan variabel turunannya dikonversi dalam skala 1-10 agar memudahkan persandingan yang dilakukan.

Kedua penilaian menunjukkan tren pertumbuhan yang rendah, baik positif (IFPI) ataupun negatif (Asia Power Index), terhadap pembangunan kebijakan luar negeri Indonesia. Berangkat dari penilaian tersebut dapat ditarik dua hipotesis atas dampak pembangunan politik luar negeri Indonesia. Pertama, secara internal, pembangunan kebijakan luar negeri Indonesia sudah baik sebagaimana peningkatan IFPI pada tahun 2022 menjadi 7,64 dari 7,39. Adapun capaian signifikan yang mendorong penilaian tersebut adalah Kepemimpinan Indonesia dalam forum G20 di tengah ketegangan antara negara adidaya memuncak. Pergolakan geopolitik akibat Perang Rusia-Ukraina, instabilitas di Laut Tiongkok Selatan dan Selat Taiwan, hingga pergolakan internal Myanmar mengakibatkan ketidakpercayaan negara terhadap arsitektur dunia yang berfungsi mengelola dan menjaga stabilitas tatanan global. Dalam situasi yang cukup genting Indonesia dapat memainkan perannya sebagai stabilisator untuk mengedepankan pembangunan kepercayaan antarpihak dan mengupayakan *détente*.

Indonesia berhasil menghadirkan para pihak dan berfokus untuk membahas tiga isu utama, yakni arsitektur kesehatan global, ekonomi digital hingga transisi energi, dalam menyelesaikan permasalahan bersama yang lebih besar. Agenda tersebut berangkat dari proses KTT G20 terdahulu untuk menjamin keberlanjutan agenda pembangunan dengan menambahkan nilai tambah sebagai jejak kepemimpinan Indonesia. Oleh karena itu, Presidensi G20 Indonesia mendorong prinsip inklusivitas agar semua memanfaatkan kesepakatan yang didiskusikan, tidak hanya bagi anggota G20 tetapi juga seluruh negara di dunia. Untuk itu, Indonesia mendorong representasi negara berkembang dan tertinggal dengan turut mengundang AU, NEPAD, PIF, dan CARICOM serta mengikutsertakan semua stakeholders dari berbagai elemen, seperti organisasi internasional, filantropi, organisasi sipil, tenaga kerja, kelompok epistemik, hingga kelompok marginal. Indonesia berhasil menyusun dokumen kesepakatan berupa G20 Roadmap for Stronger Recovery and Resilience dan G20 Principles to Scale Up Blended Finance yang diharapkan dapat menjadi jembatan dalam menyelesaikan permasalahan global terkini.³⁵

Namun demikian, progres tersebut tidak dapat mengimbangi persaingan kemajuan kapasitas negara di kawasan, utamanya Indo-Pasifik, secara relatif. Hal tersebut ditunjukkan oleh pertumbuhan penilaian Asia Power Index yang mengalami stagnasi diambang 1,9 hingga 2 dari 10. Terdapat dua hipotesis yang mengakibatkan kecenderungan perolehan nilai tersebut. *Pertama*, kapasitas nasional yang tidak dapat mengikuti pesatnya perkembangan zaman dibandingkan dengan negara-negara lain walaupun sudah didukung oleh

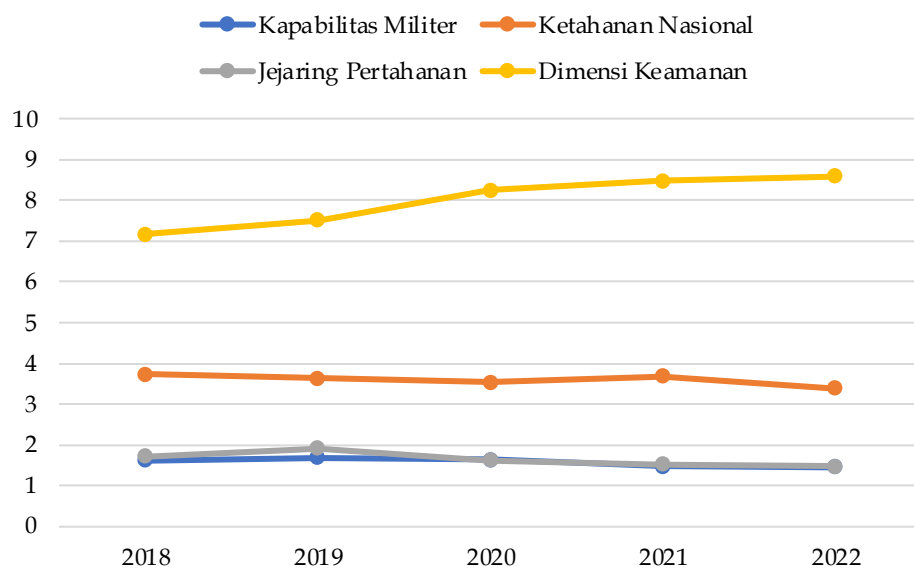
³⁵ Diskusi Kelompok Terpumpun dengan Pakar dan Praktisi Kebijakan Luar Negeri Indonesia, 31 Oktober 2023

kebijakan luar negeri dan diplomasi yang proaktif. *Kedua*, terputusnya benang merah antara kebijakan di tingkat nasional dengan kebijakan di tingkat global dalam mengakomodasi kepentingan nasional. Ketidakcocokan yang terjadi justru menciptakan efek yang berlawanan dari pelaksanaan kebijakan luar negeri yang awalnya ditujukan sebagai stimulus malah menjadi kerikil dalam pembangunan nasional. Kedua hipotesis tersebut berangkat dari hasil penilaian variabel dengan pertumbuhan positif hanya terjadi pada dua dari delapan variabel Asia Power Index Indonesia, Hubungan Ekonomi dan Pengaruh Diplomasi, dari tahun sebelumnya.

5.1.1. Analisis Dampak terhadap Spektrum Politik-Keamanan

Berdasarkan variabel politik-keamanan tren serupa timbul dengan pertumbuhan progresif dari variabel IFPI (Dimensi Keamanan) sedangkan penurunan ataupun stagnasi dari variabel Asia Power Indonesia (Kapabilitas Militer, Ketahanan Nasional, dan Jejaring Pertahanan). Peningkatan terjadi pada Dimensi Keamanan terkait penjagaan kedaulatan teritori dan perlindungan WNI walaupun masih belum dapat menekan dukungan asing terhadap kelompok pemberontak yang menciptakan disruptsi di daerah. Sedangkan, menurut Asia Power Indonesia dalam spektrum politik-keamanan terdapat penurunan pada variabel Ketahanan Nasional, Kapabilitas Militer dan Jejaring Pertahanan.

Grafik 13. Tren Variabel Politik-Keamanan Indonesia Foreign Policy Index dan Asia Power Index 2018-2022

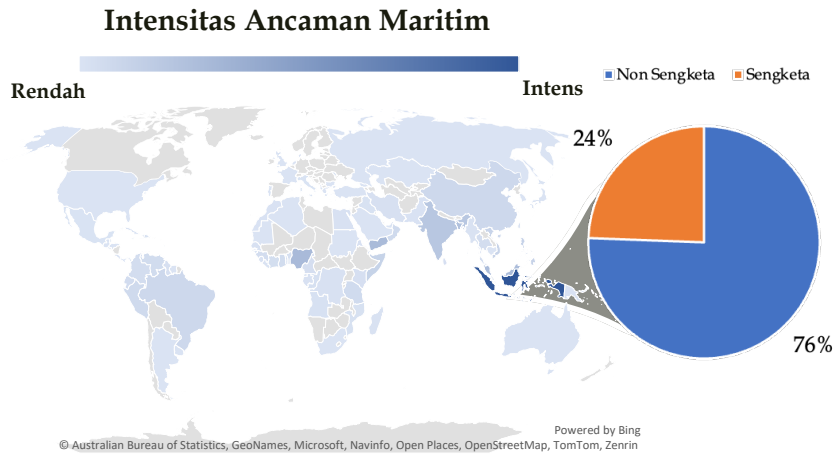


Keberhasilan Dimensi Keamanan tersebut cenderung ditunjukkan dari kebijakan luar negeri Indonesia dapat melindungi keamanan tradisional Indonesia, seperti integritas wilayah dan perlindungan WNI. Namun, untuk saat ini kebijakan luar negeri Indonesia dipandang masih belum bisa mengakomodasi perlindungan terhadap keamanan non-tradisional yang mulai berkembang secara signifikan seperti kejahatan siber. Di sisi lain, penurunan terhadap Ketahanan Nasional diakibatkan rentannya Indonesia terhadap gejolak geoekonomi yang menurun tajam sekitar 20% dari tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan kebijakan luar negeri Indonesia kurang adaptif dalam merespons gejolak geoekonomi yang terjadi di mana Indonesia belum mampu secara cepat menggeser ketergantungan terhadap mitra ekonomi terkini. Sementara itu, penurunan juga terjadi pada Kapabilitas Militer dan Jejaring Pertahanan walaupun tidak terlalu signifikan. Penurunan tersebut menunjukkan kebijakan luar negeri yang masih belum memberikan prioritas terhadap pembangunan relasi yang ditujukan untuk melakukan pembangunan kekuatan nasional.

Lebih dalam, Indonesia dengan wilayah yang sangat luas tidak didukung dengan sosok yang disegani oleh negara tetangga dan tingginya potensi ancaman maritim, seperti pembajakan, penyelundupan, dan penangkapan ikan ilegal. Selama tahun 2022 tercatat 467 insiden IUUF yang dilakukan oleh kapal asing yang 76% terjadi di area kedaulatan ataupun hak berdaulat Indonesia dan telah ditindak oleh aparat Indonesia. Sedangkan, 24% lainnya masih belum bisa dilakukan penindakan karena terjadi di wilayah sengketa yang belum ditetapkan batasnya oleh Indonesia dan negara mitra. Aktivitas IUUF tersebut dinilai tidak terjadi insidental namun bersifat kesengajaan dengan adanya kapal penjaga pantai-laut (*coast guard*) yang mendampingi. Pada 2022 tercatat 20 kapal penjaga berasal dari Vietnam dan 7 dari Tiongkok hadir di sekitar wilayah batas perairan Indonesia.³⁶

³⁶ Indonesia Ocean Justice Initiative, "Laporan Deteksi Ancaman Keamanan Maritim dan Pelanggaran Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUUF) Tahun 2022," (Jakarta: IOJI, 2022)

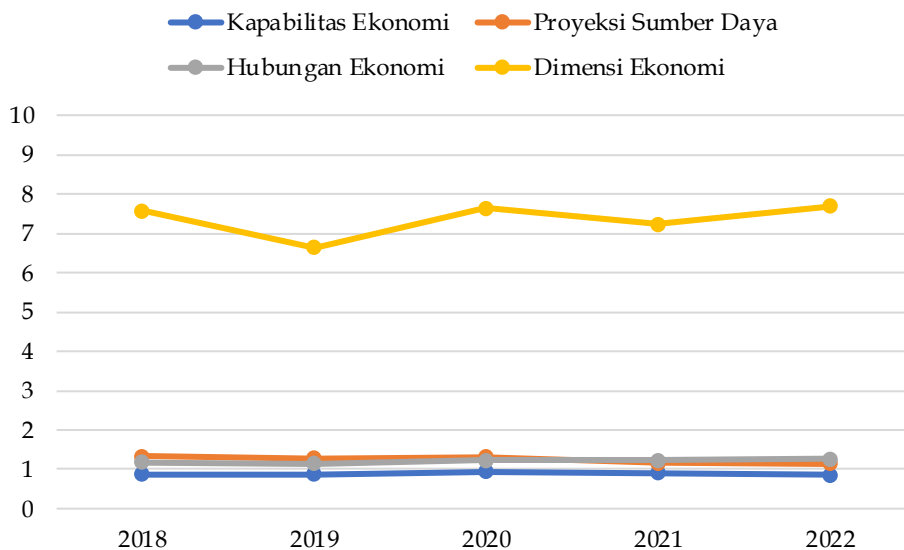
Gambar 3. Kejahatan Maritim di Dunia dan Tingkat Ancaman Intrusi di Teritori Indonesia



5.1.2. Analisis Dampak terhadap Spektrum Ekonomi

Berdasarkan variabel ekonomi pertumbuhan progresif terjadi pada variabel IFPI (Dimensi Keamanan) dibandingkan variabel Asia Power Index (Kapabilitas Ekonomi, Proyeksi Sumber Daya, dan Hubungan Ekonomi) yang mengalami penurunan. Peningkatan terjadi pada Dimensi Ekonomi terkait pulihnya aktivitas ekonomi Indonesia sebelum masa pandemi. Sedangkan, menurut Asia Power Index dalam spektrum ekonomi terdapat penurunan ketiga variabel utamanya pada Kapabilitas Ekonomi. Penurunan tersebut mayoritas diakibatkan performa Indonesia secara relatif belum dapat mengikuti perkembangan negara-negara di kawasan.

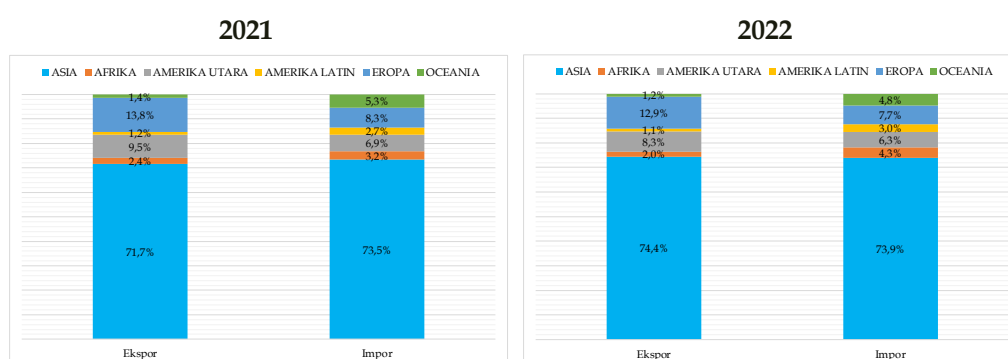
Grafik 14. Tren Variabel Ekonomi Indonesia Foreign Policy Index dan Asia Power Index 2018–2022



Pada Dimensi Ekonomi pertumbuhan cukup signifikan terjadi pada upaya pemulihan hubungan perdagangan dan pariwisata. Prestasi tersebut terefleksikan dari pertumbuhan positif ekspor Indonesia yang tumbuh mencapai 28% dengan jarak terhadap pertumbuhan ekspor negara *emerging power* lainnya sebesar 11%.³⁷ Sementara untuk pariwisata dapat meningkatkan lebih dari 3,5 juta wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia. Sedangkan, tren penurunan pada variabel Kapabilitas Ekonomi, Proyeksi Sumber Daya, dan Hubungan Ekonomi, diakibatkan oleh rendahnya daya saing ekonomi Indonesia, utamanya terkait produksi berbasis teknologi tinggi, dan keterikatan investasi kawasan. Posisi Indonesia dalam perekonomian regional ataupun global masih belum bergeser menjadi basis produksi walaupun menyimpan potensi demografi yang digadang sebagai katalis Indonesia sebagai negara dengan perekonomian terbesar keempat pada tahun 2075. Upaya kebijakan luar negeri Indonesia dalam mendorong transfer teknologi masih rendah mengakibatkan Indonesia masih berkutat pada partisipasi awal (*forward participation*) yang kental terhadap komoditas bahan mentah.

Lebih lanjut, performa diversifikasi perdagangan masih belum memberikan dampak yang signifikan terlihat dari proporsi neraca perdagangan nasional yang masih terkonsentrasi di Kawasan Asia dan terjadi penurunan interaksi dagang dengan negara mitra di Kawasan Non-Asia.³⁸ Dalam menghadapi kondisi tersebut kebijakan pendekatan yang diambil telah sesuai melalui eksplorasi perjanjian dagang dengan negara di kawasan Afrika dan Amerika Latin berbentuk PTA untuk mempertajam penetrasi pasar potensial.

Gambar 4. Persebaran Ekspor Impor Indonesia 2021 dan 2022

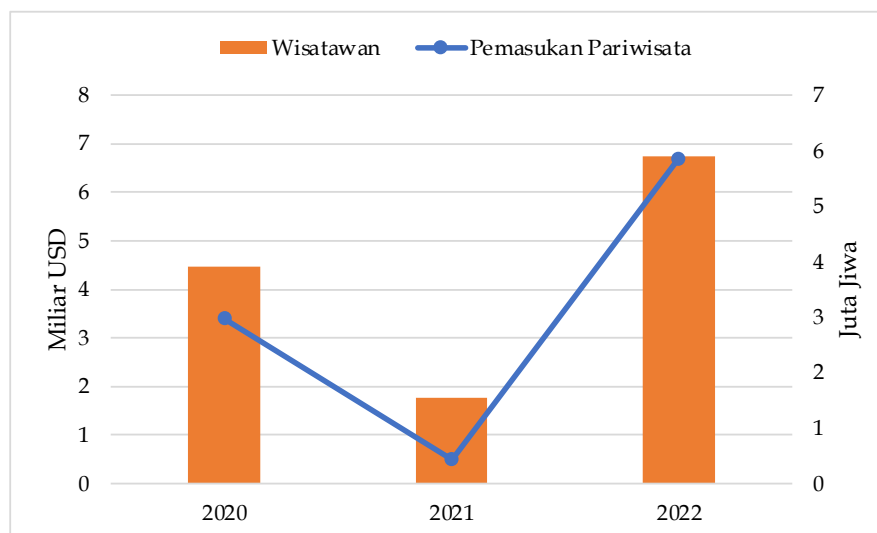


³⁷ International Trade Centre, "Trade Map," diakses pada 24 Desember 2023 <https://www.trademap.org/Index.aspx>

³⁸ Badan Pusat Statistik, "Volume Impor Menurut Negara Asal Utama," diakses pada 24 Desember 2023 <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTAzNSMx/volume-impor-menurut-negara-asal-utama--berat-bersih-ribu-ton---2000-2022.html>; dan Badan Pusat Statistik, "Volume Ekspor Menurut Negara Tujuan Utama," diakses pada 24 Desember 2023 <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTAzNSMx/volume-impor-menurut-negara-asal-utama--berat-bersih-ribu-ton---2000-2022.html>

Sementara itu, performa promosi pariwisata menunjukkan dampak positif dengan peningkatan arus masuk 4 juta wisatawan mancanegara dan pemasukan sektor wisata hingga 6 miliar dolar AS dari tahun sebelumnya. Hal yang sama pada sektor investasi dengan sumbangsih realisasi dari hasil promosi dan peninjauan Perwakilan RI mencapai 52% atau setara 483 ribu lapangan kerja.

Grafik 15. Pertumbuhan Pariwisata Indonesia 2020–2022



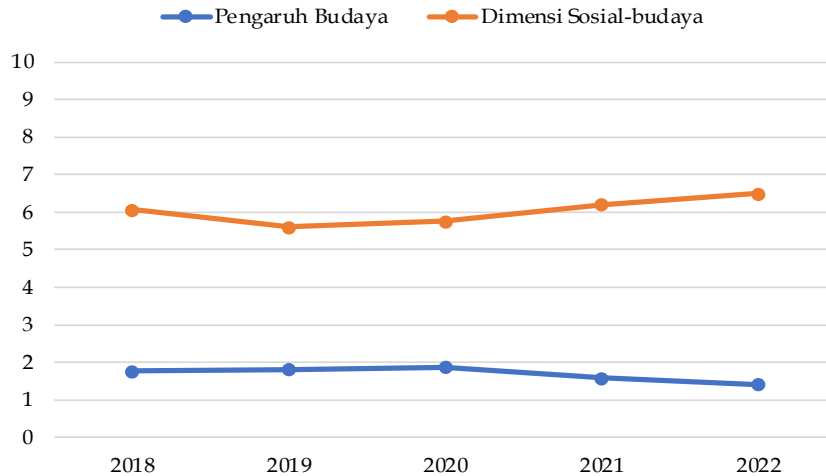
5.1.3. Analisis Dampak terhadap Spektrum Sosial-Budaya

Berdasarkan variabel sosial-budaya pertumbuhan progresif terjadi pada Dimensi Sosial-budaya (IFPI) dan penurunan terhadap variabel Proyeksi Budaya (Asia Power Index). Tren progresif tersebut dihasilkan dari peningkatan keikutsertaan film Indonesia pada festival internasional untuk IFPI. Sedangkan, penurunan yang terjadi diakibatkan oleh rendahnya mobilitas antara masyarakat Indonesia dan publik asing.

Pertumbuhan Dimensi Sosial-budaya didukung oleh proaktifnya industri perfilman di tingkat internasional serta pulihnya kapasitas Indonesia dalam memberikan beasiswa bagi warga negara asing untuk belajar di Indonesia. Dengan postur perkembangan tersebut proyeksi citra positif Indonesia di tingkat internasional membaik sebagaimana realisasi Indeks Citra Indonesia. Di sisi lain, penurunan pengaruh budaya Indonesia oleh Asia Power Index diakibatkan oleh menurunnya mobilitas individu, utamanya dalam menarik migran internasional untuk datang ke Indonesia. Menurut Lowy Institute, hal tersebut mayoritas

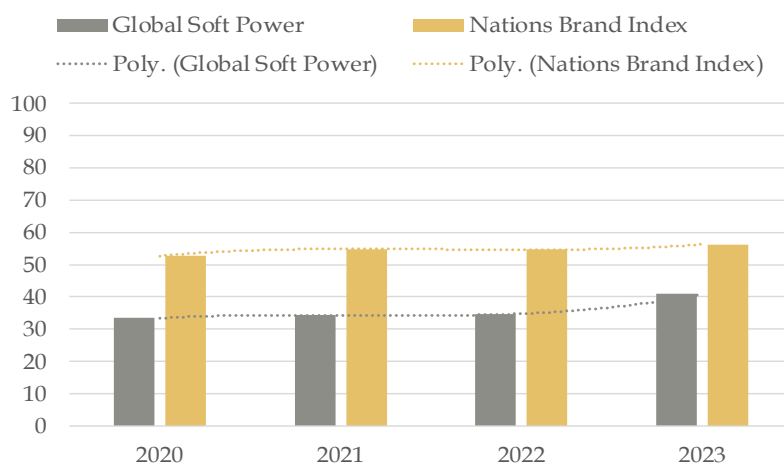
dipengaruhi oleh minimnya konektivitas internasional dengan Indonesia dan menurunnya Indonesia sebagai *top of mind* lokasi untuk berwisata.

Grafik 16. Tren Variabel Sosial-Budaya Indonesia Foreign Policy Index dan Asia Power Index 2018–2022



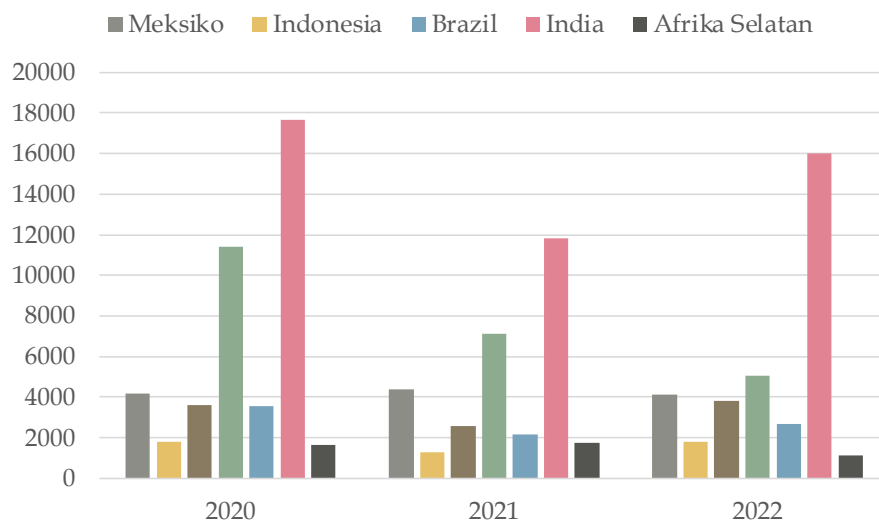
Analisis lebih luas dengan menggunakan alat ukur yang dirilis oleh lembaga pemeringkat *soft power* lainnya, menunjukkan tren yang selaras atas capaian pembangunan nasional. Namun, apabila ditilik lebih dalam, kualitas peningkatan citra Indonesia masih kalah secara daya saing agregat. Kondisi tersebut ditunjukkan dari peringkat yang diperoleh Indonesia pada Global Soft Power Index yang diterbitkan oleh Brand Finance di mana Indonesia meraih peringkat 41 (2020), 45 (2021), dan 47 (2022). Hal yang sama juga ditunjukkan oleh survei Nations Brand Index yang dilakukan oleh Anholt-Ipsos dengan perolehan peringkat 41 (2020), 43 (2021), dan 45 (2022).

Grafik 17. Tren Skor Soft Power Indonesia 2020–2023



Secara empiris daya tarik Indonesia masih rendah pada media barat dengan tren positif walau tergolong rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara yang diusung sebagai *emerging powers*.³⁹ Ke depan diperlukan upaya penguatan citra positif yang lebih kompetitif utamanya pada aspek wisata, budaya masyarakat, dan imigrasi karena ketiga aspek tersebut berperan besar dalam mempengaruhi individu untuk mengunjungi hingga beraktivitas ekonomi di Indonesia.

Grafik 18. Tren Pemberitaan Emerging Power 2020-2022



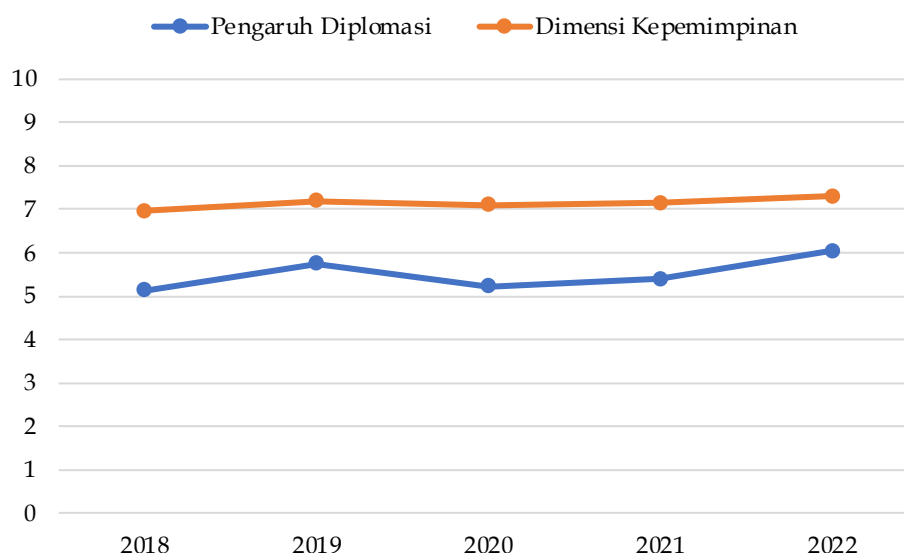
5.1.4. Analisis Dampak terhadap Spektrum Kepemimpinan

Pada spektrum kepemimpinan terdapat tren yang berbeda dari tiga spektrum sebelumnya. Tren positif tumbuh pada variabel Dimensi Kepemimpinan (IFPI) ataupun variabel Pengaruh Diplomasi (Asia Power Index). Pertumbuhan nilai tersebut mayoritas diakibatkan oleh peningkatan kapasitas Indonesia dalam berinteraksi di fora internasional.

Pertumbuhan pada Dimensi Kepemimpinan didominasi oleh keberhasilan kebijakan luar negeri Indonesia untuk berhasil meningkatkan efektivitas penerimaan rekomendasi dalam forum internasional dan menempati posisi strategis untuk mendorong *agenda setting* yang sesuai dengan kepentingan nasional. Sejalan dengan kondisi tersebut peningkatan Pengaruh Diplomasi Indonesia juga dipengaruhi oleh kepemimpinan Indonesia di kawasan ataupun di tataran global serta proyeksi ambisi strategis yang diberlakukan.

³⁹ Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional, "Indeks Kebijakan"

Grafik 19. Tren Variabel Kepemimpinan Indonesia Foreign Policy Index dan Asia Power Index 2018-2022



Berdasarkan penjabaran pada keempat spektrum atas IFPI dan Asia Power Index dapat ditarik bahwa pembangunan kebijakan luar negeri Indonesia memiliki dampak yang cukup beragam pada spektrum masing-masing. Pada spektrum sosial-budaya dampak dari pembangunan kebijakan luar negeri Indonesia cukup rendah walaupun memiliki progres secara internal. IFPI mengalami peningkatan signifikan ditandai kemampuan *soft power* Indonesia tumbuh selama empat tahun terakhir, baik menurut indeks nasional ataupun internasional. Penguatan budaya dengan menarik warga negara asing untuk belajar di Indonesia melalui penyaluran beragam beasiswa perguruan tinggi dan sekolah Bahasa Indonesia. Namun, apabila diukur secara relatif Indonesia masih kurang mampu untuk mengikuti pertumbuhan kolektif *soft power* global. Kondisi tersebut didukung dengan pemberitaan rendah Indonesia dibandingkan *emerging power* lainnya pada media barat. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila Indonesia masih belum dapat mengoptimalkan promosi dan perluasan budaya di tingkat internasional ataupun sebaliknya mengkapitalisasi spektrum sosial-budaya untuk kepentingan nasional.

Tabel 11. Analisis Tingkat Dampak Kebijakan Pembangunan Bidang Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional

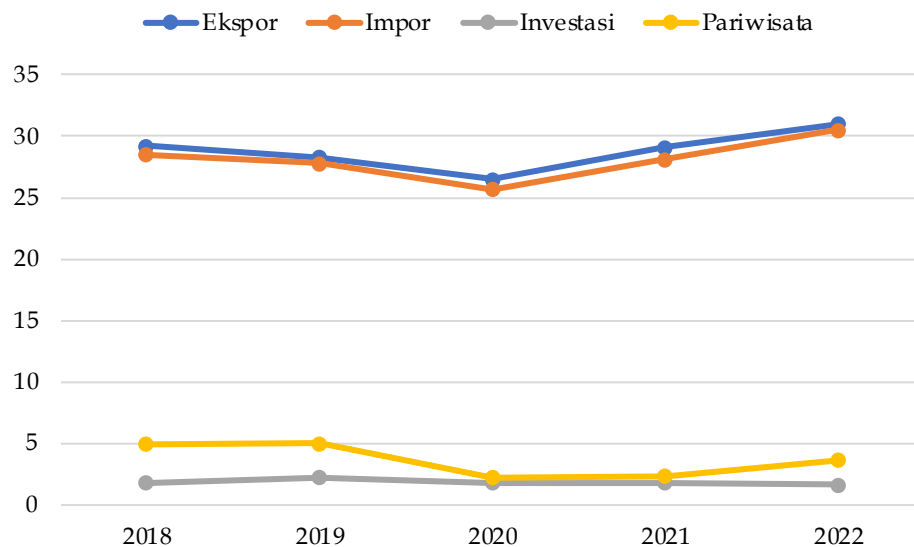
Indonesia Foreign Policy Index	2021	2022	Asia Power Index	2021	2022	Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan	Derajat Dampak
Indeks	7,39	7,64	Indeks	1,94	1,94	PP Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	3,33
Dimensi Politik	8,48	8,58	Kapabilitas Militer	1,48	1,46	KP Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri	2
			Ketahanan Nasional	3,68	3,38		
			Jejaring Pertahanan	1,53	1,48		
Dimensi Ekonomi	7,24	7,69	Kapabilitas Ekonomi	0,90	0,86	KP Penguatan Kerja sama Pembangunan Internasional (termasuk praktik diplomasi ekonomi)	3
			Proyeksi Sumber Daya	1,16	1,15		
			Hubungan Ekonomi	1,23	1,26		
Dimensi Sosial-budaya	6,21	6,49	Pengaruh Budaya	1,59	1,42	KP Peningkatan Citra Positif di Dunia Internasional	2
Dimensi Kepemimpinan	7,14	7,29	Pengaruh Diplomasi	5,40	6,04	KP Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global	4

Dampak serupa juga ditunjukkan pada spektrum politik-keamanan. Pembangunan kebijakan luar negeri Indonesia telah berhasil dalam mengamankan kedaulatan teritori dan perlindungan seluruh insan bangsa di luar negeri. Indonesia merupakan lokasi strategis yang dipenuhi oleh potensi ancaman maritim, dari penyelundupan hingga perompakan. Perairan laut Indonesia juga cukup rentan terhadap sengketa penangkapan ikan di Laut Natuna Utara. Kapal ikan asing asal Vietnam dan Tiongkok kerap melakukan intrusi hak berdaulat Indonesia di mana tercatat pada tahun 2022 terdapat lebih dari 350 intrusi yang dilakukan. Kondisi tersebut diperparah dengan intrusi yang dilakukan didukung oleh pemerintahan negara bersangkutan yang ditandai pendampingan oleh *coast guard* masing-masing pihak. Sementara itu, perlindungan WNI berhasil menyelesaikan 91% kasus yang ditangani pada tahun 2022.

Sayangnya kondisi tersebut juga menjadi pekerjaan rumah yang perlu dibenahi dikarenakan pembangunan bidang kebijakan luar negeri Indonesia pada spektrum politik-keamanan masih berfokus pada aspek tradisional, sebagaimana menurunnya skor-skor Asia Power Index. Aspek politik-keamanan yang diakomodasi perlu diperluas dengan memperhatikan bagaimana diplomasi dapat meningkatkan dan kedaulatan nasional secara komprehensif. Kebutuhan negosiasi dalam menguatkan kapabilitas militer dengan menghadirkan kerja sama dan kolaborasi multi pihak masih cenderung rendah yang mengakibatkan jejaring pertahanan Indonesia melemah.

Sementara itu, pada spektrum ekonomi pembangunan kebijakan luar negeri Indonesia memiliki dampak yang cukup baik di mana diplomasi Indonesia dapat mendorong performa ekonomi nasional secara menyeluruh. Peningkatan pertumbuhan ekspor-impor, penarikan arus investasi asing, hingga percepatan mobilitas masuk wisatawan mancanegara. Apabila ditarik tren lima tahun pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 mencapai angka tertinggi sebesar 5,3% yang menandakan pemulihan Indonesia. Kontribusi sektor perdagangan internasional dan sektor pariwisata memulih secara cepat dan menduduki posisi tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Diplomasi ekonomi yang agresif menjadi bukti keberhasilan tersebut. Di sisi lain, pertumbuhan investasi asing tumbuh dari tahun-tahun sebelumnya sebesar 21,43 miliar dolar AS walaupun masih belum bisa melampaui perolehan tahun 2019.

Grafik 20. Tren Kontribusi Ekonomi Internasional Terhadap PDB Indonesia



Kondisi tersebut sesuai dengan hasil yang ditunjukkan pencapaian Asia Power Index yang juga tumbuh positif pada variabel Hubungan Ekonomi dibandingkan dua variabel lainnya. Performa yang memburuk pada variabel kapabilitas ekonomi diakibatkan oleh rendahnya dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan diplomasi ekonomi. Minimnya tindak lanjut dalam melakukan transfer teknologi menghambat pertumbuhan dan pembangunan postur industri nasional. Indonesia masih terjebak dalam postur industri ekstraktif yang menghasilkan bahan mentah ataupun setengah jadi menjadi komoditas unggulan sehingga menempatkan Indonesia mendominasi pada *forward participation* dibandingkan *backward participation*. Kebutuhan dalam menggaet mitra strategis dalam berkolaborasi untuk meningkatkan kelas Indonesia menjadi mendesak karena hal serupa juga dilakukan oleh negara-negara berkembang lainnya dalam kompetisi ekonomi internasional yang sangat pesat.

Sedangkan, dampak pembangunan politik luar negeri dan kerja sama internasional sangat signifikan terjadi pada aspek kepemimpinan Indonesia di tingkat internasional. Pertumbuhan progresif secara paralel antara IFPI dan Asia Power Index menguatkan asumsi tersebut. Presidensi G20 Indonesia sangat mempengaruhi tingginya penilaian pada Dimensi Kepemimpinan IFPI. Kapasitas Indonesia dalam melakukan *agenda setting* dan penyampaian beragam rekomendasi pada situasi yang cukup tegang antarnegara sepanjang tahun 2022 menjadi titik balik Indonesia untuk menegaskan ulang bahwa Indonesia hadir sebagai *emerging-middle power* alih-alih sebagai *regional power*. Ketekunan strategi Indonesia meraih dukungan dan mencari konsensus merupakan faktor utama menguatkan posisi Indonesia sebagai *emerging-middle power* yang berfungsi sebagai pembangun koalisi

dan kepercayaan bersama terhadap arsitektur multilateral dalam menghadapi permasalahan bersama.

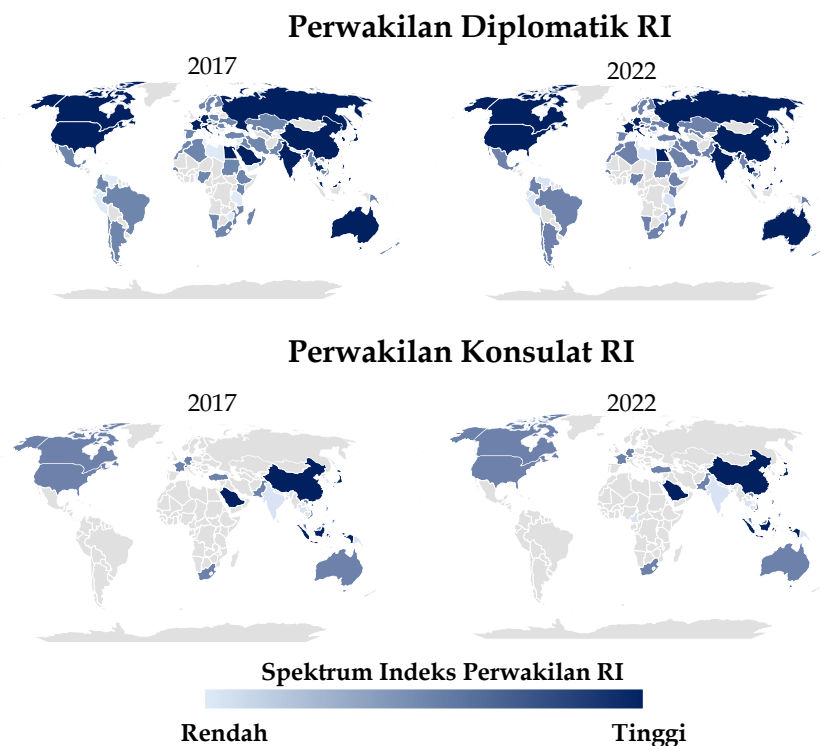
Penilaian serupa juga terjadi pada Asia Power Index yang mengalami peningkatan cukup besar dari 5,4 menjadi 6,04. Kebijakan luar negeri dan diplomasi Indonesia berhasil meyakinkan negara-negara mitra bahwa Indonesia merupakan negara besar tidak hanya dari ukuran fisik teritori ataupun demografi tetapi juga dari kapasitas dalam menyelesaikan isu global. Selain Presidensi G20, Indonesia pada tahun 2022 juga berperan aktif dalam penguatan arsitektur kesehatan di kawasan dan global melalui inisiatif pada forum COVAX Facility dan menjadi co-chairmanship pada the COVAX AMC Engagement Group serta menginisiasi Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-Accelerator). Pro-aktif tersebut tidak hanya memastikan akses dan distribusi yang lebih merata terkait vaksin dan alat kesehatan dalam menghadapi pandemi bagi negara berkembang tetapi juga Indonesia dapat mengamankan 515 ribu dosis vaksin untuk 270 juta penduduk Indonesia. Sementara itu, pada isu kawasan terkait stagnasi atas perkembangan *five points consensus* yang dicetuskan Indonesia dalam merespons krisis Myanmar, Indonesia secara tegas untuk melakukan teguran terhadap pemerintahan junta militer dan mengupayakan untuk mempercepat penetrasi bantuan humaniter untuk masyarakat Myanmar yang terdampak.

Oleh karena itu, kepemimpinan Indonesia di fora internasional yang akan datang perlu berfokus pada tantangan geopolitik dan geoekonomi yang semakin rentan akan potensi konflik dan kebutuhan untuk menegaskan dan membangun kepercayaan terhadap nilai dan norma internasional yang semakin memudar. Kehadiran Presiden Joko Widodo dalam pertemuan forum dan organisasi yang kental akan pengaruh politik, seperti BRICS di Afrika ataupun G7 di Jepang, berpotensi menciptakan polemik akan prinsip bebas aktif dan arah dari kebijakan ekonomi luar negeri Indonesia ke depannya, termasuk potensi kontradiksi dengan kemungkinan Indonesia bergabung dengan OECD, apabila tidak diimbangi dengan arahan ataupun panduan yang jelas dari pemimpin tertinggi. Sementara itu, pada tingkatan dalam negeri perlu diberikan pemahaman bahwa terdapat sejumlah kegiatan yang perlu dilakukan dalam membangun kepemimpinan Indonesia di tingkat internasional walaupun manfaatnya belum tentu dapat dimaksimalkan oleh Indonesia. Salah satu contohnya adalah proses negosiasi *Code of Conduct* yang membutuhkan dukungan logistik yang tidak murah dan berakhir dengan cepat.

5.2. Kebutuhan Dukungan Infrastruktur yang Mumpuni

Infrastruktur diplomasi tentu tidak dapat terlewatkan sebagai variabel penentu dari keberhasilan pelaksanaan diplomasi, termasuk kelengkapan dan kesiapan Kantor Perwakilan Diplomatik ataupun Konsulat di negara tujuan. Pada sisi kelembagaan, Indonesia memiliki 132 Perwakilan RI yang tersebar di 95 negara sahabat yang menempatkannya pada peringkat ke 23 menurut Global Diplomacy Index. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir penyesuaian Indeks Perwakilan RI terlihat pada Perwakilan Diplomatik di Arab Saudi (KBRI Riyadh) yang menurun indeksnya dari kualitas 1 menjadi kualitas 2. Sementara, pada Perwakilan Konsulat terdapat perubahan signifikan dengan penambahan baru KJRI Yaounde di Kamerun.⁴⁰

Gambar 5. Perubahan Postur Perwakilan Diplomatik dan Konsulat Republik Indonesia 2017 & 2022

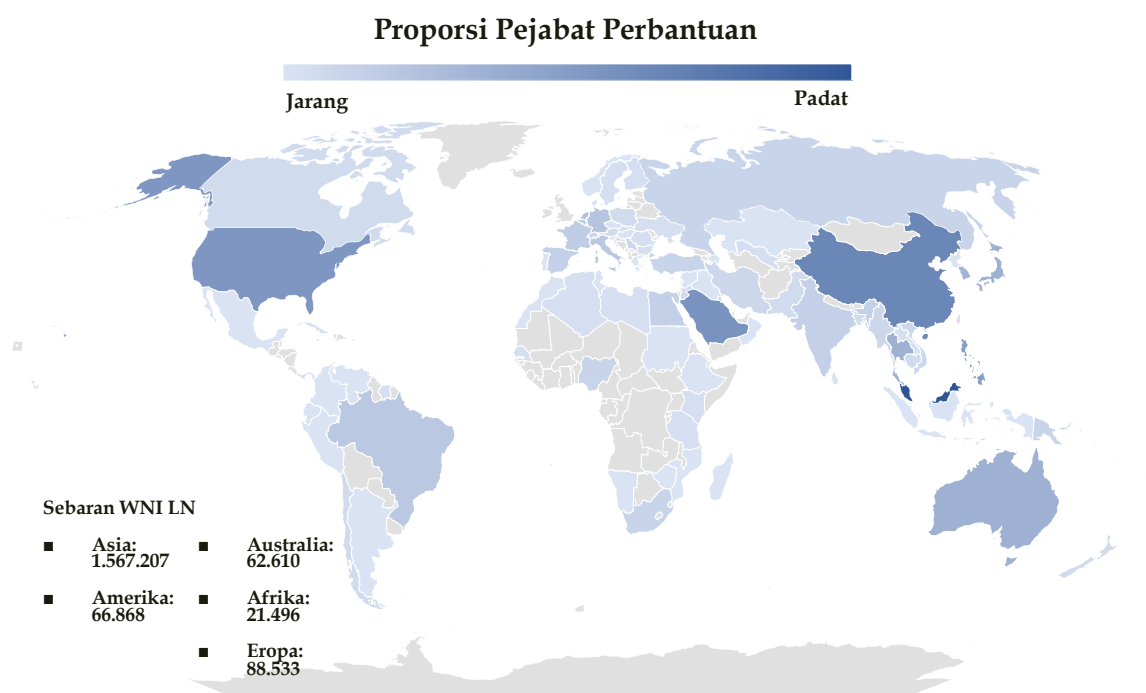


Lebih lanjut, infrastruktur diplomasi diperkuat dengan pejabat perbantuan yang berasal dari berbagai instansi yang tersebar di masing-masing kantor Perwakilan RI. Persebaran ini telah memperhitungkan komposisi warga negara Indonesia di masing-masing kawasan serta jaringan perdagangan nasional. Hal tersebut

⁴⁰ Kementerian Luar Negeri, "Indeks Perwakilan Republik Indonesia,"

diperlihatkan 8 dari 10 kantor Perwakilan RI yang memiliki pejabat perbantuan yang tinggi berada di kawasan Asia. Ke depannya, perlu reorganisasi ataupun penambahan pejabat perbantuan pada negara mitra strategis yang memiliki pasar potensial dan material strategis, seperti Afrika dan Amerika Latin, untuk membantu para diplomat mengamankan kepentingan nasional. Namun demikian, postur kelembagaan saat ini belum ada perubahan signifikan utamanya terkait pergeseran ataupun pengembangan pada mitra strategis yang berada pada pasar potensial dan material strategis, khususnya pada dimensi ekonomi. Pasalnya, Indeks Perwakilan RI memperhitungkan kebutuhan sumber daya, manusia ataupun materi, yang dibutuhkan untuk menggerakkan mesin diplomasi di luar negeri.

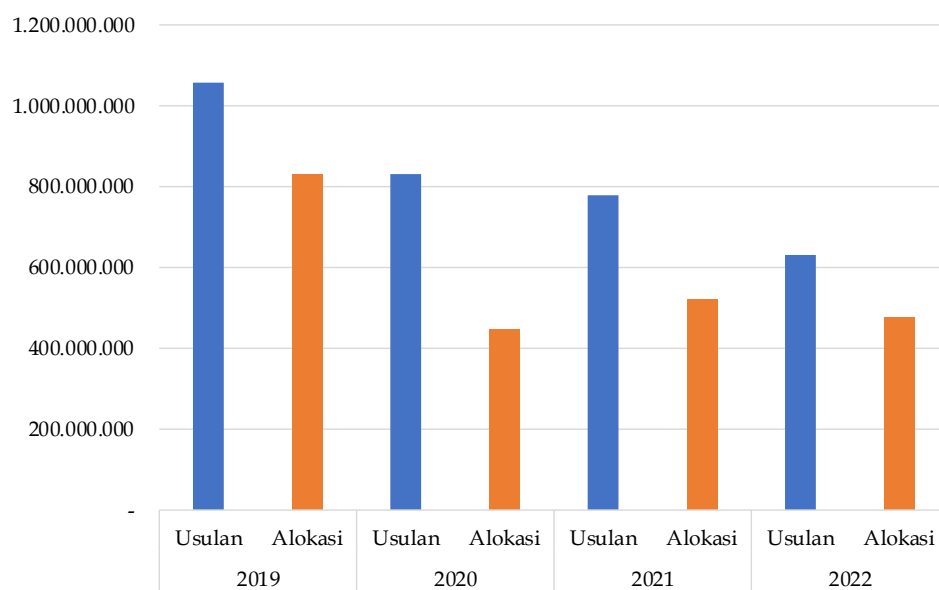
Gambar 6. Persebaran Pejabat Perbantuan pada Perwakilan RI di Luar Negeri



Sementara itu, lemahnya perwakilan diplomatik dan konsulat juga terjadi pada sisi pendanaan. Dalam melaksanakan lima fungsinya (mewakili, mempromosikan, melindungi, menegosiasi, dan melaporkan) di negara tujuan, perwakilan kerap terhambat dengan pendanaan yang tidak terpenuhi secara penuh dari perencanaan awal. Kantor perwakilan pada akhirnya melakukan kompromi guna memenuhi target dengan keterbatasan yang ada, baik itu dari segi kualitas ataupun kuantitas. Kondisi tersebut belum mengalami perbaikan sebagaimana bagan berikut. Dalam lima tahun terakhir, pemenuhan alokasi anggaran untuk Perwakilan RI tertinggi

terjadi pada tahun 2019 dengan terpenuhinya 79% dari usulan pendanaan awal. Sedangkan pemenuhan terendah terjadi pada tahun 2020 dengan terpenuhinya 54% alokasi anggaran dari usulan rencana awal.⁴¹ Sempitnya kapasitas fiskal yang dimiliki oleh Perwakilan RI tentu menjadi tantangan yang besar, utamanya di negara-negara yang tengah mengalami inflasi sangat tinggi dan kondisi nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat.

Grafik 21. Tren Usulan dan Alokasi Anggaran Perwakilan RI (BBNO) 2019–2022



Untuk melakukan evaluasi lebih mendetail, laporan ini melakukan survei lapangan pada dua sampel kantor Perwakilan RI, satu kantor di negara unggulan (Jerman) dan satu kantor di negara potensi (Ceko). Kedua perwakilan tersebut dipilih dengan mempertimbangkan tingkat intensitas hubungan Indonesia dengan negara tujuan, Jerman dan Ceko, yang cukup tinggi di kawasan Eropa.

5.2.1. Capaian PP Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri di KBRI Berlin

Kedutaan Besar RI di Berlin merupakan kantor pusat Perwakilan RI yang mengelola dua perwakilan konsulat dan juga kantor promosi dagang Indonesia di Jerman (KJRI Frankfurt, KJRI Hamburg, dan ITPC Hamburg). Dalam menjalankan tugasnya sebagai ujung tombak diplomasi KBRI Berlin memiliki beragam capaian

⁴¹ Rekapitulasi Pembahasan Bilateral Rencana Kerja Tahunan Kementerian Luar Negeri bersama Bappenas sejak 2019 hingga 2022

yang mendorong realisasi pembangunan politik luar negeri dan kerja sama pembangunan internasional.⁴²

Pada diplomasi kepemimpinan, KBRI Berlin pro-aktif sebagai perpanjangan suara pemerintah pusat dan berhasil menempati posisi penting diantaranya, 1) Dubes RI menjadi Chair Asia Pacific Ambassador Group (APAG); 2) Dukungan Presiden RI dalam KTT G-7 (termasuk posisi strategis pada publikasi); 3) Dukungan Presiden RI dalam membuka Hannover Messe 2023 bersama Kanselir Jerman; 4) Penguatan posisi Indonesia dalam perkembangan UNCLOS 1982 melalui ITLOS, termasuk *lobbying* BPK menjadi *external auditor* ITLOS; dan 5) Dubes RI diangkat menjadi Sous Sherpa Ocean Panel Indonesia sejak Oktober 2023. Keberhasilan tersebut cukup penting karena memberikan kapasitas Indonesia untuk ikut menentukan *agenda setting* yang akan dibahas pada forum/organisasi internasional terkait.

Sementara itu, pada diplomasi politik-keamanan, KBRI Berlin berhasil dalam mengawal pengiriman dua Kapal Jenis Mine Counter Measures Vessel (MCMV) dari Jerman untuk Indonesia. Selain itu, KBRI Berlin juga membantu mengakselerasi penerbitan izin ekspor Kapal Hidrografi Samudra Jerman untuk TNI AL yang terlambat satu tahun. Selain itu, KBRI Berlin juga membantu mengoordinasikan dan menangani permasalahan WNI yang berada di Jerman. Terdapat 34 kasus WNI yang ditangani dan diselesaikan (didominasi oleh kehilangan dokumen dan 1 kasus penipuan tiket yang masih diselidiki). Terkait persiapan Pemilu TA 2024, KBRI Berlin telah melakukan koordinasi dengan PPLN guna mengakomodir 21.184 pemilih terdaftar di Jerman.

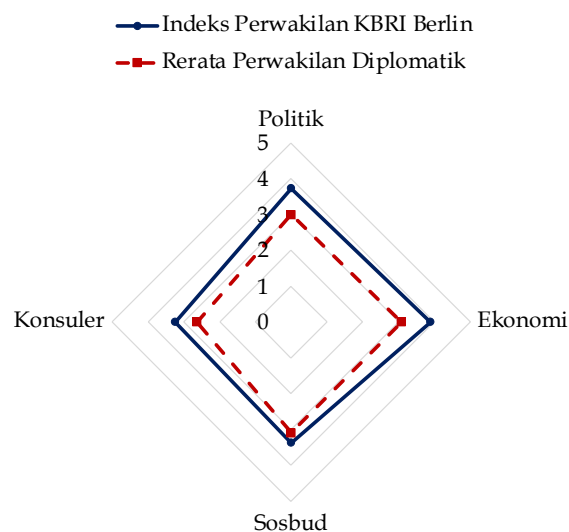
Pada diplomasi ekonomi, KBRI Berlin bekerja cukup keras untuk bisa memperoleh dukungan dari pemerintahan Jerman sebagai salah satu negara berpengaruh di kawasan Eropa terkait polemik perdagangan luar negeri yang tengah dihadapi oleh Indonesia. Berbagai upaya pendekatan dan kegiatan proaktif dilakukan untuk memantapkan Indonesia sebagai *top of mind* mitra dagang internasional di Eropa. Beberapa program kegiatan yang telah berhasil dilakukan oleh KBRI Berlin diantaranya, 1) Menjadi *partner country* Hannover Messe 2023, menghasilkan 8700 kontak bisnis, tambahan transaksi USD 10 juta (di luar kesepakatan MoU ditempat), investasi dan kerjasama bisnis 29,7 Triliun rupiah (EUR 1,8 milyar) dan 2 MoU di tingkat Pemerintah; 2) Memperoleh dukungan eksplisit Kanselir Jerman Olaf Scholz bagi kebijakan hilirisasi industri Indonesia, termasuk *raw minerals* (diplomasi mitigasi dampak implementasi EUDR); dan 3) Mengamankan investasi BASF-Eramet di Maluku Utara untuk pabrik nikel & cobalt senilai USD 2,6 M.

⁴² Kunjungan Lapangan dan diskusi kelompok terpumpun di KBRI Berlin Desember 2023

Sedangkan pada diplomasi budaya dilakukan oleh KBRI Berlin dalam menduniakan budaya dan potensi ekonomi kreatif Indonesia. KBRI Berlin mempromosikan kebudayaan kepada lebih dari 1.000 peserta secara langsung dan 400 peserta secara *daring* yang disertai pelaksanaan *familiarization trip* untuk 2 *influencer* menghasilkan 24 konten dengan total lebih dari 300 ribu *eksposur* yang diperoleh. Selain itu, KBRI Berlin juga membangun kerja sama utamanya di sektor kesehatan dengan mengamankan investasi senilai 4,9 Juta dolar AS, untuk industri farmasi dan alat kesehatan serta kerja sama *triple win nurse to nurse* bagi perawat Indonesia bekerja di Jerman.

Terdapat sejumlah tantangan yang masih dihadapi oleh KBRI Berlin dalam memaksimalkan tugas dan fungsinya sebagai ujung tombak diplomasi Indonesia, utamanya dalam bidang ekonomi. Beberapa tantangan utama yang perlu dihadapi oleh KBRI Berlin diantaranya 1) Hambatan non tarif yang mengikuti aturan EU. Hal ini juga dikarenakan belum adanya perjanjian dagang dengan EU (perundingan Indonesia-EU CEPA masih *on going*); 2) Budaya bisnis di Jerman masih konservatif yakni pendekatan melalui temu langsung, utamanya pameran, menjadi tantangan jika tidak ada dukungan anggaran guna secara konsisten mengikuti pameran tiap tahun. Kebutuhan anggaran ideal 1 kegiatan pameran untuk luasan 200 m2 di Jerman +/- Rp 3,5 M (pameran yang ideal diikuti tiap bulan sehingga total dibutuhkan biaya +/- Rp 42 M per tahun); 3) Kebutuhan litigasi yang tinggi guna perjuangkan komoditas. Indonesia dibanding negara lain masih sangat kurang dalam hal SDM (Indonesia 6-8 ahli, Jerman +/-300 ahli, Amerika Serikat +/- 3.000 orang); dan 4) Rendahnya penguasaan produk Indonesia dari 10 produk yang paling dibutuhkan oleh warga Jerman.

Gambar 7. Posisi Relatif KBRI Berlin Terhadap Indeks Perwakilan RI 2022



Dalam menghadapi tantangan tersebut penyesuaian akan sumber daya, manusia dan materi, sungguh diperlukan. Sayangnya hal tersebut masih belum memperoleh dukungan yang baik dengan stagnannya Indeks Perwakilan KBRI Berlin dalam lima tahun terakhir sebagaimana Gambar 7. Walaupun nilai KBRI Berlin berada diatas rerata Perwakilan Diplomatik, hal tersebut tidak serta merta mengabaikan kebutuhan peningkatan kapasitas dan kapabilitas KBRI Berlin. Persepsi dalam memandang Jerman sebagai mitra utama sebagai suara yang dapat mempengaruhi negara-negara Eropa perlu ditekankan lebih dalam, utamanya dalam konteks persaingan geoekonomi di kawasan dengan Indonesia.



1



3



2



4

1. Duta Besar RI untuk Jerman memberikan penjelasan kepada para pengunjung Pameran Ambiente (pameran kerajinan kayu dan perkakas)
2. Wakil Duta Besar RI untuk Jerman peresmian pada Pameran Anuga (produk unggulan makanan minuman)
3. ITPC Hamburg booth Games from Indonesia pada Gamescom 2023
4. Tim Evaluasi Direktotat Polugri KPI Bappenas melakukan kunjungan lapangan pada pembangunan Kantor KBRI Jerman

5.2.2. Capaian PP Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri di KBRI Praha

KBRI Praha merupakan salah satu perwakilan diplomatik Indonesia yang berada di Eropa Timur. Dalam menjalankan tugasnya sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, KBRI Praha memiliki pelbagai capaian yang berkontribusi terhadap pembangunan politik luar negeri dan kerja sama pembangunan internasional.⁴³ Pada diplomasi kepemimpinan, KBRI Praha mengetuai beberapa forum dan pertemuan penting bagi Indonesia diantaranya, ASEAN Committee in Prague (ACP), ASEAN Day 2022, hingga Prague High Level Dialogue on Indo-Pacific. Sedangkan pada diplomasi perlindungan, KBRI Praha telah mempersiapkan kebutuhan Pemilu TA 2024 dengan berkoordinasi bersama PPLN guna mengakomodir +/- 600 WNI di Ceko (saat ini hanya 383 yang terdaftar di KPU).

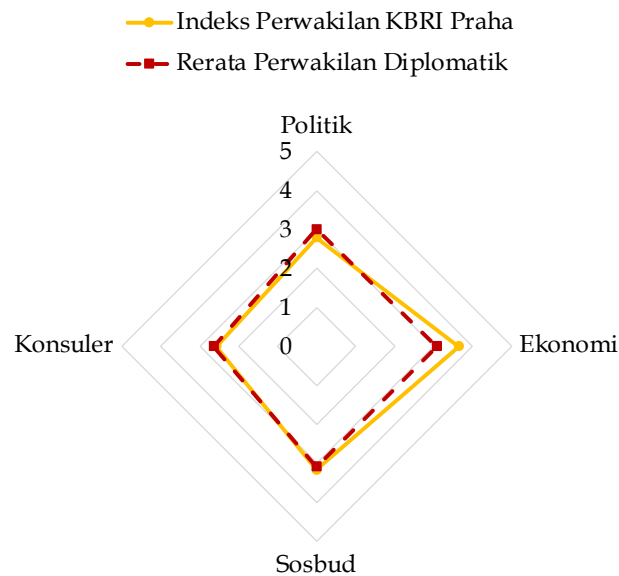
Sementara pada diplomasi ekonomi, KBRI Praha berhasil mengakselerasi aktivitas ekonomi kedua negara pasca pemulihan dari pandemi. KBRI Praha menyelenggarakan Forum Bisnis “Mining Investment Opportunities in Indonesia” serta mengamankan *Letter of Intent* investasi dalam bidang *circular economy* oleh Perusahaan pengolahan limbah Ceko dengan potensi nilai investasi USD 10 Juta (5-10 tahun). Perdagangan Indonesia berhasil tumbuh positif dengan surplus USD525 Juta di tahun 2022 dari total perdagangan USD747,7 Juta. Kemudian, pada diplomasi budaya, KBRI Praha juga aktif hadir mempromosikan kebudayaan Indonesia dengan menghadiri ajang promosi strategis seperti pameran pariwisata Kolem Sveta di Tahun 2022 dan pameran Holiday World 2023.

Tantangan yang utama yang dihadapi oleh KBRI Praha adalah instabilitas harga yang berdampak pada kesejahteraan pegawai. Perang Rusia-Ukraina yang tidak kunjung menunjukkan tanda-tanda deeskalasi menciptakan kerawanan dalam negeri Ceko, utamanya dalam hal kenaikan harga dan kelangkaan barang dan jasa. Selain itu, terdapat pula sejumlah tantangan yang dihadapi oleh KBRI Praha dalam memajukan diplomasi ekonomi nasional. Beberapa tantangan yang dimaksud adalah penyusunan *economic intelligence* yang kerap dikerjakan swakelola dan memanfaatkan *open source* data mengakibatkan hasil kurang maksimal dalam menjadi landasan strategi pasar Ceko secara mendalam. Kondisi tersebut tidak mengherankan apabila perdagangan antara Indonesia dan Ceko masih rendah dengan defisit selama lima tahun terakhir. Faktor lainnya adalah komoditas Indonesia belum memiliki nilai tambah yang dibutuhkan oleh masyarakat Ceko. Belum terintegrasinya promosi TTI di KBRI Praha menjadi tantangan lain yang

⁴³ Kunjungan Lapangan dan diskusi kelompok terpumpun di KBRI Praha Desember 2023

perlu diselesaikan akibat pengelolaan anggaran dan kegiatan K/L yang belum satu pintu melewati Kemenlu.

Gambar 8. Posisi Relatif KBRI Praha Terhadap Indeks Perwakilan RI 2022



Dalam menghadapi tantangan tersebut penyesuaian akan sumber daya, manusia dan materi, sungguh diperlukan bagi KBRI Praha. Sayangnya kondisi tersebut masih belum memperoleh dukungan yang tinggi oleh pemerintah pusat dengan stagnannya Indeks Perwakilan KBRI Praha dalam lima tahun terakhir sebagaimana Gambar 8. Walaupun nilai KBRI Praha telah mendekati nilai rerata Perwakilan Diplomatik, bahkan di atas rerata untuk fungsi ekonomi, hal tersebut tidak terefleksikan di lapangan. Adanya kesenjangan antara penilaian terhadap KBRI Praha dan kondisi terkini menjadi faktor utama mengapa pelaksanaan pembangunan politik luar negeri dan kerja sama pembangunan internasional di Ceko belum berjalan maksimal. Sensitivitas terhadap kondisi terkini dan persepsi Ceko sebagai salah satu pasar potensial yang perlu dioptimalisasi menjadi penting untuk meningkatkan performa kebijakan luar negeri Indonesia ke depan.



1. Duta Besar RI untuk Cekoslovakia menghadiri Pameran Foto Gastronomi Salimatech
2. Duta Besar RI untuk Cekoslovakia meresmikan Pameran Holiday World
3. Tim Evaluasi Direktorat Polugri KPI Bappenas melakukan kunjungan lapangan ke Kantor KBRI Praha

Bab VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Pencapaian Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas pembangunan bidang politik luar negeri dan kerja sama pembangunan internasional pada RKP tahun 2022 mayoritas telah berjalan sebagaimana rencana dan memiliki tren pencapaian di atas target. Pada tahun 2022, capaian Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional mencapai 99,43%, sebagai indikator Prioritas Nasional untuk Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Meskipun tidak setinggi tahun sebelumnya, realisasi tersebut melampaui target awal yang direncanakan. Selama tahun tersebut, Indonesia memimpin 112 pertemuan di berbagai forum internasional, termasuk 45 forum strategis pada tingkat regional dan multilateral.

Di antara keberhasilan tersebut, terdapat 8 dari 9 pencalonan (4 negara dan 5 individu) yang berhasil diusulkan di forum multilateral. Meskipun terdapat tantangan seperti dinamika koordinasi dan kebijakan politik domestik, pandemi COVID-19, konflik geopolitik Perang Rusia-Ukraina, dan gangguan keamanan digital, Indonesia tetap aktif dalam diplomasi internasional.

Pada tingkat Program Prioritas Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, ketiga indikator kinerja utama mencapai dan melebihi target yang telah direncanakan. Indonesia berhasil memimpin forum-forum strategis, meningkatkan Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional menjadi 4,06, dan mencapai tingkat keberhasilan yang tinggi pada Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri.

Kepemimpinan Indonesia dalam forum dan organisasi strategis, seperti G20, berdampak positif terhadap kepentingan nasional. Inisiatif proaktif seperti Komitmen Financial Intermediary Fund (FIF), Resilience and Sustainability Trust (RST), dan Global Blended Finance Alliance (GBFA) membawa komitmen proyek senilai 69,39 miliar dolar AS.

Meskipun Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional mencapai nilai 4,06, terdapat disparitas positif kecil antara target dan capaian. Dimensi pariwisata dan sosial budaya memiliki nilai tertinggi (4,43), sedangkan dimensi ekonomi memiliki nilai terendah (3,81). Keberhasilan ini dipengaruhi oleh performa pemulihan ekonomi, promosi positif oleh Kemenlu, dan stabilitas politik domestik.

Pada Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri, Indonesia berhasil mencapai target dengan disparitas positif yang tinggi. Meski dihadapi oleh dinamika koordinasi dan kebijakan politik domestik, serta dampak pandemi COVID-19 dan konflik geopolitik, diplomasi Indonesia mampu melindungi WNI di luar negeri dengan bantuan pemetaan yang optimal.

Pada KP Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri 2022, terjadi disparitas positif antara target dan capaian, khususnya pada isu pelindungan WNI. Pemerintah berhasil menyelesaikan 30.894 kasus dari 35.149 kasus yang ditangani, termasuk evakuasi WNI dari Ukraina yang sedang menjadi medan pertempuran. Selain itu, penandatanganan Persetujuan Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) RI-Vietnam dan Principles and Guidelines RI-Filipina menjadi pencapaian signifikan.

Dua insiden utama pada tahun 2022 menjadi fokus utama penanganan pelindungan WNI di luar negeri. Pertama, evakuasi WNI dari Ukraina akibat operasi militer khusus Rusia, yang dilakukan dengan kerja sama lintas Kementerian/Lembaga dan Perwakilan RI. Evakuasi berhasil menyelamatkan 133 WNI dan 6 WN Ukraina. Keberhasilan lain adalah pembebasan 22 WNI dari hukuman mati di Malaysia dan Uni Emirat Arab.

Di sisi lain, terdapat revisi target pada Indeks Kemajuan Perundingan Penyelesaian Perbatasan Maritim, mengubah target awal 49,01 menjadi 46,32. Penyesuaian ini disebabkan oleh perubahan prioritas negara, dari Filipina, Vietnam, dan Timor Leste menjadi Malaysia, Filipina, Palau, dan Vietnam. Meskipun demikian, capaian tersebut melampaui target, terutama dengan ditandatanganinya Persetujuan Batas Zona Ekonomi Eksklusif RI-Vietnam pada Desember 2022, yang sebelumnya diestimasi rampung pada tahun berikutnya.

Pada KP Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional 2022, terjadi disparitas negatif antara target dan capaian. Hal ini disebabkan oleh belum pulih sepenuhnya kemampuan dan kapasitas Indonesia dan negara mitra pasca Pandemi COVID-19, sehingga capaian kinerja masih di bawah angka target yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, Indonesia tetap aktif memberikan 28 bantuan kapasitas (*capacity building*) kepada negara berkembang dalam kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST).

Bidang kerja sama mencakup pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, pendidikan (beasiswa), keluarga berencana, kearsipan, perdagangan, industri, dan energi. Meski rendahnya capaian tersebut tidak terhindarkan akibat kondisi Indonesia yang masih belum pulih sepenuhnya, diperlukan strategi alternatif untuk memperbaiki indikator kinerja terkait. Selain itu, Indonesia tetap

melaksanakan kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular untuk pembangunan dan pemajuan kesejahteraan bersama.

Pada KP Peningkatan Citra Positif di Dunia Internasional tahun 2022, terdapat sedikit disparitas positif antara target dan capaian, mencapai nilai 89,42% dari target 86%. Dalam kurun waktu tersebut, 3,678 pemberitaan tentang kebijakan hubungan luar negeri RI dipantau di media massa internasional, dengan 3,289 pemberitaan bersentimen positif atau netral.

Salah satu kegiatan yang mendukung peningkatan sentimen positif adalah program Journalist Visit Program (JVP)/Journalist Friends of Indonesia (JFOI) dan Follow Up ICDD. JFOI 2022, sinergi dari Friends of Indonesia dan Journalist Visit Program, melibatkan jurnalis dari negara sahabat untuk mengembangkan jejaring dan meningkatkan citra positif Indonesia. Outcome dari program ini meliputi peningkatan citra positif melalui pemahaman tentang kemajuan, promosi wisata, budaya, dan kearifan lokal di Indonesia. Pada 2022, JFOI diadakan di Jakarta, Yogyakarta, dan Bali, diikuti oleh 8 jurnalis dari berbagai negara.

Pelaksanaan tindak lanjut dari International Conference on Digital Diplomacy (ICDD) juga menjadi upaya peningkatan pemberitaan positif di media massa internasional. Indonesia, sebagai pelopor pemanfaatan media digital untuk diplomasi, melanjutkan inisiatif ini dengan Workshop on Digital Diplomacy, dalam rangka pengembangan kapasitas negara di kawasan Pasifik dan mendukung Program Prioritas Nasional Indonesia Pacific Forum for Development (IPFD).

Pada KP Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global tahun 2022, terdapat disparitas positif antara target dan capaian keempat indikator. Capaian tersebut melibatkan penerimaan seluruh prakarsa dan rekomendasi di forum multilateral dan ASEAN, serta pelaksanaan tindak lanjut kesepakatan kerja sama bilateral di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Amerika, dan Eropa.

Pada indikator persentase prakarsa dan rekomendasi multilateral, Indonesia berhasil mendapatkan dukungan penuh dengan 149 prakarsa dan rekomendasi diterima dari total 149 yang diajukan. Keberhasilan ini disokong oleh pelibatan pemangku kepentingan melalui koordinasi intensif, terutama saat Indonesia sebagai Presidensi G20 menyatukan posisi negara anggota. Program seperti Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO dan Challenges Forum Partners Meeting turut mendukung capaian ini.

Dalam konteks ASEAN, seluruh 76 prakarsa dan rekomendasi Indonesia diterima, didorong oleh kesamaan pandangan dan fokus negara anggota terkait penanganan dampak pandemi dan pemulihan ekonomi. Capaian utama adalah pelaksanaan

KTT ASEAN di Phnom Penh, di mana Presiden Joko Widodo menekankan pembangkitan sektor pariwisata, percepatan pembangunan infrastruktur, dan ekonomi sub-kawasan yang hijau dan berkelanjutan.

Sementara itu, indikator persentase kesepakatan kerja sama bilateral di Asia Pasifik dan Afrika mencapai 88 kesepakatan, sementara di Amerika dan Eropa mencapai 33 kesepakatan, dengan keduanya ditindaklanjuti oleh *stakeholder* dalam negeri. Keberhasilan ini terekam pada respons positif pemangku kepentingan, ditunjukkannya penjurur di K/L terkait, dan komitmen tinggi dari berbagai pihak dalam menindaklanjuti kesepakatan tersebut. Prioritas kesepakatan melibatkan upaya penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

6.2. Rekomendasi Perbaikan

Berdasarkan hasil evaluasi penilaian yang telah dilakukan dalam pelaksanaan dan pencapaian sasaran strategis RKP 2022 bidang politik luar negeri dan kerja sama pembangunan internasional, beberapa rekomendasi yang diperlukan, baik untuk peningkatan realisasi capaian sasaran strategis maupun kualitas capaian kinerja IKU ke depan, diantaranya dukungan anggaran yang mencakup di beberapa aspek.

Pertama, kebijakan pusat perlu memperluas ruang gerak perwakilan RI agar dapat berpartisipasi dalam perencanaan penganggaran diplomasi yang ideal. Dukungan anggaran untuk pameran dan penyusunan *economic intelligence* di pasar Eropa menjadi prioritas utama, termasuk dukungan untuk belanja operasional pegawai sesuai aturan nasional dan setempat. Pemeliharaan infrastruktur diplomasi juga perlu mendapat dukungan untuk menjaga kelayakan dan keamanan bagi para diplomat menjalankan tugasnya.

Selanjutnya, strategi diplomasi ekonomi memegang peranan penting dalam mencapai tujuan global. Pendekatan "Divide and Conquer" pada pasar unggulan, seperti UE, dapat membantu mengatasi hambatan aturan bersama dengan melakukan pendekatan bilateral. Selain itu, investasi untuk meningkatkan ekspor komoditas Indonesia, penguatan litigasi, dan pemetaan bisnis dalam negeri dengan pasar potensial juga merupakan strategi alternatif yang cukup efektif.

Dalam menghadapi tantangan ke depan, Indonesia perlu menerapkan kebijakan luar negeri yang gesit, independen, dan proaktif. Pengelolaan ancaman tradisional dan non-tradisional, termasuk krisis keamanan insani seperti pandemi dan perubahan iklim, membutuhkan kepemimpinan global Indonesia. Koordinasi dan

sinergi antara Pusat dan Perwakilan RI juga menjadi kunci, dengan tata kelola mekanisme koordinasi yang lebih konkret dan terarah.

Sementara itu, rekomendasi yang ditujukan secara spesifik pada arah kebijakan dan strategi pembangunan politik luar negeri dan kerja sama pembangunan internasional dibutuhkan untuk memastikan pelaksanaan yang lebih efektif dan efisien. Beberapa rekomendasi terhadap masing-masing Kegiatan Prioritas yang dimaksud di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri dengan:
 - a. Peningkatan dan Intensifikasi Efektivitas Penyelesaian Perbatasan dan Percepatan Pemetaan Batas Negara;
 - b. Penguatan hukum dan tata kelola terkait kerja sama lintas batas;
 - c. Penguatan sistem pemantauan pengawasan perlindungan WNI dan BHI di Tingkat Bilateral, Regional, Multilateral;
 - d. Membangun tim reaksi cepat terhadap krisis dan pengembangan rencana evakuasi yang terencana;
 - e. Meningkatkan cakupan diplomasi politik keamanan pada isu-isu nontradisional; dan
 - f. Memperkuat relasi Indonesia dengan negara-negara strategis utamanya pada bidang pertahanan-keamanan.
2. Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional dengan:
 - a. Pengembangan kemitraan yang berkelanjutan;
 - b. Transfer teknologi dan pengetahuan antarnegara;
 - c. Pembangunan penyaluran bantuan bersama aktor ekonomi nasional; dan
 - d. Penguatan dan peningkatan pelibatan swasta.
3. Peningkatan Citra Positif di Dunia Internasional dengan: Penyusunan Kebijakan Diplomasi Publik dan Turunannya
 - a. Penyusunan kebijakan diplomasi publik dan turunannya yang terarah;
 - b. Promosi kebudayaan dan pendidikan dengan teknologi terkini;
 - c. Penggunaan media daring dan pelibatan *key opinion leader* di negara mitra; dan

- d. Pemberian insentif terhadap WNI di luar negeri yang dapat mempublikasikan artikel pada media massa internasional.
4. Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global dengan:
- a. Peningkatan partisipasi dan kontribusi dalam forum regional dan internasional;
 - b. Pengembangan kerja sama ekonomi strategis dengan pelibatan pengusaha secara langsung;
 - c. Pro-aktif dalam menyelesaikan isu-isu global dengan pembentukan kelompok negara kecil (minilateral); dan
 - d. Pembangunan *grand strategy* kebijakan luar negeri yang tersinkronisasi dengan target dan kondisi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Jazeera, "Philippines tells China to 'back off' after South China Sea clash," diakses pada 20 November 2023
<https://www.aljazeera.com/news/2021/11/18/philippines-tells-china-to-back-off-after-south-china-sea-clash>
- Al-Jazeera, "Rich nations 'hoarding' a billion doses of excess COVID vaccine." diakses pada 14 November 2023
<https://www.aljazeera.com/news/2021/2/19/covid-vaccine>
- Andreja Pucihar, et al., "Gap Analysis Methodology for Identifying Future Ict Related eGovernment Research Topics - Case of" Ontology and Semantic Web" in the Context of eGovernment," (Bled: Conference, 2007).
- Badan Pusat Statistik, "Volume Ekspor Menurut Negara Tujuan Utama," diakses pada 24 Desember 2023 <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTAzNSMx/volume-impor-menurut-negara-asal-utama--berat-bersih-ribu-ton---2000-2022.html>
- Badan Pusat Statistik, "Volume Impor Menurut Negara Asal Utama," diakses pada 24 Desember 2023 <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTAzNSMx/volume-impor-menurut-negara-asal-utama--berat-bersih-ribu-ton---2000-2022.html>;
- Choi, Insu., "Small States and The Balance of Power," (California: Naval Postgraduate School, 1995)
- Criekemans, David., "Geopolitics and International Relations: Grounding World Politics A New," (Leiden: Brill Nijhoff, 2022).
- Darmawan, Aristyo Rizka., "AUKUS adds fuel to the South China Sea disput," diakses pada 20 November 2023
<https://eastasiaforum.org/2021/11/01/aukus-adds-fuel-to-the-south-china-sea-dispute/>
- Direktorat Diplomasi Publik, "Laporan Kinerja 2021," (Jakarta: Kemenlu, 2022)
- Direktorat Pelindungan WNI, "Laporan Kinerja 2021," (Jakarta: Kemenlu, 2022)
- Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional, "Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia 2022," (Jakarta: Bappenas, 2022)
- Diskusi Kelompok Terpumpun dengan Pakar dan Praktisi Kebijakan Luar Negeri Indonesia, 31 Oktober 2023
- Ebigghausen, Rodion., "Myanmar coup: ASEAN split over the way forward," diakses pada 20 November 2023 <https://www.dw.com/en/myanmar-coup-asean-ties/a-57042503>
- ESCWA, "Policy Gap Analysis: An Examination of the Policy-based Gaps Hindering Syriam Arab Republic's Peacebuilding Process," (Beirut: UN, 2020).

- Indonesia Ocean Justice Initiative, "Laporan Deteksi Ancaman Keamanan Maritim dan Pelanggaran Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUUF) Tahun 2022," (Jakarta: IOJI, 2022)
- International Trade Centre, "Trade Map," diakses pada 24 Desember 2023 <https://www.trademap.org/Index.aspx>
- Kementerian Luar Negeri, "Indeks Perwakilan Republik Indonesia,"
- Kementerian Luar Negeri, "Laporan Kinerja 2022," (Jakarta: Kemenlu, 2023)
- Kementerian Luar Negeri, "Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri 2021" (Jakarta: Kemenlu, 2022)
- Klement, Joachim., "Geo-Economics: The Interplay between Geopolitics, Economics, and Investments," (CFA Institute Research Foundation, 2021).
- Kunjungan Lapangan dan diskusi kelompok terpumpun di KBRI Berlin Desember 2023
- Kunjungan Lapangan dan diskusi kelompok terpumpun di KBRI Praha Desember 2023
- Lowy Institute, "Asia Power Index 2023," (Sydney: Lowy Institute, 2023)
- Mastanduno Michael., "Economics and Security in Statecraft and Scholarship," *International Organization* 52, no. 4 (1998).
- Morgenthau, Hans J., "Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace," (New York: Knopf, 1985)
- Mullen, Andrew., "US-China trade war: timeline of key dates and events since July 2018," diakses pada 14 November 2023 <https://www.scmp.com/economy/global-economy/article/3177652/us-china-trade-war-timeline-key-dates-and-events-july-2018>
- NONIE, "Impact Evaluations and Development: NONIE Guidance on Impact Evaluation," (Washington DC: World Bank, 2009)
- Okano-Heijmans, M., "Conceptualizing Economic Diplomacy: The Crossroads of International Relations, Economics, IPE and Diplomatic Studies," *The Hague journal of Diplomacy* 6 (2011): 23-28.
- Pop, Adrian., "Power Transition and Balance of Power: Comprehending the Power Dynamics of the 21st Century," *Public Administration & Regional Studies* 19, No. 1 (2017), Galati University Press,
- Sahputra, Yogi Eka., "Kapal Asing Tetap Marak di Laut Natuna Utara," diakses pada 22 November 2023 <https://www.mongabay.co.id/2021/11/21/kapal-asing-tetap-marak-di-laut-natuna-utara/>
- The Conversation, "What we learned from tracking every COVID policy in the world," diakses 14 November 2023 <https://theconversation.com/what-we-learned-from-tracking-every-covid-policy-in-the-world-157721>

TTR Weekly," Indonesia mulls travel corridor to Bali," diakses pada 14 November 2023 <https://www.ttrweekly.com/site/2021/02/indonesia-mulls-travel-corridor-to-bali/>

LAMPIRAN

Lampiran 1
Matriks Capaian Perencanaan Pembangunan Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional	88,70	96,58	93,67	112,06	96,30	99,43	96,77	-
Jumlah forum yang dipimpin oleh Indonesia pada tingkat regional dan multilateral	8,00	62,00	10,00	48,00	13,00	45,00	14,00	-
Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional	3,80	3,82	3,85	3,98	3,90	4,06	3,95	-
Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI	86,00	88,35	87,00	92,61	90,00	94,86	91,00	-
Indeks Kemajuan Perundingan Batas Maritim	45,03	43,70	47,17	44,58	46,32	46,84	47,99	-
Persentase kasus WNI di luar negeri yang diselesaikan	73,00	83,30	74,00	90,29	80,00	91,50	81,00	-

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Persentase kemajuan hukum dan perjanjian internasional di bidang perundingan penegasan batas darat, peningkatan kerja sama perbatasan dan kerja sama kelautan yang diselesaikan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
Indeks Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Terpadu bagi WNI di Luar Negeri	96,19	65,65	96,42	65,11	97,09	91,28	97,50	-
Indeks Penguatan Sistem Kelembagaan Pelayanan dan Pelindungan WNI dan BHI di Luar Negeri	94,06	100,52	95,38	92,91	96,63	98,28	97,49	-
Indeks Diplomasi Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri	94,30	100,00	95,48	117,50	96,63	100,00	98,00	-
Jumlah Program/Kegiatan Kerjasama Selatan-Selatan Triangular	86,00	10,00	85,00	29,00	115,00	28,00	133,00	-

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Jumlah pendanaan kegiatan kerjasama pembangunan internasional termasuk KSST			110,48	33,41	154,00	60,50	171,00	-
Tingkat partisipasi aktor nonpemerintah dalam kegiatan kerjasama pembangunan internasional			2,48-2,55	2,51	2,65-2,74	2,66	2,82-2,96	-
Persentase pemberitaan positif media massa internasional terhadap kebijakan hubungan luar negeri RI			85,00	76,82	86,00	89,42	86,00	-
Persentase dukungan konstituen internasional terhadap promosi aset-aset diplomasi publik Indonesia			98,00	100,00	98,00	98,00	99,00	-
Persentase prakarsa dan rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat menteri multilateral	95,00	100,00	96,00	100,00	97,00	100,00	98,00	-

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat menteri ASEAN	95,00	98,73	96,00	100,00	97,00	100,00	98,00	-
Persentase kesepakatan kerjasama bilateral di kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang ditindaklanjuti oleh <i>stakeholder</i> dalam negeri	60,00	70,00	85,00	105,26	82,22	100,00	91,11	-
Persentase kesepakatan kerjasama bilateral di kawasan Amerika dan Eropa yang ditindaklanjuti oleh <i>stakeholder</i> dalam negeri	100,00	120,00	99,00	91,30	82,76	100,00	95,00	-
Jumlah rekomendasi dan prakarsa yang disampaikan dalam forum kerja sama multilateral	12,00	12,00	250,00	108,00	270,00	246,00	290,00	-
Jumlah rekomendasi dan prakarsa yang disampaikan dalam pertemuan ASEAN	79,00	78,00	153,00	193,00	260,00	185,00	247,00	-

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Peringkat jumlah pasukan perdamaian (PKO) yang dikirim Pemerintah Indonesia	10	8	10	10	10	8	10	-

Keterangan:

Indikator Prioritas Nasional
Indikator Program Prioritas
Indikator Kegiatan Prioritas
Indikator Proyek Prioritas

Lampiran 2
Matriks Indeks Perwakilan Republik Indonesia Tahun 2017

Negara	Kota	Status	Indeks	Peringkat	Politik	Ekonomi	Sosbud	Konsuler	Multi-lateral I	Multi-lateral II
Persatuan Emirat Arab	Abu Dhabi	KBRI	3,5	2	2,98	2,98	2,9	2,11		
Nigeria	Abuja	KBRI	3,41	2	3,33	3,98	3,12	3,36		
Ethiopia	Addis Ababa	KBRI	2,66	2	2,82	3,08	2,93	2,03		
Aljazair	Alger	KBRI	2,87	2	2,53	3,52	3,32	2,1		
Yordania	Amman	KBRI	3,17	2	3,26	2,92	3,22	3,73		
Turki	Ankara	KBRI	2,91	2	3,06	2,9	3,03	2,99		
Madagaskar	Antananarivo	KBRI	2,68	2	2,69	2,72	3,3	2,34		
Kazakhstan	Astana	KBRI	2,71	2	2,98	2,98	2,9	2,11		
Yunani	Athena	KBRI	2,7	2	2,87	3,25	2,67	2,31		
Irak	Baghdad	KBRI	2,51	2	2,63	2,33	2,57	2,76		
Azerbaijan	Baku	KBRI	2,42	3	2,13	2,3	3,03	2,35		
Brunei Darussalam	Bandar Seri Begawan	KBRI	3,1	2	2,69	2,55	3,38	3,96		
Thailand	Bangkok	KBRI	3,67	1	3,86	3,9	3,75	3,32	3,46	
Cina	Beijing	KBRI	4,24	1	4,07	4,73	4,22	3,79		
Libanon	Beirut	KBRI	2,67	2	2,52	2,52	3,18	2,81		
Serbia	Beograd	KBRI	2,61	2	2,48	2,75	2,95	2,41		

Negara	Kota	Status	Indeks	Peringkat	Politik	Ekonomi	Sosbud	Konsuler	Multi-lateral I	Multi-lateral II
Jerman	Berlin	KBRI	3,6	1	3,72	3,9	3,38	3,23		
Swiss	Bern	KBRI	3	2	2,99	3,47	3,3	2,36		
Kolombia	Bogota	KBRI	2,6	2	2,76	3,02	2,8	2,2		
Brazil	Brasilia	KBRI	2,88	2	3,05	3,22	2,9	2,5		
Slowakia	Bratislava	KBRI	2,82	2	3,04	3,15	3,07	2,2		
Belgia	Brussels	KBRI	3,8	1	3,96	4,45	3,92	2,88		
Romania	Bucharest	KBRI	2,71	2	2,78	2,8	3,2	2,36		
Hongaria	Budapest	KBRI	2,64	2	2,45	3,17	3	2,19		
Argentina	Buesnos Aires	KBRI	2,53	2	2,62	2,95	2,53	2,43		
Australia	Canberra	KBRI	4,01	1	4,45	4,12	4,35	3,03		
Venezuela	Caracas	KBRI	2,15	3	2,16	1,97	2,7	2,17		
Senegal	Dakar	KBRI	2,68	2	2,87	3,12	2,9	2,22		
Suriah	Damascus	KBRI	2,38	3	2,51	1,67	2,67	3,34		
Tanzania	Dar Es Salam	KBRI	2,26	3	2,46	2,6	2,52	1,92		
Belanda	Den Haag	KBRI	4,05	1	4,55	4,2	4,08	3,19		
Bangladesh	Dhaka	KBRI	2,7	2	2,85	3,28	2,65	2,24		
Timor Leste	Dili	KBRI	2,7	2	3,48	2,22	2,72	2,74		
Qatar	Doha	KBRI	3,35	2	2,71	3,47	2,93	4,29		
Vietnam	Hanoi	KBRI	3,12	2	3,38	3,4	3,23	2,43		

Negara	Kota	Status	Indeks	Peringkat	Politik	Ekonomi	Sosbud	Konsuler	Multi-lateral I	Multi-lateral II
Zimbabwe	Harare	KBRI	2,39	3	2,81	2,87	2,15	1,93		
Kuba	Havana	KBRI	2,25	3	2,7	2,18	2,55	1,93		
Finlandia	Helsinki	KBRI	3	2	3,18	3,45	3,33	2,22		
Pakistan	Islamabad	KBRI	2,79	2	2,8	2,58	3,03	2,77		
Afghanistan	Kabul	KBRI	2,04	3	2,37	2,07	1,92	1,9		
Mesir	Kairo	KBRI	3,52	1	3,19	3,33	3,9	3,94		
Sudan	Khartoum	KBRI	2,54	2	2,78	2,9	2,72	2,18		
Sri Lanka	Kolombo	KBRI	2,65	2	2,7	2,87	2,75	2,53		
Denmark	Kopenhagen	KBRI	0,02	3	2,99	3,47	2,83	2,67		
Malaysia	Kuala Lumpur	KBRI	4,32	1	4,18	3,58	3,7	5		
Kuwait	Kuwait City	KBRI	3,15	2	2,32	3,8	3,57	3,41		
Ukraina	Kyiv	KBRI	2,99	2	3,31	3,13	3,02	2,48		
Peru	Lima	KBRI	2,45	3	2,46	2,95	2,53	2,22		
Portugal	Lisabon	KBRI	2,4	3	2,76	2,02	2,82	2,27		
Inggris	London	KBRI	4,03	1	4,03	4,47	4,13	3,31	4,05	
Spanyol	Madrid	KBRI	3,02	2	3,18	3,47	3,05	2,57		
Bahrain	Manama	KBRI	2,61	2	2,34	2,53	2,53	3,17		
Filipina	Manila	KBRI	3,67	1	3,84	3,9	3,63	3,39		
Mozambik	Maputo	KBRI	2,54	2	2,68	2,92	2,78	1,93		

Negara	Kota	Status	Indeks	Peringkat	Politik	Ekonomi	Sosbud	Konsuler	Multi-lateral I	Multi-lateral II
Meksiko	Mexico City	KBRI	3,05	2	3,29	3,37	3,17	2,54		
Russia	Moskow	KBRI	3,72	1	4,24	3,95	3,93	2,79		
Oman	Muscat	KBRI	2,75	2	2,11	3,28	2,32	3,17		
Kenya	Nairobi	KBRI	3,41	2	3,17	3,52	3,2	2,85	4,05	
India	New Delhi	KBRI	3,51	1	3,71	2,07	3,82	2,44		
Norwegia	Oslo	KBRI	3,18	2	2,87	3,9	3,35	2,58		
Kanada	Ottawa	KBRI	3,53	1	3,39	4	3,9	2,75		
Panama	Panama City	KBRI	2,45	3	2,61	2,65	2,52	2,3		
Suriname	Paramaribo	KBRI	2,5	3	2,48	2,17	3,2	2,44		
Prancis	Paris	KBRI	3,69	1	3,71	4	3,57	3,37	3,62	
Kamboja	Phnom Penh	KBRI	2,81	2	3,4	2,98	2,83	2,31		
Papua Nugini	Port Moresby	KBRI	2,9	2	4,07	2,77	2,67	2,33		
Ceko	Praha	KBRI	2,94	2	2,79	3,65	3,17	2,57		
Afrika Selatan	Pretoria	KBRI	2,75	2	2,93	3,23	2,83	2,25		
Korea Utara	Pyong Yang	KBRI	1,95	3	2,77	1,3	2,17	2,03		
Ekuador	Quito	KBRI	2,5	3	2,58	2,83	2,67	2,13		
Maroko	Rabat	KBRI	2,66	2	2,77	2,8	3,45	2,11		
Arab Saudi	Riyadh	KBRI	3,78	1	3,39	3,77	3,77	4,48		
Italia	Roma	KBRI	3,71	1	3,5	4,08	3,73	2,74	4,14	
Yaman	Sana'a	KBRI	1,93	3	2,23	1,53	2,25	2		

Negara	Kota	Status	Indeks	Peringkat	Politik	Ekonomi	Sosbud	Konsuler	Multi-lateral I	Multi-lateral II
Chile	Santiago	KBRI	2,53	2	2,58	3,12	2,72	2,03		
Bosnia Herzegovina	Sarajevo	KBRI	2,31	3	2,21	2,5	2,73	2,16		
Korea Selatan	Seoul	KBRI	4,06	1	3,77	4,37	3,85	4,35		
Singapura	Singapura	KBRI	4,06	1	3,54	4,4	4,03	4,21		
Bulgaria	Sofia	KBRI	2,29	3	2,26	2,52	2,67	1,93		
Swedia	Stockholm	KBRI	3,07	2	3,29	3,37	3,25	2,63		
Fiji	Suva	KBRI	2,82	2	3,43	2,78	3,02	2,28		
Uzbekistan	Tashkent	KBRI	2,69	2	3,02	3	2,13	2,13		
Iran	Tehran	KBRI	3	2	2,98	3,62	3,22	2,38		
Jepang	Tokyo	KBRI	4,06	1	3,68	4,43	4,27	3,9		
Libya	Tripoli	KBRI	1,89	3	2,42	1,25	2,1	2,28		
Tunisia	Tunis	KBRI	2,36	3	2,74	2,17	3,27	2,36		
Italia	Vatican	KBRI	1,86	3	2,14	1,03	2,77	1,88		
Laos	Vientiane	KBRI	2,49	3	3,03	2,58	2,58	2		
Polandia	Warsawa	KBRI	3,03	2	2,97	4,17	3,05	2,06		
Amerika Serikat	Washington DC	KBRI	4,22	1	3,16	2,82	4,25	2,42		
Selandia Baru	Wellington	KBRI	3,11	2	3,16	2,82	4,25	2,42		
Austria	Wina	KBRI	3,6	1	3,04	3,48	3,27	2,98	4,8	3,38
Namibia	Windhoek	KBRI	2,53	2	2,86	3,07	2,67	1,79		

Negara	Kota	Status	Indeks	Peringkat	Politik	Ekonomi	Sosbud	Konsuler	Multi-lateral I	Multi-lateral II
Myanmar	Yangon	KBRI	2,83	2	3,09	3,05	2,98	2,49		
Kroasia	Zagreb	KBRI	2,24	3	2,33	2,33	2,67	1,93		
Afrika Selatan	Cape Town	KJRI	2,9	2		3,08	3	2,89		
Amerika Serikat	Chicago	KJRI	3,18	2		3,75	3,42	2,5		
Filipina	Davao City	KJRI	3,12	2		3,45	3,47	2,54		
Persatuan Emirat Arab	Dubai	KJRI	3,14	2		3,37	3,13	3,31		
Jerman	Frankfurt	KJRI	3,27	2		3,43	3,35	2,96		
Cina	Guangzhou	KJRI	3,77	1		4,32	3,72	3,18		
Jerman	Hamburg	KJRI	3,09	2		3,85	3,15	2,35		
Vietnam	Ho Chi Minh City	KJRI	3,08	2		3,58	3,4	2,32		
Cina	Hong Kong	KJRI	3,81	1		3,68	3,4	4,61		
Amerika Serikat	Houston	KJRI	3,41	2		3,78	3,45	2,81		
Turki	Istanbul	KJRI	3,07	2		3,3	3,22	3,07		
Arab Saudi	Jeddah	KJRI	4,17	1		4,07	4,03	4,48		
Malaysia	Johor Bahru	KJRI	3,21	2		3,18	3,03	3,8		
Pakistan	Karachi	KJRI	2,51	2		2,45	2,72	2,5		
Malaysia	Kota Kinabalu	KJRI	3,48	2		3,13	2,95	4,48		
Malaysia	Kuching	KJRI	3,52	1		3,27	3,18	4,3		

Negara	Kota	Status	Indeks	Peringkat	Politik	Ekonomi	Sosbud	Konsuler	Multi-lateral I	Multi-lateral II
Amerika Serikat	Los Angeles	KJRI	3,59	1		3,3	3,87	3,77		
Australia	Melbourne	KJRI	3,7	1		3,92	3,88	3,18		
Perancis	Merseille	KJRI	3,02	2		3,6	3,43	2,18		
India	Mumbai	KJRI	2,23	3		3,68	3,2	2,23		
Amerika Serikat	New York	KJRI	3,66	1		3,97	3,47	3,62		
Kaledonia Baru	Noumea	KJRI	2,29	3		1,95	3,22	2,12		
Jepang	Osaka	KJRI	3,73	1		4,02	3,88	3,63		
Malaysia	Penang	KJRI	3,45	2		3,38	3	4,19		
Australia	Perth	KJRI	3,27	2		3,2	3,23	3,4		
Amerika Serikat	San Francisco	KJRI	3,42	2		3,8	3,48	2,85		
Cina	Shanghai	KJRI	3,74	1		4,27	3,58	3,32		
Thailand	Songkhla	KJRI	2,12	3		3,1	3,6	2,09		
Australia	Sydney	KJRI	3,87	1		4,15	4,12	3,4		
Kanada	Toronto	KJRI	2,57	2		2,82	2,8	2,36		
Kanada	Vancouver	KJRI	2,96	2		3,33	3,15	2,54		
Kamerun	Yaounde	KJRI		0						
Australia	Darwin	KRI	3,38	2		3,5	3,43	3,33		
Malaysia	Tawau	KRI	2,26	3		2	3,37	4,23		
Papua Nugini	Vanimo	KRI	1,67	3		1,77	2,93	2,55		
Indonesia	Jakarta	PTRI	4,31	1	4,43	4,25	4,25			

Negara	Kota	Status	Indeks	Peringkat	Politik	Ekonomi	Sosbud	Konsuler	Multi-lateral I	Multi-lateral II
Swiss	Jenewa	PTRI	4,85	1					4,82	4,87
Amerika Serikat	New York	PTRI	4,74	1					4,75	4,72

Lampiran 3
Matriks Indeks Perwakilan Republik Indonesia Tahun 2022

Negara	Kota	Status	Indeks	Peringkat	Politik	Ekonomi	Sosbud	Konsuler	Multi-lateral I	Multi-lateral II
Persatuan Emirat Arab	Abu Dhabi	KBRI	3,5	2	2,98	2,98	2,9	2,11		
Nigeria	Abuja	KBRI	3,41	2	3,33	3,98	3,12	3,36		
Ethiopia	Addis Ababa	KBRI	2,66	2	2,82	3,08	2,93	2,03		
Aljazair	Alger	KBRI	2,87	2	2,53	3,52	3,32	2,1		
Yordania	Amman	KBRI	3,17	2	3,26	2,92	3,22	3,73		
Turki	Ankara	KBRI	2,91	2	3,06	2,9	3,03	2,99		
Madagaskar	Antananarivo	KBRI	2,68	2	2,69	2,72	3,3	2,34		
Kazakhstan	Astana	KBRI	2,71	2	2,98	2,98	2,9	2,11		
Yunani	Athens	KBRI	2,7	2	2,87	3,25	2,67	2,31		
Irak	Baghdad	KBRI	2,51	2	2,63	2,33	2,57	2,76		
Azerbaijan	Baku	KBRI	2,42	3	2,13	2,3	3,03	2,35		
Brunei Darussalam	Bandar Seri Begawan	KBRI	3,1	2	2,69	2,55	3,38	3,96		
Thailand	Bangkok	KBRI	3,67	1	3,86	3,9	3,75	3,32	3,46	
Cina	Beijing	KBRI	4,24	1	4,07	4,73	4,22	3,79		
Libanon	Beirut	KBRI	2,67	2	2,52	2,52	3,18	2,81		
Serbia	Beograd	KBRI	2,61	2	2,48	2,75	2,95	2,41		
Jerman	Berlin	KBRI	3,6	1	3,72	3,9	3,38	3,23		

Negara	Kota	Status	Indeks	Peringkat	Politik	Ekonomi	Sosbud	Konsuler	Multi-lateral I	Multi-lateral II
Swiss	Bern	KBRI	3	2	2,99	3,47	3,3	2,36		
Kolombia	Bogota	KBRI	2,6	2	2,76	3,02	2,8	2,2		
Brazil	Brasilia	KBRI	2,88	2	3,05	3,22	2,9	2,5		
Slowakia	Bratislava	KBRI	2,82	2	3,04	3,15	3,07	2,2		
Belgia	Brussels	KBRI	3,8	1	3,96	4,45	3,92	2,88		
Romania	Bucharest	KBRI	2,71	2	2,78	2,8	3,2	2,36		
Hongaria	Budapest	KBRI	2,64	2	2,45	3,17	3	2,19		
Argentina	Buesnos Aires	KBRI	2,53	2	2,62	2,95	2,53	2,43		
Australia	Canberra	KBRI	4,01	1	4,45	4,12	4,35	3,03		
Venezuela	Caracas	KBRI	2,15	3	2,16	1,97	2,7	2,17		
Senegal	Dakar	KBRI	2,68	2	2,87	3,12	2,9	2,22		
Suriah	Damascus	KBRI	2,38	3	2,51	1,67	2,67	3,34		
Tanzania	Dar Es Salam	KBRI	2,26	3	2,46	2,6	2,52	1,92		
Belanda	Den Haag	KBRI	4,05	1	4,55	4,2	4,08	3,19		
Bangladesh	Dhaka	KBRI	2,7	2	2,85	3,28	2,65	2,24		
Timor Leste	Dili	KBRI	2,7	2	3,48	2,22	2,72	2,74		
Qatar	Doha	KBRI	3,35	2	2,71	3,47	2,93	4,29		
Vietnam	Hanoi	KBRI	3,12	2	3,38	3,4	3,23	2,43		
Zimbabwe	Harare	KBRI	2,39	3	2,81	2,87	2,15	1,93		
Kuba	Havana	KBRI	2,25	3	2,7	2,18	2,55	1,93		
Finlandia	Helsinki	KBRI	3	2	3,18	3,45	3,33	2,22		

Negara	Kota	Status	Indeks	Peringkat	Politik	Ekonomi	Sosbud	Konsuler	Multi-lateral I	Multi-lateral II
Pakistan	Islamabad	KBRI	2,79	2	2,8	2,58	3,03	2,77		
Afghanistan	Kabul	KBRI	2,04	3	2,37	2,07	1,92	1,9		
Mesir	Kairo	KBRI	3,52	1	3,19	3,33	3,9	3,94		
Sudan	Khartoum	KBRI	2,54	2	2,78	2,9	2,72	2,18		
Sri Lanka	Kolombo	KBRI	2,65	2	2,7	2,87	2,75	2,53		
Denmark	Kopenhagen	KBRI	0,02	3	2,99	3,47	2,83	2,67	4,05	
Malaysia	Kuala Lumpur	KBRI	4,32	1	4,18	3,58	3,7	5		
Kuwait	Kuwait City	KBRI	3,15	2	2,32	3,8	3,57	3,41		
Ukraina	Kyiv	KBRI	2,99	2	3,31	3,13	3,02	2,48		
Peru	Lima	KBRI	2,45	3	2,46	2,95	2,53	2,22		
Portugal	Lisabon	KBRI	2,4	3	2,76	2,02	2,82	2,27		
Inggris	London	KBRI	4,03	1	4,03	4,47	4,13	3,31	4,05	
Spanyol	Madrid	KBRI	3,02	2	3,18	3,47	3,05	2,57		
Bahrain	Manama	KBRI	2,61	2	2,34	2,53	2,53	3,17		
Filipina	Manila	KBRI	3,67	1	3,84	3,9	3,63	3,39		
Mozambik	Maputo	KBRI	2,54	2	2,68	2,92	2,78	1,93		
Meksiko	Mexico City	KBRI	3,05	2	3,29	3,37	3,17	2,54		
Russia	Moskow	KBRI	3,72	1	4,24	3,95	3,93	2,79		
Oman	Muscat	KBRI	2,75	2	2,11	3,28	2,32	3,17		
Kenya	Nairobi	KBRI	3,41	2	3,14	3,52	3,2	2,85	4,05	
India	New Delhi	KBRI	3,51	1	3,71	2,07	3,82	2,44		

Negara	Kota	Status	Indeks	Peringkat	Politik	Ekonomi	Sosbud	Konsuler	Multi-lateral I	Multi-lateral II
Norwegia	Oslo	KBRI	3,18	2	2,87	3,9	3,35	2,58		
Kanada	Ottawa	KBRI	3,53	1	3,39	4	3,9	2,75		
Panama	Panama City	KBRI	2,45	3	2,61	2,65	2,52	2,3		
Suriname	Paramaribo	KBRI	2,5	3	2,48	2,17	3,2	2,44		
Prancis	Paris	KBRI	3,69	1	3,71	4	3,57	3,37	3,62	
Kamboja	Phnom Penh	KBRI	2,81	2	3,4	2,98	2,83	2,31		
Papua Nugini	Port Moresby	KBRI	2,9	2	4,07	2,77	2,67	2,33		
Ceko	Praha	KBRI	2,94	2	2,79	3,65	3,17	2,57		
Afrika Selatan	Pretoria	KBRI	2,75	2	2,93	3,23	2,83	2,25		
Korea Utara	Pyong Yang	KBRI	1,95	3	2,77	1,3	2,17	2,03		
Ekuador	Quito	KBRI	2,5	3	2,58	2,83	2,67	2,13		
Maroko	Rabat	KBRI	2,66	2	2,77	2,8	3,45	2,11		
Arab Saudi	Riyadh	KBRI	3,41	2	2,91	3,53	2,12	4		
Italia	Roma	KBRI	3,71	1	3,5	4,08	3,73	2,74	4,14	
Yaman	Sana'a	KBRI	0	3	2,23	1,53	2,25	2		
Chile	Santiago	KBRI	2,53	2	2,58	3,12	2,72	2,03		
Bosnia Herzegovina	Sarajevo	KBRI	2,31	3	2,21	2,5	2,73	2,16		
Korea Selatan	Seoul	KBRI	4,06	1	3,77	4,37	3,85	4,35		
Singapura	Singapura	KBRI	4,06	1	3,54	4,4	4,03	4,21		
Bulgaria	Sofia	KBRI	2,29	3	2,26	2,52	2,67	1,93		

Negara	Kota	Status	Indeks	Peringkat	Politik	Ekonomi	Sosbud	Konsuler	Multi-lateral I	Multi-lateral II
Swedia	Stockholm	KBRI	3,07	2	3,29	3,37	3,25	2,63		
Fiji	Suva	KBRI	2,82	2	3,43	2,78	3,02	2,28		
Uzbekistan	Tashkent	KBRI	2,71	2	2,98	2,98	2,9	2,11		
Iran	Tehran	KBRI	3	2	2,98	3,62	3,22	2,38		
Jepang	Tokyo	KBRI	4,06	1	3,68	4,43	4,27	3,9		
Libya	Tripoli	KBRI	1,89	3	2,42	1,25	2,1	2,28		
Tunisia	Tunis	KBRI	2,36	3	2,74	2,17	3,27	2,36		
Italia	Vatican	KBRI	1,86	3	2,14	1,03	2,77	1,88		
Laos	Vientiane	KBRI	2,49	3	3,03	2,58	2,58	2		
Polandia	Warsawa	KBRI	3,03	2	2,97	4,17	3,05	2,06		
Amerika Serikat	Washington DC	KBRI	4,22	1	3,16	2,82	4,25	2,42		
Selandia Baru	Wellington	KBRI	3,11	2	3,16	2,82	4,25	2,42		
Austria	Wina	KBRI	3,6	1	3,04	3,48	3,27	2,98	4,8	3,38
Namibia	Windhoek	KBRI	2,53	2	2,86	3,07	2,67	1,79		
Myanmar	Yangon	KBRI	2,83	2	3,09	3,05	2,98	2,49		
Kroasia	Zagreb	KBRI	2,24	3	2,33	2,33	2,67	1,93		
Afrika Selatan	Cape Town	KJRI	2,9	2		3,08	3	2,89		
Amerika Serikat	Chicago	KJRI	3,18	2		3,75	3,42	2,5		
Filipina	Davao City	KJRI	3,12	2		3,45	3,47	2,54		

Negara	Kota	Status	Indeks	Peringkat	Politik	Ekonomi	Sosbud	Konsuler	Multi-lateral I	Multi-lateral II
Persatuan Emirat Arab	Dubai	KJRI	3,14	2		3,37	3,13	3,31		
Jerman	Frankfurt	KJRI	3,27	2		3,43	3,35	2,96		
Cina	Guangzhou	KJRI	3,77	1		4,32	3,72	3,18		
Jerman	Hamburg	KJRI	3,09	2		3,85	3,15	2,35		
Vietnam	Ho Chi Minh City	KJRI	3,08	2		3,58	3,4	2,32		
Cina	Hong Kong	KJRI	3,81	1		3,68	3,4	4,61		
Amerika Serikat	Houston	KJRI	3,41	2		3,78	3,45	2,81		
Turki	Istanbul	KJRI	3,07	2		3,3	3,22	3,07		
Arab Saudi	Jeddah	KJRI	3,63	1		3,4	2,94	4,56		
Malaysia	Johor Bahru	KJRI	3,21	2		3,18	3,03	3,8		
Pakistan	Karachi	KJRI	2,51	2		2,45	2,72	2,5		
Malaysia	Kota Kinabalu	KJRI	3,48	2		3,13	2,95	4,48		
Malaysia	Kuching	KJRI	3,52	1		3,27	3,18	4,3		
Amerika Serikat	Los Angeles	KJRI	3,59	1		3,3	3,87	3,77		
Australia	Melbourne	KJRI	3,7	1		3,92	3,88	3,18		
Perancis	Merseille	KJRI	3,02	2		3,6	3,43	2,18		
India	Mumbai	KJRI	2,23	3		3,68	3,2	2,23		
Amerika Serikat	New York	KJRI	3,66	1		3,97	3,47	3,62		
Kaledonia Baru	Noumea	KJRI	2,29	3		1,95	3,22	2,12		

Negara	Kota	Status	Indeks	Peringkat	Politik	Ekonomi	Sosbud	Konsuler	Multi-lateral I	Multi-lateral II
Jepang	Osaka	KJRI	3,73	1		4,02	3,88	3,63		
Malaysia	Penang	KJRI	3,45	2		3,38	3	4,19		
Australia	Perth	KJRI	3,27	2		3,2	3,23	3,4		
Amerika Serikat	San Francisco	KJRI	3,42	2		3,8	3,48	2,85		
Cina	Shanghai	KJRI	3,74	1		4,27	3,58	3,32		
Thailand	Songkhla	KJRI	2,12	3		3,1	3,6	2,09		
Australia	Sydney	KJRI	3,87	1		4,15	4,12	3,4		
Kanada	Toronto	KJRI	2,57	2		2,82	2,8	2,36		
Kanada	Vancouver	KJRI	2,96	2		3,33	3,15	2,54		
Kamerun	Yaounde	KJRI	1,52	3	2,1	1,43	1,43	1,31		
Australia	Darwin	KRI	3,38	2		3,5	3,43	3,33		
Malaysia	Tawau	KRI	2,26	3		2	3,37	4,23		
Papua Nugini	Vanimu	KRI	1,67	3		1,77	2,93	2,55		
Indonesia	Jakarta	PTRI	4,31	1	4,43	4,25	4,25			
Swiss	Jenewa	PTRI	4,85	1					4,82	4,87
Amerika Serikat	New York	PTRI	4,68	1					4,85	4,5

Lampiran 4
Perkembangan Nilai Ekspor Indonesia 2018-2022 (ribu dolar AS)

Mitra Dagang	Nilai Ekspor				
	2018	2019	2020	2021	2022
Dunia	180.215.036	167.682.996	163.306.490	231.587.887	291.979.103
Tiongkok	27.126.932	27.961.887	31.775.692	53.764.668	65.924.117
Amerika Serikat	18.471.422	17.873.447	18.666.768	25.834.929	28.239.114
Jepang	19.479.892	16.003.261	13.662.871	17.868.287	24.845.365
India	13.725.676	11.823.491	10.413.999	13.341.986	23.378.836
Malaysia	9.436.721	8.801.815	8.130.627	11.967.891	15.452.430
Singapura	12.991.593	12.916.730	10.712.315	11.631.895	14.395.732
Filipina	6.825.460	6.770.111	5.898.710	8.604.286	12.903.203
Korea Selatan	9.532.500	7.234.409	6.506.501	8.980.877	12.813.689
Taiwan	4.700.894	4.034.832	4.098.805	6.959.529	8.702.754
Vietnam	4.583.937	5.153.358	4.941.002	6.850.033	8.286.044
Thailand	6.818.949	6.218.393	5.112.862	7.087.712	8.169.361
Belanda	3.898.166	3.204.951	3.114.023	4.630.621	5.379.177
Pakistan	2.467.867	1.944.020	2.386.519	3.830.570	4.330.733
Bangladesh	1.888.045	1.913.789	1.685.821	2.928.622	3.894.628
Australia	2.800.076	2.328.625	2.506.356	3.222.839	3.469.605
Jerman	2.709.812	2.405.755	2.456.986	2.914.680	3.216.060
Italia	1.921.238	1.749.463	1.746.083	2.805.702	3.129.878

Mitra Dagang	Nilai Ekspor				
	2018	2019	2020	2021	2022
Hong Kong	2.559.215	2.501.674	2.037.314	2.062.563	2.953.072
Persatuan Emirat Arab	1.460.699	1.471.228	1.243.271	1.894.257	2.300.356
Spanyol	2.248.570	1.599.205	1.515.572	2.352.992	2.293.647
Belgia	1.261.806	1.075.681	1.237.316	1.632.004	2.191.299
Turki	1.181.874	1.147.880	1.048.246	1.604.451	2.069.416
Arab Saudi	1.222.427	1.503.159	1.338.136	1.583.565	2.018.953
Swiss	669.931	740.723	2.398.172	1.315.640	1.882.908
Meksiko	905.534	939.279	936.680	1.304.499	1.702.902
Inggris	1.466.108	1.351.507	1.283.654	1.476.609	1.664.077
Brasil	1.145.594	1.002.647	1.015.166	1.509.819	1.487.061
Rusia	1.001.142	864.081	973.824	1.492.931	1.386.511
Mesir	1.033.514	1.012.782	1.056.619	1.647.836	1.342.382
Kanada	914.292	858.206	789.050	1.063.300	1.276.160
Polandia	461.072	483.782	441.105	654.640	1.123.683
Prancis	1.039.986	1.051.017	945.123	1.031.737	1.116.962
Afrika Selatan	645.592	588.830	572.198	966.506	1.090.843
Myanmar	897.490	875.626	1.031.955	1.122.118	965.999
Selandia Baru	490.803	447.513	480.011	718.825	731.915
Kamboja	525.378	618.521	541.302	531.164	725.959
Denmark	201.283	195.334	163.900	201.822	710.321

Mitra Dagang	Nilai Ekspor				
	2018	2019	2020	2021	2022
Senegal	55.633	49.901	67.680	159.608	619.839
Jordan	108.711	108.363	98.126	310.036	592.633
Kenya	302.904	264.932	388.340	532.523	475.371
Nigeria	421.221	424.297	371.047	463.871	459.789
Peru	222.115	199.351	172.777	319.974	442.782
Oman	321.750	294.125	184.148	251.781	411.055
Chili	158.974	126.678	144.764	259.359	354.657
Irak	136.567	168.928	188.120	218.313	348.332
Yunani	230.764	214.820	209.722	228.537	327.019
Angola	91.547	100.807	100.222	170.393	320.660
Bulgaria	428.900	56.741	126.817	39.753	314.343
Argentina	238.283	202.224	159.080	280.726	310.877
Estonia	99.992	167.499	182.155	322.016	309.874
Algeria	199.514	156.140	154.297	243.624	302.406
Timor-Leste	189.658	210.737	221.397	248.536	297.345
Qatar	91.231	168.394	184.329	217.164	296.810
Djibouti	211.544	162.584	195.595	311.073	290.827
Tanzania	263.182	262.864	244.101	361.940	277.358
Sri Lanka	320.578	321.364	265.928	379.925	263.773
Kolombia	141.050	140.076	125.366	332.238	259.100

Mitra Dagang	Nilai Ekspor				
	2018	2019	2020	2021	2022
Swedia	161.824	155.721	172.302	241.054	253.449
Mauritania	75.959	59.478	81.868	217.499	247.863
Papua Nugini	213.964	153.280	139.010	196.686	244.555
Iran	296.520	118.099	198.261	187.177	242.552
Brunei Darussalam	61.181	103.154	128.975	211.424	240.260
Togo	147.999	139.158	131.897	259.177	232.775
Moroko	85.221	84.055	75.201	104.057	194.045
Benin	234.885	148.007	141.983	249.306	192.049
Slovenia	104.657	105.920	80.662	128.282	187.434
Israel	123.174	120.631	157.528	162.912	185.556
Ghana	121.443	172.413	135.099	207.990	180.795
Kuwait	137.008	196.545	148.971	128.676	171.447
Panama	102.785	83.854	75.218	91.779	170.409
Tunisia	52.408	56.432	53.129	100.688	169.551
Honduras	26.846	25.305	34.966	154.202	153.052
Norwegia	60.291	87.550	53.652	53.832	144.666
Ekuador	76.894	67.444	47.813	126.122	139.261
Mozambik	61.353	129.716	58.928	113.347	135.817
Portugal	152.675	138.464	105.804	125.129	130.067
Romania	107.470	128.006	108.986	106.089	121.409

Mitra Dagang	Nilai Ekspor				
	2018	2019	2020	2021	2022
Yaman	131.962	150.038	129.937	129.823	120.885
Guatemala	49.431	41.732	50.955	72.966	118.673
Kroasia	40.846	37.783	47.805	42.810	117.897
Haiti	118.300	98.861	140.636	129.316	111.176
Pantai Gading	54.509	75.179	78.071	124.032	109.236
Georgia	51.273	42.211	45.371	273.972	108.013
Republik Dominika	69.494	72.016	60.536	59.578	107.363
Sudan	89.620	102.292	113.111	120.640	106.961
Kazakhstan	33.562	207.136	19.787	13.348	105.851
Somalia	68.112	63.610	73.160	90.618	100.866
Irlandia	79.885	71.369	76.190	94.865	96.159
Finlandia	85.121	76.619	60.787	85.413	92.092
Hungaria	73.690	88.331	81.527	92.734	91.255
Republik Ceko	83.202	87.210	70.131	89.867	83.163
Costa Rica	38.193	24.417	17.190	36.548	82.771
Lebanon	103.463	81.972	51.242	52.484	77.242
Kongo	53.165	0	0	69.714	71.343
Mauritius	81.554	83.033	68.807	63.318	67.609
Bhutan	1.156	1.434	1.011	78	67.472
Madagaskar	57.115	56.541	46.132	55.197	63.561

Mitra Dagang	Nilai Ekspor				
	2018	2019	2020	2021	2022
Latvia	133.481	89.226	72.877	64.951	61.668
Uruguay	38.604	41.538	34.046	42.138	58.011
Luxembourg	21.950	28.260	26.696	39.743	56.936
Austria	25.778	29.725	37.227	40.256	56.813
Kamerun	22.691	20.506	23.276	28.352	55.310
Libya	21.739	28.975	17.584	17.475	52.897
Liberia	27.777	23.708	26.338	36.938	52.553
El Salvador	19.968	22.239	16.501	32.331	51.305
Ethiopia	47.909	44.015	39.492	42.332	47.514
Gambia	41.260	43.165	51.483	72.229	47.194
Bahrain	46.664	46.132	38.036	44.102	44.830
Fiji	25.347	26.186	20.912	28.104	40.484
Slovakia	30.667	23.519	20.522	31.472	39.159
Maladewa	53.682	43.676	30.444	40.207	38.999
Ukraina	232.537	256.102	223.916	416.992	36.815
Jamaika	20.656	22.147	15.909	20.876	35.873
Nikaragaua	15.348	13.468	16.285	35.987	35.567
Uzbekistan	5.536	8.733	12.386	20.467	33.569
Guinea	49.056	49.746	68.963	86.494	32.961
Republik Kongo	9.913	66.265	71.893	34.903	31.483

Mitra Dagang	Nilai Ekspor				
	2018	2019	2020	2021	2022
Trinidad dan Tobago	28.720	20.655	20.065	21.164	31.419
Laos	7.300	6.837	5.096	7.577	26.622
Serbia	7.645	12.233	12.587	11.116	22.812
Paraguay	31.986	32.983	19.943	24.796	21.913
Islandia	2.590	1.154	922	17.919	21.411
Nepal	15.058	51.954	16.690	27.786	19.861
Bolivia	21.910	35.186	16.998	21.603	19.159
Kep Solomon	18.265	11.399	13.984	14.948	18.809
Kep Marshall	1.478	5.068	4.405	1.432	17.580
Venezuela	4.152	10.674	14.080	22.851	17.554
Polinesia Prancis	9.886	10.922	11.170	13.751	16.573
Burkina Faso	11.800	12.974	12.365	16.792	16.182
Uganda	12.018	6.287	3.925	5.535	15.398
Equatorial Guinea	5.496	9.065	6.494	15.374	14.899
Albania	9.789	9.726	6.644	7.869	14.093
Kaledonia Baru	11.063	11.413	14.565	12.242	13.719
Dominika	7.002	9.806	1.821	2.903	13.510
Afghanistan	21.802	15.470	21.381	15.047	12.897
Sierra Leone	29.012	18.297	12.030	8.429	12.561
Siprus	15.526	14.875	9.222	9.198	12.543

Mitra Dagang	Nilai Ekspor				
	2018	2019	2020	2021	2022
Mongolia	8.884	12.285	23.203	15.410	12.444
Lithuania	26.708	19.023	13.984	14.505	11.698
Samoa	7.135	6.711	9.714	10.525	11.596
Malawi	13.567	9.030	12.200	8.835	10.823
Macedonia	3.004	1.933	2.508	2.786	10.717
Gabon	9.498	18.949	6.248	7.982	9.500
Syria	41.527	44.866	25.657	19.574	9.358
Mali	4.916	6.557	6.746	9.326	9.145
Malta	9.601	4.860	3.431	7.173	8.350
Niger	2.503	4.145	3.644	4.817	8.060
Curaçao	5.616	6.929	3.836	5.362	6.534
Vanuatu	4.512	4.245	4.193	6.993	5.708
Suriname	6.479	8.344	5.677	4.136	5.691
Zimbabwe	5.490	1.611	2.708	4.243	5.666
Komoros	3.095	2.260	4.340	4.831	5.536
Namibia	1.166	1.365	1.397	1.060	5.091
Guyana	3.005	4.603	2.506	3.838	4.676
Barbados	5.559	4.006	3.770	3.048	4.336
Turkmenistan	2.042	2.186	2.811	1.538	4.003
Tonga	3.699	3.835	4.289	5.987	3.988

Mitra Dagang	Nilai Ekspor				
	2018	2019	2020	2021	2022
Eswatini	1.981	4.514	2.545	2.149	3.960
Botswana	599	1.046	402	145	3.867
Montenegro	6.040	5.820	3.485	4.403	3.771
Armenia	3.129	2.433	935	2.048	3.718
Kep Terluar Amerika Serikat	2.693	133	305	4.803	3.684
Sisilia	3.523	3.302	3.337	2.948	3.663
Azerbaijan	68.907	2.447	3.597	6.049	3.641
Bahamas	1.808	2.796	1.605	2.041	3.551
Saint Lucia	1.057	1.859	1.155	1.462	3.522
Zambia	3.602	1.505	1.556	1.363	3.403
Tajikistan	1.506	1.370	479	1.696	3.105
Makao	7.789	4.057	1.161	7.498	3.069
Afrika Tengah	502	968	2.263	2.101	3.040
Kiribati	1.727	2.332	2.605	4.490	3.019
Kuba	13.263	6.344	4.744	12.492	2.994
Antigua dan Barbuda	1.611	1.190	687	1.422	2.818
Kyrgyzstan	1.803	1.250	1.302	2.203	2.476
Aruba	2.197	2.647	1.199	825	1.945
Sao Tome dan Principe	725	766	1.375	1.823	1.685
Bermuda	1.749	1.222	917	1.585	1.660

Mitra Dagang	Nilai Ekspor				
	2018	2019	2020	2021	2022
Chad	296	644	1.004	207	1.607
Grenada	960	787	587	721	1.300
Mikornesia	753	1.647	1.176	1.530	1.189
Kep Cayman	2.004	1.452	665	1.133	1.068
Bosnia dan Herzegovina	983	1.990	1.030	697	965
Turks dan Kep Caicos	230	443	526	176	919
Palestina	2.759	2.914	1.957	356	824
Saint Kitts dan Nevis	1.003	1.026	300	547	821
Tanjung Verde	862	747	574	698	816
Belarusia	3.763	3.010	7.024	6.714	693
Nauru	359	480	609	478	655
Burundi	2.197	728	356	580	648
Kep Cook	966	901	772	701	621
Belize	1.228	1.240	732	704	577
Kep Virgin Inggris	2.116	2.095	1.138	521	573
Rwanda	18.209	2.947	833	576	537
Teritori Inggris di Samudera Hindia	0	0	0	0	514
Kep Wallis dan Futuna	139	188	126	526	477
Palau	139	192	196	648	434
Kep Mariana Utara	541	658	529	529	393

Mitra Dagang	Nilai Ekspor				
	2018	2019	2020	2021	2022
Saint Vincent dan Grenadines	1.276	620	256	247	390
Eritrea	420	127	647	0	385
Moldova	539	931	621	384	336
Guinea-Bissau	1.744	803	572	428	243
Andorra	26	33	45	217	225
Tokelau	0	50	16	25	86
Tuvalu	41	132	1.729	75	62
Greenland	5	30	111	36	59
Anguilla	275	9	38	50	38
Gibraltar	0	0	0	1.328	29
Saint Helena	0	0	42	34	24
Montserrat	0	1	13	1	24
Korea Utara	33	200	1	56	3
Saint Pierre dan Miquelon	0	0	0	0	3
Pitcairn	8	0	2	147	1
Kep Faroe	0	1	0	50	0
Niue	0	0	0	0	0
Samoa Amerika	0	1.331	2.420	0	0
Kep Christmas	0	0	0	0	0
Kep Cocos	0	0	0	0	0

Mitra Dagang	Nilai Ekspor				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kep Falkland	0	0	0	0	0
Teritori Selatan dan Antartika Prancis	0	0	0	0	0
Guam	0	1.653	703	0	0
Kep Norfolk	62	6	12	0	0
Sudan Selatan	0	0	0	0	0
Sahara Barat	0	0	0	0	0
Area Nes	0	0	0	0	0
Lesotho	0	75	231	27	0

Lampiran 5
Perkembangan Nilai Impor Indonesia 2018-2022 (ribu dolar AS)

Mitra Dagang	Nilai Impor 2018	Nilai Impor 2019	Nilai Impor 2020	Nilai Impor 2021	Nilai Impor 2022
Dunia	188.711.246	171.275.737	141.622.127	195.694.490	237.447.057
Tiongkok	45.537.831	44.930.621	39.634.710	56.211.017	67.723.698
Amerika Serikat	10.212.286	9.318.897	8.641.588	11.305.738	11.681.585
Jepang	17.976.712	15.661.831	10.672.054	14.256.264	17.176.667
India	5.016.912	4.295.692	3.764.305	7.658.524	9.329.537
Malaysia	8.602.839	7.775.274	6.933.024	9.450.854	12.475.634
Singapura	21.439.522	17.589.850	12.341.238	15.413.128	19.409.474
Filipina	958.432	821.897	592.010	1.273.263	1.493.778
Korea Selatan	9.088.876	8.421.259	6.849.368	9.426.814	11.718.182
Taiwan	3.556.424	3.721.087	3.625.364	4.349.153	4.452.700
Vietnam	3.794.630	3.848.196	3.130.606	4.212.970	4.817.797
Thailand	10.952.798	9.469.093	6.483.757	9.118.530	10.989.024
Belanda	1.239.254	832.012	804.330	845.905	855.499
Pakistan	641.423	377.959	194.940	185.504	188.113
Bangladesh	89.465	96.118	76.635	108.170	110.074
Australia	5.825.543	5.515.309	4.646.557	9.415.068	9.863.268
Jerman	3.972.967	3.476.535	3.023.873	3.187.534	3.821.840
Italia	1.840.387	1.776.756	1.557.145	1.728.212	1.486.286
Hong Kong	2.634.565	3.226.004	2.747.178	2.878.180	2.976.168
Persatuan Emirat Arab	1.862.007	2.183.652	1.682.992	2.142.989	2.760.474
Spanyol	681.524	614.576	456.831	684.054	585.920
Belgia	603.378	633.561	526.048	767.749	643.466

Mitra Dagang	Nilai Impor 2018	Nilai Impor 2019	Nilai Impor 2020	Nilai Impor 2021	Nilai Impor 2022
Turki	611.525	342.231	274.170	400.636	515.183
Arab Saudi	4.910.728	3.567.725	2.613.491	3.967.064	5.491.364
Swiss	876.218	696.270	701.845	682.862	870.041
Meksiko	287.320	265.714	269.458	307.310	338.355
Inggris	1.212.552	1.048.655	959.026	1.090.644	1.039.770
Brasil	1.802.544	1.940.388	2.560.824	2.621.509	3.900.084
Rusia	1.551.118	1.204.459	957.885	1.253.794	2.180.574
Mesir	139.747	135.381	128.299	212.187	226.009
Kanada	1.840.749	1.838.717	1.615.460	2.053.932	2.998.884
Polandia	178.295	224.810	285.313	192.769	238.427
Prancis	1.661.045	1.434.529	1.360.136	1.276.975	1.330.966
Afrika Selatan	1.068.595	815.883	688.881	1.835.123	2.163.791
Myanmar	151.561	182.679	187.249	165.897	111.200
Selandia Baru	808.442	763.598	757.011	959.365	1.397.380
Kamboja	33.022	42.595	47.356	49.256	62.637
Denmark	202.470	204.771	161.597	205.326	237.012
Senegal	2.256	2.904	6.475	264	830
Jordan	190.806	176.939	167.328	218.953	391.317
Kenya	15.413	25.288	26.652	19.420	32.020
Nigeria	2.527.457	1.917.850	830.728	2.047.402	4.321.217
Peru	56.459	68.528	76.041	84.249	111.807
Oman	348.943	460.155	341.629	597.659	1.376.784
Chili	115.105	149.101	108.902	165.209	229.344
Irak	150	156	24.290	98	140.281
Yunani	90.748	100.386	59.665	64.430	94.506

Mitra Dagang	Nilai Impor 2018	Nilai Impor 2019	Nilai Impor 2020	Nilai Impor 2021	Nilai Impor 2022
Angola	699.183	89.758	29.388	463.466	873.602
Bulgaria	68.761	97.809	62.158	89.255	120.087
Argentina	1.441.578	1.818.251	1.747.801	2.039.144	2.411.149
Estonia	28.517	24.402	20.422	58.603	33.054
Algeria	372.028	259.237	182.963	300.261	737.164
Timor-Leste	3.699	6.594	2.469	2.282	4.746
Qatar	1.411.275	947.287	710.781	675.779	974.043
Djibouti	4	140	1.079	14	6
Tanzania	71.541	18.314	16.705	59.649	63.491
Sri Lanka	42.946	40.270	26.626	53.346	50.424
Kolombia	18.026	12.785	8.779	36.871	47.980
Swedia	705.131	562.521	435.115	559.248	620.321
Mauritania	709	138	1.978	456	692
Papua Nugini	43.456	59.362	33.370	125.797	63.073
Iran	419.063	23.508	17.716	21.631	14.633
Brunei Darussalam	20.097	30.552	75.338	162.844	657.170
Togo	13.205	5.406	566	6.450	7.606
Moroko	90.804	86.142	57.613	91.457	114.441
Benin	5.219	5.511	921	12.295	6.793
Slovenia	17.275	21.502	27.877	24.029	34.023
Israel	46.687	25.335	56.537	26.503	47.815
Ghana	17.916	64.720	19.156	49.290	16.858
Kuwait	266.617	308.283	291.856	266.791	144.345
Panama	45.433	29.180	33.835	82.312	5.737
Tunisia	29.183	27.481	31.051	57.786	45.691

Mitra Dagang	Nilai Impor 2018	Nilai Impor 2019	Nilai Impor 2020	Nilai Impor 2021	Nilai Impor 2022
Honduras	2.085	1.433	591	483	408
Norwegia	181.909	198.526	177.585	223.431	261.460
Ekuador	150.974	165.038	202.776	165.850	163.195
Mozambik	30.501	19.613	10.342	10.853	46.691
Portugal	40.863	45.237	65.823	35.099	37.766
Romania	37.409	24.208	44.443	40.097	37.513
Yaman	795	1.370	1.864	676	1.194
Guatemala	866	1.191	15.033	940	823
Kroasia	39.259	8.079	9.203	7.546	12.605
Haiti	284	323	101	140	542
Pantai Gading	135.948	146.112	153.069	236.547	171.830
Georgia	675	5.571	4.470	426	1.633
Republik Dominika	14.731	28.615	20.427	26.204	16.912
Sudan	242.017	110.843	67.536	16.185	36.432
Kazakhstan	26.739	141.805	130.082	277.897	585.475
Somalia	1	2	30	2	54
Irlandia	160.250	149.324	133.533	136.602	165.118
Finlandia	663.312	506.785	334.330	390.367	494.775
Hungaria	74.673	99.498	131.187	105.007	168.180
Republik Ceko	151.068	191.519	268.891	139.422	171.713
Costa Rica	3.247	3.636	5.470	7.467	8.351
Lebanon	6.371	2.794	1.909	1.662	1.885
Kongo	6.503	0	0	87.794	254.732
Mauritius	4.107	4.219	3.266	3.187	2.366
Bhutan	9	3	4	0	1.670

Mitra Dagang	Nilai Impor 2018	Nilai Impor 2019	Nilai Impor 2020	Nilai Impor 2021	Nilai Impor 2022
Madagaskar	87.549	32.783	25.966	45.462	218.469
Latvia	20.147	31.421	22.162	21.562	19.509
Uruguay	9.170	20.096	10.727	13.559	23.528
Luxembourg	21.175	14.879	16.989	21.962	15.585
Austria	382.016	255.155	289.084	357.595	361.363
Kamerun	71.022	77.712	33.488	36.970	22.791
Libya	165.349	173	710	10.483	673
Liberia	864	16.808	34.771	3.171	37.837
El Salvador	1.101	880	1.048	1.549	1.604
Ethiopia	37.439	28.114	24.509	25.666	24.144
Gambia	54	45	6	11	41
Bahrain	69.942	178.942	132.050	223.140	180.957
Fiji	869	906	608	598	730
Slovakia	19.089	22.360	18.799	18.307	26.264
Maladewa	1.220	66	529	616	623
Ukraina	822.835	1.008.187	963.064	1.040.882	113.361
Jamaika	252	195	15	21	105
Nikaragaua	477	197	116	16	238
Uzbekistan	55.835	22.504	18.802	12.594	48.930
Guinea	1.515	1.333	494	4.851	29.221
Republik Kongo	183.241	15.174	12.203	47.632	13.376
Trinidad dan Tobago	58	1.004	11	54	44
Laos	25.678	31.122	42.266	37.967	167.607
Serbia	37.312	11.008	16.524	15.743	4.233
Paraguay	91.618	28.117	16.817	31.077	56.401

Mitra Dagang	Nilai Impor 2018	Nilai Impor 2019	Nilai Impor 2020	Nilai Impor 2021	Nilai Impor 2022
Islandia	6.608	7.319	3.101	7.794	8.146
Nepal	213	161	184	372	779
Bolivia	1.861	2.565	2.384	8.882	12.533
Kep Solomon	2.617	2.625	260	1.465	1.870
Kep Marshall	57.087	118.090	51.964	4.277	63.745
Venezuela	10.471	6.005	11.448	13.841	11.000
Polinesia Prancis	54	49	3	4	32
Burkina Faso	16.247	8.486	1.083	8.093	4.897
Uganda	13.594	4.675	5.035	11.841	6.050
Equatorial Guinea	117.626	28.714	43.107	149.203	162.648
Albania	311	468	122	5.297	280
Kaledonia Baru	893	152	17	80	14.566
Dominika	9.420	16	13	25	23
Afghanistan	490	204	487	209	381
Sierra Leone	1.083	1.617	3.106	2.371	2.057
Siprus	9.107	52.891	42.727	18.885	13.193
Mongolia	6.815	2	1.123	2.098	2.401
Lithuania	30.152	46.316	28.264	28.886	41.979
Samoa	1.088	2.876	4.928	376	2.213
Malawi	14.559	4.991	8.078	7.240	5.511
Macedonia	7.024	2.761	6.072	13.522	1.806
Gabon	120.835	1.917	15.457	312.705	459.000
Syiria	175	8	418	24	103
Mali	10.115	12.089	3.147	20.327	8.169
Malta	4.962	10.815	957	90.384	1.029

Mitra Dagang	Nilai Impor 2018	Nilai Impor 2019	Nilai Impor 2020	Nilai Impor 2021	Nilai Impor 2022
Niger	257	87	67	99	178
Curaçao	203	618	34	1.857	557
Vanuatu	736	672	14.225	150	0
Suriname	241	906	219	133	30
Zimbabwe	147.041	67.639	57.576	80.626	61.275
Komoros	3.979	161	0	0	5.530
Namibia	12.884	9.187	5.281	1.770	3.324
Guyana	8	32	47	2	409
Barbados	174	184	82	259	151
Turkmenistan	476	58	3	1	2
Tonga	0	0	108	0	2
Eswatini	2.225	3.477	1.599	1.071	1.758
Botswana	41	59	19	125	50
Montenegro	3.846	346	67	2.712	9.548
Armenia	457	43	875	953	68
Kep Terluar Amerika Serikat	36.102	307	1.300	1.745	1.814
Sisilia	9.994	18.456	25.205	12.017	13.317
Azerbaijan	437.136	12	497	227.709	840.525
Bahamas	47	169	4.915	5	1
Saint Lucia	0	0	0	0	0
Zambia	2.372	7.005	3.998	6.854	8.533
Tajikistan	16	28	4	0	2
Makao	8.789	4.745	9.197	8.923	4.726
Afrika Tengah	697	511	76	169	2.238
Kiribati	0	1.036	119	11.603	10.513

Mitra Dagang	Nilai Impor 2018	Nilai Impor 2019	Nilai Impor 2020	Nilai Impor 2021	Nilai Impor 2022
Kuba	995	434	778	789	1.031
Antigua dan Barbuda	3	1	0	827	225
Kyrgyzstan	15.747	96	238	1.396	416
Aruba	17	74	42	0	3
Sao Tome dan Principe	15	1	12	31	15
Bermuda	1	1	1	0	0
Chad	2.285	50	2.810	2.171	16.607
Grenada	53	2	55	0	1
Mikronesia	0	3.903	0	0	3
Kep Cayman	20	57	42	0	72
Bosnia dan Herzegovina	762	957	995	1.155	1.158
Turks dan Kep Caicos	0	1	1	0	8
Palestina	727	1.350	1.665	1.173	1.253
Saint Kitts dan Nevis	1	1	2	1	8
Tanjung Verde	130	21	57	100	536
Belarusia	217.570	207.157	158.169	282.269	89.917
Nauru	109	16	30	25	96
Burundi	8	3	23	40	70
Kep Cook	210	262	321	541	13
Belize	873	102	89	77	99
Kep Virgin Inggris	2.018	9.284	1.168	8.137	878
Rwanda	125	104	66	3	202
Teritori Inggris di Samudera Hindia	0	41	2	18	0
Kep Wallis dan Futuna	0	0	0	0	0
Palau	28	9	87	3	6

Mitra Dagang	Nilai Impor 2018	Nilai Impor 2019	Nilai Impor 2020	Nilai Impor 2021	Nilai Impor 2022
Kep Mariana Utara	25	0	0	0	1
Saint Vincent dan Grenadines	179	439	846	0	20
Eritrea	0	2	0	12	7
Moldova	13.769	32.469	15.265	20.386	12.312
Guinea-Bissau	0	0	0	0	0
Andorra	40	48	23	125	593
Tokelau	1.508	672	24	67	52
Tuvalu	0	0	0	0	0
Greenland	2	319	86	140	919
Anguilla	906	217	376	19	17
Gibraltar	2	0	0	1	0
Saint Helena	82	8	96	350	7
Montserrat	1	29	3	5	3
Korea Utara	931	3.063	770	409	798
Saint Pierre dan Miquelon	0	0	0	0	0
Pitcairn	0	3	0	6	1
Kep Faroe	17	14	0	16	80
Niue	129.206	58.751	77.318	3.520	3
Samoa Amerika	0	676	591	0	0
Kep Christmas	4.739	3.549	3.176	1.002	3.032
Kep Cocos	57	26	1	219	90
Kep Falkland	0	0	0	0	0
Teritori Selatan dan Antartika Prancis	974	24	1	8	5
Guam	0	0	0	0	0

Mitra Dagang	Nilai Impor 2018	Nilai Impor 2019	Nilai Impor 2020	Nilai Impor 2021	Nilai Impor 2022
Kep Norfolk	22	73	27	37	10
Sudan Selatan	0	0	0	0	0
Sahara Barat	0	0	0	0	27
Area Nes	0	0	0	0	1
Lesotho	657	411	230	3	2

Lampiran 6
Perkembangan Neraca Dagang Indonesia 2018-2022 (ribu dolar AS)

Mitra Dagang	Neraca Dagang 2018	Neraca Dagang 2019	Neraca Dagang 2020	Neraca Dagang 2021	Neraca Dagang 2022
Dunia	-8.496.210	-3.592.741	21.684.363	35.893.397	54.532.046
Tiongkok	-18.410.899	-16.968.734	-7.859.018	-2.446.349	-1.799.581
Amerika Serikat	8.259.136	8.554.550	10.025.180	14.529.191	16.557.529
Jepang	1.503.180	341.430	2.990.817	3.612.023	7.668.698
India	8.708.764	7.527.799	6.649.694	5.683.462	14.049.299
Malaysia	833.882	1.026.541	1.197.603	2.517.037	2.976.796
Singapura	-8.447.929	-4.673.120	-1.628.923	-3.781.233	-5.013.742
Filipina	5.867.028	5.948.214	5.306.700	7.331.023	11.409.425
Korea Selatan	443.624	-1.186.850	-342.867	-445.937	1.095.507
Taiwan	1.144.470	313.745	473.441	2.610.376	4.250.054
Vietnam	789.307	1.305.162	1.810.396	2.637.063	3.468.247
Thailand	-4.133.849	-3.250.700	-1.370.895	-2.030.818	-2.819.663
Belanda	2.658.912	2.372.939	2.309.693	3.784.716	4.523.678
Pakistan	1.826.444	1.566.061	2.191.579	3.645.066	4.142.620
Bangladesh	1.798.580	1.817.671	1.609.186	2.820.452	3.784.554
Australia	-3.025.467	-3.186.684	-2.140.201	-6.192.229	-6.393.663
Jerman	-1.263.155	-1.070.780	-566.887	-272.854	-605.780
Italia	80.851	-27.293	188.938	1.077.490	1.643.592
Hong Kong	-75.350	-724.330	-709.864	-815.617	-23.096
Persatuan Emirat Arab	-401.308	-712.424	-439.721	-248.732	-460.118
Spanyol	1.567.046	984.629	1.058.741	1.668.938	1.707.727
Belgia	658.428	442.120	711.268	864.255	1.547.833

Mitra Dagang	Neraca Dagang 2018	Neraca Dagang 2019	Neraca Dagang 2020	Neraca Dagang 2021	Neraca Dagang 2022
Turki	570.349	805.649	774.076	1.203.815	1.554.233
Arab Saudi	-3.688.301	-2.064.566	-1.275.355	-2.383.499	-3.472.411
Swiss	-206.287	44.453	1.696.327	632.778	1.012.867
Meksiko	618.214	673.565	667.222	997.189	1.364.547
Inggris	253.556	302.852	324.628	385.965	624.307
Brasil	-656.950	-937.741	-1.545.658	-1.111.690	-2.413.023
Rusia	-549.976	-340.378	15.939	239.137	-794.063
Mesir	893.767	877.401	928.320	1.435.649	1.116.373
Kanada	-926.457	-980.511	-826.410	-990.632	-1.722.724
Polandia	282.777	258.972	155.792	461.871	885.256
Prancis	-621.059	-383.512	-415.013	-245.238	-214.004
Afrika Selatan	-423.003	-227.053	-116.683	-868.617	-1.072.948
Myanmar	745.929	692.947	844.706	956.221	854.799
Selandia Baru	-317.639	-316.085	-277.000	-240.540	-665.465
Kamboja	492.356	575.926	493.946	481.908	663.322
Denmark	-1.187	-9.437	2.303	-3.504	473.309
Senegal	53.377	46.997	61.205	159.344	619.009
Jordan	-82.095	-68.576	-69.202	91.083	201.316
Kenya	287.491	239.644	361.688	513.103	443.351
Nigeria	-2.106.236	-1.493.553	-459.681	-1.583.531	-3.861.428
Peru	165.656	130.823	96.736	235.725	330.975
Oman	-27.193	-166.030	-157.481	-345.878	-965.729
Chili	43.869	-22.423	35.862	94.150	125.313
Irak	136.417	168.772	163.830	218.215	208.051
Yunani	140.016	114.434	150.057	164.107	232.513

Mitra Dagang	Neraca Dagang 2018	Neraca Dagang 2019	Neraca Dagang 2020	Neraca Dagang 2021	Neraca Dagang 2022
Angola	-607.636	11.049	70.834	-293.073	-552.942
Bulgaria	360.139	-41.068	64.659	-49.502	194.256
Argentina	-1.203.295	-1.616.027	-1.588.721	-1.758.418	-2.100.272
Estonia	71.475	143.097	161.733	263.413	276.820
Algeria	-172.514	-103.097	-28.666	-56.637	-434.758
Timor-Leste	185.959	204.143	218.928	246.254	292.599
Qatar	-1.320.044	-778.893	-526.452	-458.615	-677.233
Djibouti	211.540	162.444	194.516	311.059	290.821
Tanzania	191.641	244.550	227.396	302.291	213.867
Sri Lanka	277.632	281.094	239.302	326.579	213.349
Kolombia	123.024	127.291	116.587	295.367	211.120
Swedia	-543.307	-406.800	-262.813	-318.194	-366.872
Mauritania	75.250	59.340	79.890	217.043	247.171
Papua Nugini	170.508	93.918	105.640	70.889	181.482
Iran	-122.543	94.591	180.545	165.546	227.919
Brunei Darussalam	41.084	72.602	53.637	48.580	-416.910
Togo	134.794	133.752	131.331	252.727	225.169
Moroko	-5.583	-2.087	17.588	12.600	79.604
Benin	229.666	142.496	141.062	237.011	185.256
Slovenia	87.382	84.418	52.785	104.253	153.411
Israel	76.487	95.296	100.991	136.409	137.741
Ghana	103.527	107.693	115.943	158.700	163.937
Kuwait	-129.609	-111.738	-142.885	-138.115	27.102
Panama	57.352	54.674	41.383	9.467	164.672
Tunisia	23.225	28.951	22.078	42.902	123.860

Mitra Dagang	Neraca Dagang 2018	Neraca Dagang 2019	Neraca Dagang 2020	Neraca Dagang 2021	Neraca Dagang 2022
Honduras	24.761	23.872	34.375	153.719	152.644
Norwegia	-121.618	-110.976	-123.933	-169.599	-116.794
Ekuador	-74.080	-97.594	-154.963	-39.728	-23.934
Mozambik	30.852	110.103	48.586	102.494	89.126
Portugal	111.812	93.227	39.981	90.030	92.301
Romania	70.061	103.798	64.543	65.992	83.896
Yaman	131.167	148.668	128.073	129.147	119.691
Guatemala	48.565	40.541	35.922	72.026	117.850
Kroasia	1.587	29.704	38.602	35.264	105.292
Haiti	118.016	98.538	140.535	129.176	110.634
Pantai Gading	-81.439	-70.933	-74.998	-112.515	-62.594
Georgia	50.598	36.640	40.901	273.546	106.380
Republik Dominika	54.763	43.401	40.109	33.374	90.451
Sudan	-152.397	-8.551	45.575	104.455	70.529
Kazakhstan	6.823	65.331	-110.295	-264.549	-479.624
Somalia	68.111	63.608	73.130	90.616	100.812
Irlandia	-80.365	-77.955	-57.343	-41.737	-68.959
Finlandia	-578.191	-430.166	-273.543	-304.954	-402.683
Hungaria	-983	-11.167	-49.660	-12.273	-76.925
Republik Ceko	-67.866	-104.309	-198.760	-49.555	-88.550
Costa Rica	34.946	20.781	11.720	29.081	74.420
Lebanon	97.092	79.178	49.333	50.822	75.357
Kongo	46.662	0	0	-18.080	-183.389
Mauritius	77.447	78.814	65.541	60.131	65.243
Bhutan	1.147	1.431	1.007	78	65.802

Mitra Dagang	Neraca Dagang 2018	Neraca Dagang 2019	Neraca Dagang 2020	Neraca Dagang 2021	Neraca Dagang 2022
Madagaskar	-30.434	23.758	20.166	9.735	-154.908
Latvia	113.334	57.805	50.715	43.389	42.159
Uruguay	29.434	21.442	23.319	28.579	34.483
Luxembourg	775	13.381	9.707	17.781	41.351
Austria	-356.238	-225.430	-251.857	-317.339	-304.550
Kamerun	-48.331	-57.206	-10.212	-8.618	32.519
Libya	-143.610	28.802	16.874	6.992	52.224
Liberia	26.913	6.900	-8.433	33.767	14.716
El Salvador	18.867	21.359	15.453	30.782	49.701
Ethiopia	10.470	15.901	14.983	16.666	23.370
Gambia	41.206	43.120	51.477	72.218	47.153
Bahrain	-23.278	-132.810	-94.014	-179.038	-136.127
Fiji	24.478	25.280	20.304	27.506	39.754
Slovakia	11.578	1.159	1.723	13.165	12.895
Maladewa	52.462	43.610	29.915	39.591	38.376
Ukraina	-590.298	-752.085	-739.148	-623.890	-76.546
Jamaika	20.404	21.952	15.894	20.855	35.768
Nikaragaua	14.871	13.271	16.169	35.971	35.329
Uzbekistan	-50.299	-13.771	-6.416	7.873	-15.361
Guinea	47.541	48.413	68.469	81.643	3.740
Republik Kongo	-173.328	51.091	59.690	-12.729	18.107
Trinidad dan Tobago	28.662	19.651	20.054	21.110	31.375
Laos	-18.378	-24.285	-37.170	-30.390	-140.985
Serbia	-29.667	1.225	-3.937	-4.627	18.579
Paraguay	-59.632	4.866	3.126	-6.281	-34.488

Mitra Dagang	Neraca Dagang 2018	Neraca Dagang 2019	Neraca Dagang 2020	Neraca Dagang 2021	Neraca Dagang 2022
Islandia	-4.018	-6.165	-2.179	10.125	13.265
Nepal	14.845	51.793	16.506	27.414	19.082
Bolivia	20.049	32.621	14.614	12.721	6.626
Kep Solomon	15.648	8.774	13.724	13.483	16.939
Kep Marshall	-55.609	-113.022	-47.559	-2.845	-46.165
Venezuela	-6.319	4.669	2.632	9.010	6.554
Polinesia Prancis	9.832	10.873	11.167	13.747	16.541
Burkina Faso	-4.447	4.488	11.282	8.699	11.285
Uganda	-1.576	1.612	-1.110	-6.306	9.348
Equatorial Guinea	-112.130	-19.649	-36.613	-133.829	-147.749
Albania	9.478	9.258	6.522	2.572	13.813
Kaledonia Baru	10.170	11.261	14.548	12.162	-847
Dominika	-2.418	9.790	1.808	2.878	13.487
Afghanistan	21.312	15.266	20.894	14.838	12.516
Sierra Leone	27.929	16.680	8.924	6.058	10.504
Siprus	6.419	-38.016	-33.505	-9.687	-650
Mongolia	2.069	12.283	22.080	13.312	10.043
Lithuania	-3.444	-27.293	-14.280	-14.381	-30.281
Samoa	6.047	3.835	4.786	10.149	9.383
Malawi	-992	4.039	4.122	1.595	5.312
Macedonia	-4.020	-828	-3.564	-10.736	8.911
Gabon	-111.337	17.032	-9.209	-304.723	-449.500
Syiria	41.352	44.858	25.239	19.550	9.255
Mali	-5.199	-5.532	3.599	-11.001	976
Malta	4.639	-5.955	2.474	-83.211	7.321

Mitra Dagang	Neraca Dagang 2018	Neraca Dagang 2019	Neraca Dagang 2020	Neraca Dagang 2021	Neraca Dagang 2022
Niger	2.246	4.058	3.577	4.718	7.882
Curaçao	5.413	6.311	3.802	3.505	5.977
Vanuatu	3.776	3.573	-10.032	6.843	5.708
Suriname	6.238	7.438	5.458	4.003	5.661
Zimbabwe	-141.551	-66.028	-54.868	-76.383	-55.609
Komoros	-884	2.099	4.340	4.831	6
Namibia	-11.718	-7.822	-3.884	-710	1.767
Guyana	2.997	4.571	2.459	3.836	4.267
Barbados	5.385	3.822	3.688	2.789	4.185
Turkmenistan	1.566	2.128	2.808	1.537	4.001
Tonga	3.699	3.835	4.181	5.987	3.986
Eswatini	-244	1.037	946	1.078	2.202
Botswana	558	987	383	20	3.817
Montenegro	2.194	5.474	3.418	1.691	-5.777
Armenia	2.672	2.390	60	1.095	3.650
Kep Terluar Amerika Serikat	-33.409	-174	-995	3.058	1.870
Sisilia	-6.471	-15.154	-21.868	-9.069	-9.654
Azerbaijan	-368.229	2.435	3.100	-221.660	-836.884
Bahamas	1.761	2.627	-3.310	2.036	3.550
Saint Lucia	1.050	1.846	1.154	1.460	3.522
Zambia	1.230	-5.500	-2.442	-5.491	-5.130
Tajikistan	1.490	1.342	475	1.696	3.103
Makao	-1.000	-688	-8.036	-1.425	-1.657
Afrika Tengah	-195	457	2.187	1.932	802
Kiribati	1.727	1.296	2.486	-7.113	-7.494

Mitra Dagang	Neraca Dagang 2018	Neraca Dagang 2019	Neraca Dagang 2020	Neraca Dagang 2021	Neraca Dagang 2022
Kuba	12.268	5.910	3.966	11.703	1.963
Antigua dan Barbuda	1.608	1.189	687	595	2.593
Kyrgyzstan	-13.944	1.154	1.064	807	2.060
Aruba	2.180	2.573	1.157	825	1.942
Sao Tome dan Principe	710	765	1.363	1.792	1.670
Bermuda	1.748	1.221	916	1.585	1.660
Chad	-1.989	594	-1.806	-1.964	-15.000
Grenada	907	785	532	721	1.299
Mikronesia	753	-2.256	1.176	1.530	1.186
Kep Cayman	1.984	1.395	623	1.133	996
Bosnia dan Herzegovina	221	1.033	35	-458	-193
Turks dan Kep Caicos	230	442	525	176	911
Palestina	2.032	1.564	292	-817	-429
Saint Kitts dan Nevis	1.002	1.025	298	546	813
Tanjung Verde	732	726	517	598	280
Belarusia	-213.807	-204.147	-151.145	-275.555	-89.224
Nauru	250	464	579	453	559
Burundi	2.189	725	333	540	578
Kep Cook	756	639	451	160	608
Belize	355	1.138	643	627	478
Kep Virgin Inggris	98	-7.189	-30	-7.616	-305
Rwanda	18.084	2.843	767	573	335
Teritori Inggris di Samudera Hindia	0	-41	-2	-18	514
Kep Wallis dan Futuna	139	188	126	526	477
Palau	111	183	109	645	428

Mitra Dagang	Neraca Dagang 2018	Neraca Dagang 2019	Neraca Dagang 2020	Neraca Dagang 2021	Neraca Dagang 2022
Kep Mariana Utara	516	658	529	529	392
Saint Vincent dan Grenadines	1.097	181	-590	247	370
Eritrea	420	125	647	-12	378
Moldova	-13.230	-31.538	-14.644	-20.002	-11.976
Guinea-Bissau	1.744	803	572	428	243
Andorra	-14	-15	22	92	-368
Tokelau	-1.508	-622	-8	-42	34
Tuvalu	40	-7.368	1.729	68	62
Greenland	3	-289	25	-104	-860
Anguilla	-631	-208	-338	31	21
Gibraltar	-2	0	0	1.327	29
Saint Helena	-82	-8	-54	-316	17
Montserrat	-1	-28	10	-4	21
Korea Utara	-898	-2.863	-769	-353	-795
Saint Pierre dan Miquelon	0	0	0		3
Pitcairn	8	-3	2	141	0
Kep Faroe	-17	-13	0	34	-80
Niue	-129.206	-58.751	-77.318	-3.520	-3
Samoa Amerika	0	655	1.829		
Kep Christmas	-4.739	-3.549	-3.176	-1.002	-3.032
Kep Cocos	-57	-26	-1	-219	-90
Kep Falkland	-185	-5	-87	-166	
Teritori Selatan dan Antartika Prancis	-974	-24	-1	-8	-5
Guam	0	1.653	703		

Mitra Dagang	Neraca Dagang 2018	Neraca Dagang 2019	Neraca Dagang 2020	Neraca Dagang 2021	Neraca Dagang 2022
Kep Norfolk	40	-67	-15	-37	-10
Sudan Selatan	-6	0	0	-99	
Sahara Barat	0	0	0		-27
Area Nes	0	0	0		-1
Lesotho	-657	-336	1	24	-2

Lampiran 7
Perkembangan Investasi Asing di Indonesia 2018-2022 (dolar AS)

Kawasan/ Mitra Investor	2018		2019		2020		2021		2022	
	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi
Asia	18.263	22.710.140	20.870	21.567.352	41.310	24.297.393	19.295	23.358.704	22.320	36.859.831
Asean	7.359	11.380.318	8.986	8.220.111	18.899	10.936.681	8.667	11.274.702	9.810	16.847.811
Brunei										
Darrussalam	16	509	13	533	17	0	9	0	5	1
Filipina	31	15.394	43	9.568	92	160	39	70.023	56	14.121
Malaysia	1.485	1.774.901	1.682	1.357.479	3.283	1.045.271	1.474	1.364.326	1.551	3.343.266
Muangthai	211	396.332	225	342.815	410	112.105	208	450.289	232	209.286
Myanmar	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0
Singapura	5.615	9.193.183	7.020	6.509.628	15.088	9.779.106	6.934	9.390.063	7.960	13.281.113
Vietnam	1	0	3	88	7	39	2	0	6	24
Asia di luar ASEAN	10.904	11.329.822	11.884	13.347.241	22.411	13.360.713	10.628	12.084.002	12.510	20.012.021
Afghanistan	26	114	32	238	33	164	15	0	7	0
Arab Saudi	45	5.359	44	5.408	47	5.745	21	3.640	34	1.743
Bahrain	2	87	1	0	2	0	0	0	0	0
Bangladesh	5	384	12	400	15	115	7	46	12	1.298
Hong Kong	1.222	2.011.425	1.508	2.890.992	2.789	3.535.897	1.418	4.609.342	1.616	5.514.193
India	454	82.124	526	58.272	833	57.626	465	49.576	739	127.597
Irak	5	49	5	107	1	10	5	0	2	383
Iran	16	299	26	325	38	62	16	49	12	228
Jepang	3.988	4.952.771	3.836	4.310.907	8.817	2.588.016	3.623	2.263.229	4.220	3.562.794
Kazakhstan	0	0	3	0	6	0	2	5	2	14

Kawasan/ Mitra Investor	2018		2019		2020		2021		2022	
	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi
Korea Selatan	2.779	1.604.719	2.952	1.070.213	5.468	1.841.946	2.511	1.640.156	2.907	2.297.835
Kuwait	7	501	6	146	13	83	1	576	8	1.019
Libanon	6	45	10	1.011	23	694	11	345	16	170
Makao	9	1.105	12	0	19	0	4	0	0	0
Maladewa	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Nepal	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Oman	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Pakistan	29	3.992	39	1.163	36	178	48	72	79	5.891
Palestina	0	0	2	376	1	10	2	113	3	23
Qatar	1	200	0	0	2	6.936	3	16.250	2	288
R. R. Tiongkok	1.648	2.376.538	2.130	4.744.509	3.027	4.842.406	1.806	3.160.380	2.117	8.226.035
Srilangka	5	8	6	6.741	11	2.016	5	93	6	6.985
Suriah	0	0	11	1.023	16	0	8	918	7	1.956
Taiwan	537	210.223	546	181.089	948	454.344	458	316.855	493	236.736
Uni Emirat Arab	63	69.943	77	69.733	118	21.578	77	16.149	146	22.883
Uzbekistan	0	0	0	0	0	0	10	394	1	27
Yaman	37	6.561	84	3.187	123	1.865	88	356	74	3.310
Yordania	18	3.379	15	1.401	25	1.024	18	313	6	603
Tajikistan	0	0	0	0	0	0	2	5.145	1	10
Eropa	3.849	2.318.192	5.286	3.655.490	9.275	2.232.489	5.096	3.452.961	6.639	2.897.953
Uni Eropa	3.409	2.044.348	4.697	3.437.519	8.267	2.069.196	4.436	2.788.847	5.626	2.722.799
Austria	63	71.407	74	19.697	89	1.221	54	63.349	46	67.399
Belanda	996	943.123	1.346	2.596.782	2.537	1.422.375	1.243	1.761.622	1.451	1.220.216
Belgia	171	216.373	195	86.842	381	27.041	163	55.514	265	73.163
Bulgaria	0	0	4	178	10	176	4	155	11	1.001

Kawasan/ Mitra Investor	2018		2019		2020		2021		2022	
	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi
Republik Ceko	7	969	17	1.063	27	755	29	1.037	44	3.234
Denmark	71	1.816	115	7.604	183	2.505	83	14.243	77	12.696
Finlandia	23	3.528	37	5.331	52	4	31	4.984	30	2.692
Hungaria	7	1.900	15	799	25	1.560	24	1.963	32	84.481
Inggris	545	271.134	756	142.122	1.386	192.752	705	322.949	908	628.276
Irlandia	20	602	43	25.412	47	15.412	42	31.785	41	1.452
Isle Of Man	2	0	3	0	2	0	1	0	0	0
Italia	199	32.089	264	27.445	420	12.681	261	37.589	274	26.872
Jerman	435	280.418	532	189.303	1.008	143.614	515	182.319	631	195.495
Kroasia	3	783	5	636	7	0	3	0	0	0
Luxembourg	144	134.261	145	126.017	356	209.185	153	144.552	129	64.467
Perancis	445	49.631	723	167.354	1.079	25.112	709	145.764	1.160	252.868
Polandia	9	200	24	667	85	1.092	56	993	53	2.557
Portugal	9	1.189	14	82	19	251	13	1.653	25	1.734
Rumania	5	1.578	3	0	8	0	8	57	28	947
Siprus	17	5.574	13	5.383	22	426	10	254	13	1.407
Slovakia	3	179	5	2	15	31	9	688	20	1.302
Slovenia	3	20	12	942	22	199	8	56	17	3.713
Spanyol	119	10.521	176	6.833	261	7.584	149	6.777	235	17.291
Swedia	110	16.831	154	26.290	203	5.005	135	9.222	125	59.379
Yunani	3	224	22	735	23	215	28	1.325	11	157
Eropa Lainnya	440	273.844	589	217.971	1.008	163.293	660	664.113	1.013	175.154
Kepulauan Channel	7	75	6	0	1	0	3	0	0	0
Islandia	2	2	3	105	1	45	1	207	2	23

Kawasan/ Mitra Investor	2018		2019		2020		2021		2022	
	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi
Jibraltar	0	0	0	0	4	9	1	0	7	38
Norwegia	26	17.202	38	17.000	47	7.017	21	20.326	42	4.651
Rusia	46	2.178	92	18.412	200	4.604	205	23.208	484	30.568
Scotlandia	4	0	4	0	12	0	3	0	1	0
Swiss	266	243.283	324	150.702	554	130.891	281	599.772	292	133.773
Turki	64	4.656	65	24.817	91	602	51	825	57	4.697
Ukraina	10	945	31	556	32	2.231	43	1.603	122	1.223
Yugoslavia	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Estonia	1	0	0	0	1	7	0	0	0	0
Guernsey	1	765	4	423	6	16	5	4.158	0	0
Latvia	1	141	0	0	1	0	4	5	0	0
Liechtenstein	3	0	2	9	20	0	7	0	0	0
Malta	5	4.598	2	5.263	10	1.759	9	13.031	0	0
Azerbaijan	2	0	4	0	7	0	4	6	0	0
Andorra	0	0	1	13	0	0	0	0	0	0
Armenia	0	0	1	13	0	0	1	7	0	0
British Isles	0	0	0	0	2	15.431	0	111	0	0
Lithuania	0	0	4	563	10	525	5	443	0	0
Monaco	0	0	2	6	2	0	1	36	0	0
Serbia	0	0	5	87	7	157	8	367	6	182
Albania	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Belarusia	0	0	0	0	0	0	6	11	0	0
Moldova	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8
Amerika	1.892	2.882.730	2.556	2.139.143	3.590	1.566.120	1.591	3.880.082	2.046	4.808.790
Amerika Serikat	652	1.217.624	788	989.313	1.471	749.731	824	2.537.219	1.036	3.026.234

Kawasan/ Mitra Investor	2018		2019		2020		2021		2022	
	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi
Argentina	5	137	9	300	8	1	6	149	11	380
Bahamas	10	0	8	0	20	0	2	0	1	0
Belize	5	0	3	0	2	0	1	0	0	0
Bermuda	4	114	2	0	30	122.271	15	674.368	9	954.704
Brasil	32	98.427	43	18.750	55	683	27	282	34	8.803
British Virgin Islands	896	1.043.256	1.392	743.786	1.416	334.339	433	345.193	459	423.312
Dominika	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0
Guatemala	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Kanada	107	170.769	124	186.267	255	175.287	126	182.091	166	250.428
Costa Rika	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7
Meksiko	4	324	4	332	5	52	6	49	19	965
Panama	33	100.710	24	23.426	40	538	21	1.206	12	192
Puerto Rico	1	0	0	0	3	0	1	10	0	0
Pulau Cayman	132	250.837	136	175.641	254	182.899	96	115.283	298	143.765
Venezuela	1	15	1	0	2	0	0	0	0	0
Jamaica	1	0	3	0	3	0	1	0	0	0
Anguilla	4	271	3	69	9	226	15	24.033	0	0
Kolumbia	5	246	3	943	4	15	10	24	0	0
Bolivia	0	0	4	57	5	77	1	21	0	0
Chili	0	0	3	50	4	1	3	12	0	0
Equador	0	0	2	10	0	0	0	0	0	0
Nicaragua	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
Peru	0	0	1	0	0	0	1	7	0	0
Uruguay	0	0	1	200	2	0	2	136	0	0

Kawasan/ Mitra Investor	2018		2019		2020		2021		2022	
	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi
Kep. Virgin	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.249
Oseania	243	484.741	1.246	519.917	1.908	390.120	1.014	236.288	1.373	678.081
Australia	63	71.407	1.048	348.266	1.562	348.553	839	195.196	982	524.409
Kep. Marshall	21	386.520	34	154.637	63	19.579	26	7.428	16	1.155
Samoa Barat	76	13.631	42	7.132	98	7.084	51	7.896	71	73.424
Selandia Baru	76	9.281	108	3.243	169	13.388	86	8.182	137	3.700
Vanuatu	0	0	2	191	1	0	1	0	1	0
Papua Nugini	2	0	2	0	3	0	1	0	0	0
Cook Islands	5	3.902	10	6.449	10	1.127	3	750	153	25.349
Fiji	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Samoa Amerika	0	0	0	0	1	390	6	16.838	13	50.044
Afrika	346	371.147	396	326.860	643	180.150	275	165.034	303	359.078
Afrika Selatan	20	5.369	27	400	38	78	14	1.459	35	452
Aljazair	2	0	3	0	4	0	3	0	4	15
Bukina Faso	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0
Ghana	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Guinea	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0
Jibouti Rep.	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Kamerun	1	0	1	0	1	16	1	0	3	1
Kenya	4	0	5	3	11	5	0	0	3	728
Kongo	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0
Liberia	1	0	4	93	15	0	0	0	13	1.011
Libya	3	0	4	33	4	35	0	0	1	0
Mali	3	1.100	2	1	2	0	1	0	1	0
Maroko	2	45	4	1	3	2	4	45	2	278

Kawasan/ Mitra Investor	2018		2019		2020		2021		2022	
	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi
Mauritania	6	0	6	11.478	9	0	3	482	0	189
Mauritius	157	267.861	165	85.384	330	112.321	118	106.483	89	277.439
Mesir	8	641	19	260	30	365	15	10	14	365
Namibia	0	0	1	0	4	0	2	0	5	745
Nigeria	21	484	26	236	10	93	3	744	11	391
Senegal	0	0	1	33	0	0	0	0	0	0
Seychel	108	95.348	110	228.567	167	67.235	85	52.224	95	76.322
Siera Leone	1	0	4	137	1	0	0	0	1	61
Somalia	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Sudan	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0
Swaziland	0	0	0	0	0	0	20	3.407	25	1.081
Tanzania	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0
Tunisia	3	299	6	133	6	0	1	0	1	0
Ethiopia	0	0	0	0	0	0	3	181	0	0